

**LAPORAN INDIVIDU
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DI SMA NEGERI 1 MLATI**

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
15 Juli – 15 September 2016

**Dosen Pembimbing Lapangan
Praktik Pengalaman Lapangan (DPL-PPL)
Setiati Widiastuti, M.Hum**



Disusun Oleh :

Lisa Ristyaningsih

13401244017

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Pengesahan laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) UNY di SMA Negeri 1 Mlati.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Lisa Ristyaningsih

NIM : 13401244017

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Semester Khusus Tahun Akademik 2016/2017 UNY pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016 di SMA Negeri 1 Mlati yang beralamat di Dusun Cebongan, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah penulisan laporan PPL ini.

Mlati, 15 September 2016

Mengetahui,


Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

Koordinator PPL SMA N 1 Mlati



Suparwanto, S.Pd

NIP 19680312 199702 1 003

Dosen Pembimbing PPL



Setiati Widiastuti, M.Hum

NIP 19600328 198403 2 001

Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati



Drs. Aris Sutardi

NIP 19640128 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pelaksanaan PPL yang berlangsung dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016 di SMA Negeri 1 Mlati dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan PPL ini merupakan suatu kegiatan yang berupa praktik mengajar dan penataan bagi calon guru didalam sebuah sekolah/instansi pendidikan.

Adanya kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan sumbangan inovasi dan pemikiran serta pengembangan baik untuk guru maupun sekolah. Kegiatan ini telah memberikan banyak pengalaman bagi kami, maka tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala nikmat yang tidak dapat satu persatu penulis menghitungnya, yang selalu menguatkan dan meneguhkan langkah tiap melangkah. Wahai Yang Maha Membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini pada agama ini dan pada ketaatan padaMu.
2. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Aris Sutardi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mlati yang telah memberi ijin melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di SMA Negeri 1 Mlati
4. Ibu Setiati Widiastuti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan Program Pendidikan Kewarganegaraan PPL UNY di SMA Negeri 1 Mlati
5. Bapak Suparwanto S.Pd selaku Koordinator PPL di SMA Negeri 1 Mlati yang telah memberikan bimbingan kepada kami.
6. Ibu Dra. Mawanti Widyastuti, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL UNY 2016 yang telah mendampingi, membimbing dan memotivasi kami untuk menghasilkan yang terbaik selama proses PPL UNY 2016 di SMA Negeri 1 Mlati
7. Ibu Setiati Widiastuti, M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Michroteaching yang telah membimbing dan melatih dalam hal mengajar di kelas.
8. Ibu Ervin Iswandayani, S.Pd selaku guru pembimbing bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan yang selalu membimbing, memberikan pengarahan dalam mengajar selama pelaksanaan PPL.

9. Bapak dan Ibu Guru serta segenap karyawan SMA Negeri 1 Mlati
10. Segenap Staf Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL) UNY 2016 yang telah mengarahkan kami dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.
11. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Mlati yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program-program PPL UNY.
12. Ayah dan Ibunda Tercinta yang selalu mendukung dan memotivasi kami dalam melaksanakan PPL UNY 2016, baik secara moril maupun materil.
13. Rekan-rekan PPL UNY 2016 di SMA Negeri 1 Mlati atas kerjasamanya
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan PPL serta penyusunan laporan ini. Oleh karena itu baik saran maupun kritik yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Demikian laporan ini disusun, semoga apa yang telah saya lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mlati, 10 September 2016

Lisa Ristyaningsih

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Kata Pengantariii

Daftar Isi v

Abstrak vi

BAB I PENDAHULUAN

 A. Analisis Situasi 1

 B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan 7

BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL.....

 A. Persiapan 9

 B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 11

 C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 18

BAB III PENUTUP

 A. Kesimpulan 21

 B. Saran 21

Daftar Pustaka 23

Lampiran 22

**LAPORAN INDIVIDU
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2016/2017
Di SMA N 1 Mlati**

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Disusun oleh:
Lisa Ristyaningsih
13401244017

ABSTRAK

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti mahasiswa S1 bidang pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta setelah melalui pembelajaran Micro Teaching. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan terkait proses pembelajaran yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Hal tersebut merupakan garis besar dari program PPL yang merupakan implementasi salah satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran.

Pelaksanaan PPL dilakukan pada tanggal 15 Juli 2016 sampai 15 September 2016 bertempat di SMA N 1 Mlati yang beralamat di Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Dalam kegiatan PPL ini setiap mahasiswa melaksanakan program-program kegiatan pembelajaran dengan ketrampilan yang dimiliki dan diperoleh selama berada di perguruan tinggi, serta didukung oleh kondisi lingkungan sekolah baik dari segi tenaga pengajar, kondisi siswa maupun sarana prasarannya.

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di sekolah, mahasiswa melakukan persiapan dengan mengikuti mata kuliah wajib lulus yaitu pengajaran mikro, pembekalan PPL dan observasi untuk memperoleh data dari sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka mahasiswa dapat merencanakan beberapa program yang dilaksanakan selama PPL. Beberapa program PPL yang direncanakan dan telah dilaksanakan yaitu konsultasi dengan guru pembimbing, konsultasi dengan dosen pembimbing PPL, membuat perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP), mencari bahan untuk mengajar, kegiatan pembelajaran, membuat lembar kerja siswa, membuat soal ulangan harian, mengoreksi lembar kerja siswa, mengoreksi ulangan harian, memasukkan nilai lembar kerja siswa, memasukkan nilai ujian/ulangan harian, pembuatan media pembelajaran, pembuatan administrasi guru dan pembuatan laporan PPL. Pada kegiatan PPL ini mahasiswa mengampu kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas X MIA 2, XI IPS 2, dan XI IPA 2.

Hasil yang diperoleh selama PPL adalah bahwa mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan terpadu antara teori dengan praktik yang sangat bermanfaat. Selain pengalaman mengajar, mahasiswa juga memperoleh pengalaman yang berkaitan dengan berbagai tugas guru di sekolah.

Kata kunci: *PPL, SMA N 1 mLATI, Pendidikan Kewarganegaraan, Pengajaran*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Matriks Kegiatan
2. Lampiran 2 : Laporan Mingguan
3. Lampiran 3 : Laporan Harian
4. Lampiran 4 : Laporan Dana
5. Lampiran 5 : Kartu Bimbingan PPL
6. Lampiran 6 : RPP Kelas X
7. Lampiran 7 : RPP Kelas XI
8. Lampiran 8 : Daftar Hadir Siswa Kelas X MIA 2
9. Lampiran 9 : Daftar Hadir Siswa Kelas XI IPS 1
10. Lampiran 10 : Daftar Hadir Siswa Kelas XI IPA 2
11. Lampiran 11 : Kisi-kisi Soal Ulangan Harian 1 Kelas X MIA 2
12. Lampiran 12 : Lembar Soal Ulangan Harian 1 Kelas X MIA 2
13. Lampiran 13 : Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian 1 Kelas XI IPS 1
14. Lampiran 14 : Lembar Soal Ulangan Harian 1 Kelas XI IPS 1
15. Lampiran 15 : Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian 1 Kelas XI IPA 2
16. Lampiran 16 : Lembar Soal Ulangan Harian 1 Kelas XI IPA 2
17. Lampiran 17 : Kisi-Kisi Soal Remedial 1 Kelas X
18. Lampiran 18 : Lembar Soal Remidi Kelas X
19. Lampiran 19 : Kisi-Kisi Soal Remedial 1 Kelas XI
20. Lampiran 20 : Lembar Soal Remedial Kelas XI
21. Lampiran 21 : Lembar Kerja Siswa Kelas X
22. Lampiran 22 : Lembar Kerja Siswa Kelas XI
23. Lampiran 23 : Daftar dan Analisis UH Nilai Kelas MIA 2
24. Lampiran 24 : Daftar dan Analisis UH Nilai Kelas XI IPS 1
25. Lampiran 25 : Daftar dan Analisis UH Nilai Kelas XI IPA 2
26. Lampiran 26 : Rekap Nilai Kelas X MIA 2
27. Lampiran 27 : Rekap Nilai Kelas XI IPS 1
28. Lampiran 28 : Rekap Nilai Kelas XI IPA 2
29. Lampiran 29 : Pembagian Minggu Efektif
30. Lampiran 30 : Silabus Kelas X
31. Lampiran 31 : Silabus Kelas XI
32. Lampiran 32 : Program Tahunan Kelas X
33. Lampiran 33 : Program Tahunan Kelas XI
34. Lampiran 34 : Program Semester Kelas X
35. Lampiran 35 : Program Semester Kelas XI
36. Lampiran 36 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Dalam rangka mengetahui dan mengenal sekolah lebih dekat, sebelum melaksanakan PPL, mahasiswa melakukan observasi di SMA Negeri 1 Mlati. Hal yang menjadi objek observasi antara lain kondisi fisik dan non fisik. Selain itu, observasi juga mencakup kegiatan belajar mengajar bersama guru pembimbing mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa PPL dapat mempersiapkan diri dan menganalisis segala bentuk kemungkinan yang terjadi selama proses pembelajaran PPL di SMA Negeri 1 Mlati.

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) secara sederhana dapat dimengerti untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa agar dapat mempraktikkan beragam teori yang mereka terima di bangku kuliah. Pada saat kuliah mahasiswa menerima atau menyerap ilmu yang bersifat teoritis, oleh karena itu, pada saat PPL ini mahasiswa berkesempatan untuk mempraktikkan ilmunya, agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, tetapi lebih lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya (real teaching).

Secara garis besar, manfaat yang diharapkan dari Praktik Pengalaman Lapangan, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mengetahui dan mengetahui secara langsung proses pembelajaran dan kegiatan kependidikan lainnya di tempat praktik.
 - b. Memperdalam pengertian, pemahaman, dan penghayatan dalam pelaksanaan pendidikan.
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan bekal yang telah diperolehnya selama perkuliahan ke dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan kependidikan lainnya.
 - d. Mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah.
2. Sekolah
 - a. Mendapat inovasi dalam kegiatan pendidikan.
 - b. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam mengelola pendidikan.
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta
 - a. Memperoleh masukan perkembangan pelaksanaan praktik pendidikan sehingga kurikulum, metode, dan pengelolaan pembelajaran dapat disesuaikan.

- b. Memperoleh masukan tentang kasus kependidikan yang berharga sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengembangan penelitian.
- c. Memperluas jalinan kerjasama dengan instansi lain.

SMA Negeri 1 Mlati terletak di dusun Cebongan, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasannya cukup kondusif untuk kegiatan belajar mengajar karena terletak di pemukiman warga dan tidak terlalu ramai. Selain itu, terdapat halaman, lapangan upacara dan juga taman sekolah yang membuat pandangan mata menjadi lebih luas dan nyaman untuk proses belajar. SMA Negeri 1 Mlati berada tidak jauh dari pemukiman penduduk. Komunikasi yang terjalin dengan penduduk pun terbilang cukup harmonis.

SMA Negeri 1 Mlati terletak di jantung kota kecamatan Mlati yang merupakan sekolah yang menjadi sasaran bagi pelaksanaan PPL UNY 2016. SMA Negeri 1 Mlati beralamat di Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, dan merupakan sekolah dengan akreditasi A.

Lokasi SMA N 1 Mlati cukup strategis, karena berada di jalur yang dilalui oleh angkutan umum serta berada dekat dengan fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional, puskesmas, kantor polisi, ATM, dan pusat perbelanjaan. Meskipun sekolah ini berada dekat dengan jalan raya, tetapi karena tata letak ruang kelas yang cukup jauh dari pintu gerbang sekolah maka kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dengan adanya suara bising kendaraan yang berlalu-lalang di jalan raya. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat terdukung yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan SMA Negeri 1 Mlati. Adapun gambaran kondisi SMA Negeri 1 Mlati adalah sebagai berikut:

Visi Sekolah

Melangkah Maju Meningkatkan Mutu Berlandaskan Akhlak Mulia.

Dengan peningkatan mutu dalam:

1. Rata-rata nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
2. Kedisiplinan.
3. Kreativitas.
4. Karya ilmiah remaja dan penelitian.
5. Persaingan masuk perguruan tinggi yang berkualitas.
6. Olahraga prestasi.
7. Kepedulian sosial.

Semua peningkatan mutu tersebut selalu dilandasi oleh sikap dan akhlak yang mulia.

Misi Sekolah

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2. Menumbuhkembangkan seluruh warga sekolah untuk selalu meningkatkan mutu secara intensif.
3. Mendorong dan membantu setiap peserta didik mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
4. Menumbuhkan rasa memiliki, mendukung, bangga, dan tanggung jawab terhadap sekolah.
5. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
6. Mengoptimalkan kerja sama dengan orang tua, masyarakat, dan dunia usaha.
7. Melaksanakan bimbingan bahasa Inggris secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis secara sederhana.

Tujuan Sekolah

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan menengah, tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan untuk semua peserta didik SMA Negeri 1 Mlati.
2. Meningkatkan dan memenuhi tuntutan program pembelajaran yang berkualitas dan kualifikasi tenaga kependidikan.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan program pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) dan hasil belajar peserta didik.
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi terkait masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengembangan program pendidikan yang berakar pada budaya bangsa dan mengikuti perkembangan teknologi.
5. Peningkatan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang mengarah pada program pembelajaran berbasis kompetensi.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler unggulan sesuai bakat dan minat peserta didik.
7. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa.

SMA Negeri 1 Mlati sudah dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana penunjang KBM. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Mlati diantaranya adalah gedung sekolah yang terdiri dari ruang belajar, ruang kantor, ruang penunjang, dan halaman sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan apel pagi, olahraga (bola basket, bola voli, sepak bola), kegiatan ekstrakurikuler. Adapun situasi sekolah ini selengkapnya adalah:

1. Kondisi Fisik Sekolah
 - a. Ruang Kantor

SMA Negeri 1 Mlati memiliki 3 ruang kantor yaitu ruang kepala sekolah, ruang guru, serta ruang Tata Usaha (TU). Ketiga ruangan ini terletak di sebelah timur menghadap ke barat membujur dari utara ke selatan. Ruang guru berada di paling selatan, terdiri dari meja dan kursi guru, almari guru, perangkat mengajar seperti remote, proyektor, dan komputer. Di ruang guru ini juga terdapat Finger Print yang berfungsi sebagai alat presensi bagi para guru dan karyawan.

Di sebelah utara ruang guru adalah ruang kepala sekolah yang terbagi menjadi 2 ruangan utama yaitu ruang kerja kepala sekolah dan ruang tamu. Ruang kepala sekolah tertata dengan rapi dan dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang. Sedangkan ruang tamu terdiri dari meja dan kursi untuk menerima tamu.

Ruang paling utara adalah ruang Tata Usaha, yang memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup memadai seperti meja, kursi, komputer, printer, almari arsip serta peralatan dan perlengkapan administrasi lainnya.

b. Ruang Kelas

- 1) Kelas X sebanyak 4 kelas, yang terdiri atas 2 kelas MIPA dan 2 kelas IIS
- 2) Kelas XI sebanyak 4 kelas, yang terdiri atas 2 kelas jurusan IPA dan 2 kelas jurusan IPS
- 3) Kelas XII sebanyak 4 kelas yang terdiri atas 2 kelas jurusan IPA dan 2 kelas jurusan IPS

Setiap ruang kelas memiliki kelengkapan belajar mengajar yang cukup memadai antara lain: meja, kursi, white board, penghapus, spidol, LCD Proyektor, almari, kipas angin, dan CCTV di setiap kelasnya. Selain itu juga telah dipasang wifi di setiap jenjang kelas.

c. Laboratorium

SMA Negeri 1 Mlati memiliki empat laboratorium yaitu laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan laboratorium komputer. Laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan laboratorium fisika terbagi menjadi tiga ruangan yaitu ruangan untuk praktikum yang terdiri dari meja dan kursi serta keran air dan bak yang menempel pada dinding. Ruangan ini dilengkapi dengan white board, spidol, penghapus, LCD Proyektor. Ruangan selanjutnya adalah ruang pengampu praktikum yang terdiri dari meja, kursi, dan rak untuk meletakkan buku dan jas praktikum. Ruangan terakhir adalah gudang, yang digunakan untuk menyimpan alat dan bahan praktikum.

Laboratorium selanjutnya adalah laboratorium Komputer yang terletak dekat dengan tempat parkir siswa. Laboratorium ini dilengkapi dengan beberapa unit komputer yang digunakan untuk pembelajaran. Laboratorium komputer juga difasilitasi dengan koneksi internet/wifi.

d. Perpustakaan

Perpustakaan SMA Negeri 1 Mlati terletak di sebelah selatan laboratorium kimia. Perpustakaan sudah menggunakan sistem digital. Dalam perpustakaan ini terdapat 1 pustakawan yang mengelola. Rak-rak sudah tertata rapi sesuai dengan klasifikasi buku dan klasifikasi buku di rak berdasarkan judul mata pelajaran. Didalam perpustakaan juga disediakan komputer dan juga mesin print.

e. Ruang Bimbingan dan Konseling

Ruangan BK terletak di halaman depan SMA Negeri 1 Mlati dan dekat dengan gerbang sekolah. Ukuran sekitar 4x3 meter yang terdiri dari 2 ruangan. Ruangan pertama terdiri dari 2 pasang meja kursi untuk guru BK, dan ruangan kedua terdapat sofa, meja, dan lemari.

Dalam ruang Bimbingan dan Konseling sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai yaitu 2 printer dan sinyal wifi sehingga memudahkan guru Bimbingan dan Konseling dalam menjalankan tugas. Selain itu, di ruang BK juga terdapat kotak masalah dan papan bimbingan yang merupakan media bimbingan bagi para siswa.

f. Sarana Olahraga

Sarana olahraga yang ada di SMA Negeri 1 Mlati antara lain :

- 1) Lapangan Futsal
- 2) Lapangan Basket
- 3) Gudang untuk menyimpan peralatan olahraga

g. Sarana Penunjang

- 1) Masjid
- 2) Ruang OSIS
- 3) Ruang Piket
- 4) Ruang UKS
- 5) Koperasi Sekolah
- 6) Kamar mandi siswa dan guru
- 7) Tempat parkir siswa
- 8) Tempat parkir Guru dan Karyawan
- 9) Kantin
- 10) Pos satpam

2. Kondisi Nonfisik Sekolah

Kondisi nonfisik meliputi kurikulum sekolah, potensi guru, potensi siswa, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar sekolah.

a. Kurikulum Sekolah

Kurikulum yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Mlati saat ini adalah Kurikulum 2013.

b. Potensi Guru

Guru berjumlah 33 orang sebagian besar berkualifikasi S1 dan beberapa guru berkualifikasi S2. Sebagian berstatus PNS dan beberapa nonPNS. Guru telah mengajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Guru-guru SMA Negeri 1 Mlati tergolong guru-guru yang memiliki disiplin dan kepedulian yang tinggi hal ini terlihat dari ketepatan mereka masuk kelas setelah tanda bel masuk juga pulang setelah ada bel pulang dan masih banyak lagi indikator yang menunjukkan kedisiplinan dan kepedulian yang tinggi.

c. Potensi Karyawan

Jumlah karyawan ada 11 orang yang terdiri dari Tata Usaha sebanyak 7 orang, bagian perpustakaan 1 orang, pembantu umum 1 orang dan penjaga sekolah atau keamanan 1 orang, bagian laboratorium 1 orang.

d. Potensi Siswa

Potensi peserta didik di SMA N 1 Mlati termasuk aktif, baik ketika didalam kelas maupun di luar kelas, di SMA ini juga mengirimkan peserta didiknya untuk mengikuti olimpiade dan dalam kegiatan ekstra minat peserta didiknya juga sangat baik. Kuantitas 12 kelas dengan masing-masing angkatan berjumlah 4 kelas, kelas X berjumlah 128 peserta didik, kelas XI berjumlah 128 peserta didik, dan kelas XII berjumlah 121 peserta didik. Jumlah siswa SMA N 1 Mlati dari 12 kelas berjumlah 373 siswa.

Potensi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik sudah menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik.

1) Potensi Akademik Siswa

Keterlibatan siswa dalam berkarya ilmiah sudah optimal. Hal ini dibuktikan dari prestasi siswa dibidang seni seperti musik, baca puisi, tontol, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang prestasinya ditingkat Kabupaten, Provinsi, Bahkan Nasional.

2) Potensi Nonakademik Siswa

Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa meliputi: basket, pramuka, rohis, rokakris, kelompok keolahragaan, kelompok penelitian ilmiah, kelompok ilmu pengetahuan, PMR dll. Siswa unggul dalam bidang keolahragaan, terutama basket dan futsal.

e. Hubungan Sekolah dengan Lingkungan Sekitar Sekolah

Dukungan masyarakat sekitar sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah untuk menetapkan berbagai kebijaksanaan guna optimalisasi kinerja sekolah dengan pemberdayaan lingkungan sekolah. Lingkungan SMA Negeri 1 Mlati merupakan lingkungan sekolah. Ada

beberapa jenjang pendidikan seperti TK, SD dan SMP. Selain itu, sekolah ini juga berdekatan dengan fasilitas umum seperti pasar, puskesmas, kantor polisi. Walaupun letak sekolah dekat dengan jalan raya, namun sekolah ini mempunyai tata letak yang sangat strategis sehingga suara bising tidak mengganggu jalannya pembelajaran.

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016, yaitu :

1. Observasi Fisik Sekolah

Tahap ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran tentang sekolah terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sekolah sebagai tempat mahasiswa melaksanakan praktik, agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri serta menyesuaikan program PPL.

2. Observasi Proses Belajar Mengajar di Dalam Kelas

Tahap ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman terlebih dahulu mengenai tugas menjadi seorang guru, khususnya tugas dalam mengajar. Obyek pengamatannya adalah kompetensi profesional yang dicalonkan guru pembimbing. Selain itu juga pengamatan terhadap keadaan kelas yang sebenarnya dan pada proses belajar yang terjadi di kelas.

Observasi kegiatan proses belajar mengajar bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai proses belajar mengajar yang berlangsung, proses pendidikan yang lain di lembaga tersebut, tugas guru, dan kepala sekolah, tugas instruktur dan lembaga, pemanfaatan media dalam proses belajar mengajar, hambatan atau kendala serta pemecahannya.

3. Praktik Mengajar

Tahap inti dari praktik pengalaman lapangan adalah latihan mengajar di kelas. Pada tahap ini mahasiswa praktikan diberi kesempatan untuk menggunakan seluruh kemampuan dan keterampilan mengajar yang diperoleh dari pengajaran mikro.

4. Praktik Persekolahan

Kegiatan praktik persekolahan di SMA Negeri 1 Mlati adalah:

- a. Upacara bendera satu minggu sekali dan dilaksanakan untuk memperingati hari-hari nasional.
- b. KBM (dilaksanakan pukul 07.15-13.50 WIB)
- c. Setiap hari Jumat dilaksanakan ibadah 15 menit sebelum KBM dimulai

5. Penyusunan Laporan

Kegiatan penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan PPL, yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa atas pelaksanaan PPL. Laporan ini bersifat individu.

6. Penarikan PPL

Kegiatan penarikan PPL dilakukan pada tanggal 14 September 2016 yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMA N 1 Mlati. Kegiatan KBM sudah terpenuhi sesuai target dan selesai pada tanggal 8 September 2015.

Demikian tahap-tahap dalam program dan rancangan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan di SMA N 1 Mlati.

BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN
ANALISIS HASIL

A. Persiapan

1. Pengajaran Mikro (*Micro teaching*)

Kuliah pengajaran mikro (*micro teaching*) adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa bidang pendidikan sebelum melaksanakan PPL . *Micro teaching* bertujuan untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar mampu mengajar dan menjadi pendidik yang baik saat mahasiswa berada di lapangan. Mengingat kurikulum yang digunakan di sekolah pada tahun 2016 ini merupakan Kurikulum 2013 revisi, mahasiswa dituntut untuk lebih siap dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum baru.

Selama kurang lebih 2 bulan mahasiswa PPL dilatih keterampilan mengajarnya dalam kuliah *micro teaching*. Kuliah *micro teaching* dilaksanakan mulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2016. Dengan sistem kelas kecil yang dikelompokkan berdasarkan wilayah lokasi sekolah yang akan digunakan untuk PPL. Praktik pengajaran mikro meliputi:

- a. Latihan penyusunan RPP, melatih mahasiswa dalam penyusunan RPP pada kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 ketika misalnya menyusun Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dan sebagainya.
- b. Praktik pengajaran mikro berusaha mengkondisikan mahasiswa memiliki profil dan penampilan yang baik serta mampu menguasai materi.
- c. Pengajaran mikro dibatasi dilakukan dua kali dalam seminggu, dengan ketentuan tiap mahasiswa setiap minggunya menampilkan praktik mengajar di depan dosen *micro teaching* dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda.

Dengan dibimbing oleh Ibu Setiati Widiastuti, M. Hum., mahasiswa PPL telah melakukan praktik mikro sebanyak 5 kali dengan kompetensi ajar kelas X dan XI dengan RPP yang berbeda. Mahasiswa juga berlatih untuk berkreaitivitas membuat perangkat pembelajaran seperti membuat media pembelajaran dan penggunaan metode pembelajaran. Berikut penjabaran pelaksanaan *micro teaching*.

1) RPP Pertama (KTSP)

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 24 Maret 2016
2.	Waktu	1 x 20 menit
3.	Kelas/Semester	X
4.	Materi Belajar	Hakikat Bangsa dan NKRI
5.	Alat/Bahan/Metode	spidol, <i>white board</i> /Diskusi
6.	Pelaksanaan Pembelajaran <i>Micro Teaching</i>	Berdiskusi dengan teman sebangku untuk mencari tahu materi secara mendalam

		untuk menambah materi yang sudah ditayangkan pada slide power point. Proses diskusi dengan mencari materi lewat buku yang relevan dan melalui internet.
7.	Kompetensi Dasar	1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

2) RPP Kedua (KTSP)

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 8 April 2016
2.	Waktu	1 x 20 menit
3.	Kelas/Semester	X
4.	Materi Belajar	Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah.
5.	Alat/Bahan/Metode	spidol, <i>white board</i> /Diskusi/Poster
6.	Pelaksanaan Pembelajaran <i>Micro Teaching</i>	Berdiskusi dengan teman sebangku untuk memahami isi media yaitu poster dalam pelaksanaan pembelajaran.
7.	Kompetensi Dasar	3.4 Menganalisis hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3) RPP Ketiga (K13)

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 24 Maret 2016
2.	Waktu	1 x 20 menit
3.	Kelas/Semester	XI/Gasal
4.	Materi Belajar	Penerapan demokrasi pancasila di Indonesia
5.	Alat/Bahan/Metode	spidol, <i>white board</i> /Diskusi/Video
6.	Pelaksanaan Pembelajaran <i>Micro Teaching</i>	Neayangkan video dan menanyakan yang belum dipahami.
7.	Kompetensi Dasar	3.2 Mengevaluasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4) RPP Keempat (K13)

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 10 Mei 2016
2.	Waktu	1 x 20 menit
3.	Kelas/Semester	XI/Gasal
4.	Materi Belajar	Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI dan macam-macam pembagian kekuasaan
5.	Alat/Bahan/Metode	spidol, <i>white board</i> /Diskusi/Video
6.	Pelaksanaan Pembelajaran <i>Micro Teaching</i>	Memperhatikan tayangan video dan menanyakan hal yang tidak di pahami.

5) RPP Kelima (K13)

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 14 Mei 2016
2.	Waktu	1 x 20 menit

3.	Kelas/Semester	XI/Gasal
4.	Materi Belajar	Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5.	Alat/Bahan/Metode	spidol, <i>white board</i> /Diskusi/Gambar
6.	Pelaksanaan Pembelajaran <i>Micro Teaching</i>	Memperhatikan gambar dan dan berdiskusi untuk mencari tugas dan fungsi kementerian negara.

2. Pembekalan PPL

Pembekalan PPL merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh LPPMP UNY untuk memberikan pengarahan kepada calon mahasiswa PPL dalam melaksanakan PPL. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 di Ruang Seminar gedung FT UNY. Materi pembekalan diberikan oleh koordinator PPL dari LPPMP. Materi yang disampaikan meliputi administrasi pembelajaran, administrasi pelaporan PPL, dan berbagai hal yang mendukung pelaksanaan PPL.

3. Observasi Sekolah

Observasi sekolah merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa PPL sebagai persiapan untuk praktik mengajar secara langsung. Observasi yang dilakukan oleh mahasiswa PPL bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi pembelajaran yang terjadi di sekolah. Observasi tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu observasi kondisi sekolah, observasi pembelajaran di kelas dan peserta didik, dan observasi kondisi lembaga. Kegiatan observasi diawali dengan penyerahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing PPL yaitu Ibu Dra. Mawanti Widyastuti, M.Pd. kepada pihak sekolah. Pihak sekolah memberitahukan kepada mahasiswa mengenai guru pembimbing selama kegiatan PPL berlangsung. Setelah mengetahui pembimbing masing-masing, mahasiswa melakukan konsultasi pada guru pembimbing untuk melakukan observasi kelas. Observasi kelas dilakukan pada 26 Februari 2016 sesuai dengan kesepakatan dengan Guru pembimbing.

Adapun yang menjadi objek dari observasi kelas antara lain.

- a. Perangkat pembelajaran
 - 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
 - 2) Silabus
 - 3) Buku referensi untuk kegiatan belajar mengajar
 - 4) Perhitungan jam efektif
 - 5) Penentuan ketuntasan
 - 6) Program semester dan program tahunan
- b. Proses Pembelajaran
 - 1) Membuka pelajaran
 - 2) Penyajian materi
 - 3) Metode pembelajaran
 - 4) Penggunaan bahasa

- 5) Penggunaan waktu
- 6) Cara memotivasi siswa
- 7) Teknik bertanya
- 8) Teknik penguasaan kelas
- 9) Penggunaan media
- 10) Bentuk dan cara evaluasi
- 11) Menutup pelajaran

Melalui kegiatan observasi di kelas, mahasiswa praktikan mendapatkan hasil sebagai berikut.

- 1) Mengetahui situasi pembelajaran yang sedang berlangsung.
- 2) Mengetahui kesiapan dan kemampuan siswa dalam menerima pembelajaran.
- 3) Mengetahui metode, media, dan prinsip mengajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran.

4. Penerjunan Mahasiswa ke Sekolah

Penerjunan mahasiswa ke sekolah dilakukan pada hari 20 Juni 2016. Pada kegiatan ini, mahasiswa PPL diserahkan kepada pihak sekolah untuk selanjutnya dibimbing pihak sekolah menjadi guru yang profesional. Penyerahan dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan PPL UNY, Dra. Mawanti Widastuti, M.Pd. dan diterima oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati, Drs. Aris Sutardi yang didampingi Koordinator PPL SMA N 1 Mlati, Suparwanto, S.Pd. serta masing-masing guru pembimbing mata pelajaran.

B. Pelaksanaan PPL (Praktik Terbimbing)

Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dimulai dari tanggal 15 Juli 2016 hingga 15 September 2016. Dalam kesempatan ini, mahasiswa telah melaksanakan program-program PPL di lokasi SMA N 1 Mlati, diantaranya sebagai berikut.

1. Observasi pembelajaran di kelas

Observasi pembelajaran di kelas dilakukan pada tanggal 26 Februari 2016, bersama guru pembimbing. Adapun kelas yang menjadi objek observasi adalah kelas XI IPS 1. Pada saat observasi, guru pembimbing memberikan kisi-kisi Ujian Sekolah bertujuan supaya peserta didik memiliki gambaran dan memiliki motivasi belajar yang tinggi ketika akan melaksanakan Ujian. Pada kegiatan ini, mahasiswa dapat mengamati dan belajar terkait kondisi kelas, siswa, dan bagaimana cara penanganan kelas dengan baik dari guru pembimbing lapangan.

2. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Praktik mengajar merupakan kegiatan pokok pelaksanaan PPL. Mahasiswa PPL diberikan kesempatan oleh guru pembimbing untuk melakukan praktik mengajar di kelas X MIA 2, XI IPS 1, dan XI IPA 2. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajar mulai dari tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 8 September 2016.

Mahasiswa PPL melaksanakan praktik mengajar dengan menggunakan RPP yang telah dibuat sendiri. Tugas-tugas tersebut terangkum dalam program PPL. Program-program PPL meliputi beberapa hal sebagai berikut.

a. Penyusunan RPP

Penyusunan RPP mendapat bimbingan langsung dari guru pembimbing. Sistematika penyusunan RPP sebagai berikut.

- 1) Identitas mata pelajaran dan kelas
- 2) Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi
- 3) Alokasi waktu
- 4) Pertemuan ke-
- 5) Tujuan pembelajaran
- 6) Tatap muka: materi pokok, sumber belajar, metode pembelajaran
- 7) Kegiatan Pembelajaran
- 8) Tugas mandiri
- 9) Penilaian

b. Praktik Mengajar

1) Persiapan

Praktik mengajar mahasiswa PPL pertama kali dilaksanakan pada tanggal 22 juli 2016 di Kelas XI IPS 1. Persiapan pertama yang dilakukan oleh mahasiswa PPL sebelum mengajar yaitu mengkonsultasikan penyusunan RPP dan materi/bahan ajar yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran kepada guru pembimbing. Mahasiswa PPL juga berkonsultasi tentang cara mengajar dan mengendalikan peserta didik apabila terjadi kegaduhan.

Kompetensi dasar yang harus dicapai dan materi yang diajarkan pada RPP pertama dengan alokasi waktu pembelajaran untuk setiap RPP adalah satu kali pertemuan, yaitu 2 x 45 menit. Persiapan berikutnya adalah membuat RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran). Persiapan setelah membuat RPP adalah mengonsultasikan RPP yang telah dibuat kepada guru pembimbing.

Setelah RPP mendapatkan persetujuan dari guru pembimbing dan mendapatkan saran serta masukan, kemudian mahasiswa PPL mempersiapkan diri dalam mendalami materi yang akan diajarkan. Hal ini bertujuan agar pada saat tampil mengajar pertama di depan kelas benar-benar memahami materi yang akan disampaikan, sehingga memberikan kesan yang baik dan menarik bagi siswa.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan praktik mengajar terbimbing dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mlati pada tanggal 22 Juli sampai dengan 8 September 2016 dengan keterangan sebagai berikut.

a. Praktik mengajar.

Adapun materi yang dipraktikan adalah sebagai berikut.

6) RPP Pertama.

1.	Hari/Tanggal	Jumat, 22 Juli 2016 Senin, 24 Juli 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	XI IPS 1 dan XI IPA 2
4.	Materi Belajar	Budaya Politik
5.	Alat/Bahan/Metode	Power Point/Spidol, <i>white board</i> /Ceramah
6.	Pelaksanaan Pembelajaran	Pelaksanaan metode ceramah ini dilakukan dengan memberikan penjelasan materi yang disampaikan pada slide power point, setelah menjelaskan diberikan penugasan kepada peserta didik mengerjakan soal pemahaman yang diberikan oleh praktikan.
7	Hasil	Siswa mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh praktikan, dan siswa paham tentang materi yang sudah diberikan.

7) RPP Kedua.

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 27 Juli 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit
3.	Kelas/Semester	X MIA 2
4.	Materi Belajar	Sistem Pembagian Kekuasaan Negara
5.	Alat/Bahan/Metode	Power Point/spidol, <i>white board</i> /Diskusi.
6.	Pelaksanaan Pembelajaran	Berdiskusi dengan teman sebangku untuk mencari tahu materi secara mendalam untuk menambah materi yang sudah ditanyakan pada slide power point. Proses diskusi dengan mencari materi lewat buku yang releant dan melalui internet.
7.	Hasil	Hasil diskusi dikumpulkan dalam bentuk selebaran kertas, dari pengerjaan tersebut peserta didik sudah mampu memahami materi hyang sudah diajarkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada kali ini peserta didik antusias untuk mencari informasi melalui internet dan mendapatkan banyak pengetahuan baru yang kemudian menjadi bahan untuk bertanya di kelas.

8) RPP Ketiga.

1.	Hari/Tanggal	Jumat, 29 Juli 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	XI IPS 1 dan XI IPA 2
4.	Materi Belajar	Sosialisasi Politik

5.	Alat/Bahan/Metode	<i>Whiteboard,spidol/Power Point/Snowball Throwing.</i>
6	Pelaksanaan Pembelajaran	Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan praktikan menjelaskan sedikit materi lalu di lanjut dengan metode <i>Snowball Throwing</i> sedikit memiliki kendala, walaupun siswa juga bersemangat karena metode ini sedikit membuat anak lebih aktif. Kendala yang dialami yaitu ketika siswa membuat soal untuk dilempar dan di jawab oleh teman yang lain, pembuatan soalnya monoton, tidak kreatif. Sehingga penanaman materi sosialisasi politik ini kurang bisa dipahami secara utuh oleh siswa.
7.	Hasil	Siswa sangat berantusias, mengerjakan soal hasil tangkapannya dikerjakan dengan baik tanpa melihat buku.

9) RPP Keempat

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 3 Agustus 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	X MIA 2
4.	Materi Belajar	Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara.
5.	Alat/Bahan/Metode	<i>Whiteboard,spidol/ Video/Diskusi-Presentasi.</i>
6.	Pelaksanaan Pembelajaran	Dalam pelaksanaan metode ini praktikan memutarakan sebuah video kementerian kabinet baru, setelah praktikan memutarakan video peserta didik berdiskusi dengan anggota 6 anak, membahas tugas dan fungsi dari kementerian negara, hasil diskusi tetrsebut lalu di presentasikan di depan kelas.
7.	Hasil	Presentasi berjalan dengan baik, proses tanya jawab juga berjalan dengan lancar. Peserta didik mengetahui tugas dan fungsi kementerian negara secara umum.

10) RPP Kelima

1.	Hari/Tanggal	Jumat, 5 Agustus 2016 Senin, 8 Agustus 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	XI IPS 1 dan XI IPA 2
4.	Materi Belajar	Partisipasi Politik
5.	Alat/Bahan/Metode	<i>Whiteboard,spidol/Video/Diskusi.</i>
6.	Pelaksanaan Pembelajaran	Praktikan memutarakan sebuah video tentang partisipasi politik. Dengan memutarakan video siswa banyak bertanya tentang kaitannya dengan partisipasi. Pertanyaan tersebut dijawab oleh beberapa siswa yang lain. Setelah selesai membahas video, siswa dilanjutkan mengerjakan LKS dan dikumpulkan.
7.	Hasil	Proses diskusi berjalan dengan lancar, karena banyak pertanyaan yang

		dikemukakan oleh siswa dan di jawab oleh siswa yang lain dengan bantuan praktikan.
--	--	--

11) RPP Keenam.

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 10 Agustus 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	X MIA 2
4.	Materi Belajar	Keberadaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintah
5.	Alat/Bahan/Metode	<i>Whiteboard,spidol/TSTS(To Stay To Stray)</i>
6.	Pelaksanaan Pembelajaran	Proses pembelajaran pada materi ini dilakukan metode TSTS, yang cara pelaksanaannya dengan membagi kelompok yang beranggotakan 4 orang, kemudian kelompok pertama membahas materi sila pertama, kelompok kedua membahas tentang sila kedua, dan seterusnya. Kemudian setelah setiap kelompok selesai mengerjakan tugasnya. Anggota kelompok saling bertukar tempat dan saling menjelaskan sesuai dengan materi yang mereka dapatkan.
7.	Hasil	Pembelajaran pada kali ini berjalan dengan sangat baik, anak-anak sangat berantusias. Karena mereka bisa mengeksplorasi pengetahuan mereka dengan cara berdialog dengan kelompok tentang materi yang mereka tahu dan pahami.

12) RPP Ketujuh.

1.	Hari/Tanggal	Senin, 28 Agustus 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	XI IPA 2
4.	Materi Belajar	Pengertian Demokrasi
5.	Alat/Bahan/Metode	<i>Power Point/Whiteboard,spidol/Cooperative Skrip.</i>
6.	Pelaksanaan Pembelajaran	<i>Metode Cooperative Skrip</i> tidak jauh berbeda dengan TSTS. Teknis yang praktikan lakukan yaitu membagi siswa per baris. Dengan ketentuan siswa pada barisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat mendapatkan materi yang berbeda. Kemudian siswa mempelajari/membaca materi sesuai materi yang mereka dapat. Setelah selesai membaca. Siswa-siswa pada barisan tertentu mencari pasangan dengan jumlah 4 orang pada barisan yang berbeda. Sehingga 4 orang tersebut saling menjelaskan materi yang ia peroleh satu sama lain.
7.	Hasil	Siswa menikmati metode pembelajaran seperti ini, sehingga materi dapat mereka pahami dengan bahasa merea. Ketika mendapatkan kesulitan siswa bertanya

		kepada praktikan, dan praktikan membantu menjawab dan menjelaskan.
--	--	--

13) RPP Kedelapan.

1.	Hari/Tanggal	Rabu, 30 Agustus 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	X MIA 2
4.	Materi Belajar	Wilayah Negara
5.	Alat/Bahan/Metode	<i>Whiteboard,spidol/Power Point/LKS/Diskusi.</i>
6.	Pelaksanaan pembelajaran	Praktikan menjelaskan power point kepada peserta didik, setelah itu peserta didik diberi lembar kerja untuk bahan diskusi dengan teman sebangku menjadi contoh permasalahan wilayah negara indonesia dengan negara luar negeri yang kaitannya dengan batas-batas wilayahnya.
7.	Hasil	Peserta didik mendapatkan banyak contoh tentang perselisihan yang terjadi antara Indonesia dengan negara lain kaitannya dengan wilayah negara, dari penugasan tersebut peserta didik mampu memahami ketentuan-ketentuan apa saja yang harus diperhatikan dalam memntukan batas-batas wilayah.

14) RPP Kesembilan

1.	Hari/Tanggal	Senin, 6 September2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	XI IPA 2
4.	Materi Belajar	Mayarakat Madani
5.	Alat/Bahan/Metode	<i>Whiteboard/spidol,Gunting,double tip,kertas manila/membuat Portopolio.</i>
6.	Pelaksanaan Pembelajaran	Pada pertemuan kali ini menggunakan media portopolio, yaitu siswa dibagi per baris mendapatkan materi yang berbeda, baris pertama membuat bahan materi dengan sekreatif mungkin membuat portopolio sesuai materi yang mereka dapat, dan selanjutnya seperti ini. Hasil portopolio di tempelkan di depan kelas setiap kelompoknya. Kemudian perwalian dari anggota menjelaskan di depan kelas.
7.	Hasil	Portopolio dibuat dengan baik dan kreatif, penulisan materi pada portopolio tersebut sangat menarik, siswa sangat senang dengan pelaksanaan pembelajaran yang seperti ini.

15) RPP Kesepuluh

1.	Hari/Tanggal	Kamis, 8 September 2016
2.	Waktu	2 x 45 menit per pertemuan
3.	Kelas/Semester	X MIA 2
4.	Materi Belajar	Warga Negara dan Penduduk
5.	Alat/Bahan/Metode	<i>Whiteboard,spidol,/ Power Point/Diskusi.</i>
6.	Pelaksanaan Pembelajaran	Memutarkan tanyangan slide power point,

		kemudain peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh praktikan.
7.	Hasil	Hasil penugasan dikumpulkan kepada praktikan, dan dari hasil tersebut peserta didik sudah paham tentang materi yang diajarkan.

b. Evaluasi Pembelajaran

Setelah selesai menyajikan materi, praktikan memiliki tugas untuk memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi biasa diberikan baik di waktu jam pelajaran maupun dalam bentuk pekerjaan rumah. Evaluasi pembelajaran diperlukan juga untuk mendapatkan nilai/skor siswa untuk mengetahui efektifitas mengajar mahasiswa praktikan. Adapun hal – hal yang dilakukan dalam kegiatan evaluasi antara lain.

1) Mempersiapkan instrumen

Pembuatan instrumen disesuaikan dengan materi pelajaran yang diberikan dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Mahasiswa praktikan mempersiapkan instrumen pada saat jam pelajaran maupun instrument untuk dijadikan pekerjaan rumah.

2) Mengonsultasikan Instrumen

Konsultasi instrumen penilaian diperlukan untuk memeriksa apakah instrumen yang dibuat oleh mahasiswa layak digunakan untuk memeriksa keberhasilan belajar atau tidak. Jika terdapat instrumen yang kurang atau perlu dibenahi, maka praktikan harus membenahi/memperbaiki instrumen terlebih dahulu sebelum digunakan di dalam kelas.

3) Mempersiapkan kriteria penilaian

Kriteria penilaian harus dibuat secara proporsional agar nilai akhirnya dapat benar-benar mencerminkan keberhasilan belajar siswa. Kriteria penilaian juga membantu mahasiswa dalam mengoreksi pekerjaan siswa sebagai dasar atau batasan peniaian.

4) Melaksanakan penilaian

Penilaian dilakukan setelah mahasiswa praktikan menyampaikan/menjelaskan seluruh materi dan memastikan seluruh peserta didik paham dengan materi yang disampaikan. Penilaian diadakan untuk setiap pertemuan diadakan penugasan, serta penilaian hasil Ulangan Harian.

c. Umpan balik dari pembimbing

Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan, guru pembimbing dan dosen pembimbing PPL sangat berperan dalam kelancaran proses pembeljaran. Selama kegiatan praktik mengajar, mahasiswa mendapat bimbingan dari guru pembimbing dan dosen pembimbing PPL. Guru pembimbing di sekolah memberikan saran dan

kritik kepada mahasiswa setelah selesai melakukan praktik mengajar sebagai evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Dosen pembimbing PPL, Ibu Setiati Widiastuti, M.Hum. juga memberikan masukan tentang cara memecahkan persoalan yang dialami mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran, misalnya cara untuk mengkondisikan kelas agar tidak gaduh, dan cara menangani siswa yang tidak memperhatikan ketika proses pembelajaran.

Beberapa poin evaluasi yang sangat penting untuk dicermati antara lain.

- 1) Teknis menjawab pertanyaan dari peserta didik harus dilemparkan dahulu kepada peserta didik yang lain.
- 2) Pengucapan bahasa ketika mengajar/Penampilan.

Dari umpan balik yang diberikan oleh guru pembimbing, maka praktikan dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, dipertahankan serta hal-hal yang perlu ditinggalkan. Jika praktikan mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, maka praktikan mengkonsultasikannya dengan guru pembimbing untuk meminta arahan dan bimbingannya agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

C. Analisis Hasil dan Refleksi

1. Analisis Hasil

Dalam praktik mengajar, ada beberapa hambatan yang dialami oleh mahasiswa antara lain adalah mahasiswa belum bisa mengendalikan kelas dengan baik, penggunaan waktu yang kurang sesuai dengan RPP, dan kelengkapan materi kurang baru.

Ada beberapa penilaian yang praktikan lakukan terhadap siswa antara lain.

a. Penilaian Kognitif

Penilaian kognitif ini merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian indikator. Evaluasi kognitif biasanya berupa soal tes yang diberikan di akhir proses pembelajaran serta perolehan nilai dari hasil Ulangan Harian.

b. Penilaian Afektif

Penilaian afektif adalah penilaian terhadap sikap siswa selama proses pembelajaran seperti kemauan siswa dalam belajar dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran, misalnya saat berlangsungnya presentasi di depan kelas saat memaparkan materi serta yang aktif bertanya dan menjawab bahkan menyanggah.

c. Penilaian Psikomotor/Keterampilan

Penilaian psikomotor ini dapat dilihat dari keterampilan, kedisiplinan, dan ketelitian siswa.

d. Penilaian sikap Sosial dan Spiritual

Penilaian Sikap ini dilakukan terhadap peserta didik selama proses berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung.

Sedangkan penilaian spiritual dapat dilihat dengan pengamatan seberapa jauh peserta didik menghargai dan mensyukuri setiap materi yang di pelajarnya.

Dalam melaksanakan PPL ini, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaan PPL. Faktor-faktor tersebut antara lain.

1) Faktor Pendukung

- a) Hubungan yang baik dengan guru pembimbing, dosen pembimbing, dan seluruh warga lingkungan sekolah sangat membantu praktikan dalam melaksanakan praktik mengajar.
- b) Besarnya perhatian pihak SMA N 1 Mlati kepada praktikan juga sangat membantu kelancaran kegiatan praktik mengajar.

2) Faktor Penghambat

Selain mendapatkan banyak pengalaman, praktikan juga menemui beberapa hambatan selama proses PPL. Hambatan itu antara lain.

- a) Karakteristik dan Kemampuan Siswa yang Beragam

Tiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga praktikan kesulitan memilih metode pembelajaran yang dapat mengakomodir kemampuan masing-masing siswa dan menguasai kelas.

- b) Sulitnya Membangun Suasana Kondusif

Suasana pembelajaran yang kondusif merupakan keinginan semua pengajar selama melakukan proses belajar mengajar. Akan tetapi, seringkali suasana kelas kurang kondusif terjadi bahkan siswa mudah merasa bosan dalam belajar.

- c) Praktikan Kurang Bisa Memberikan Perhatian yang Menyeluruh Kepada Siswa.
- d) Sebagai mahasiswa yang masih belajar, dalam menyampaikan konsep materi belum bisa runtut, dan kurang mampu dalam pengalokasian waktu dalam pembelajaran.
- e) Masih ada siswa yang kurang aktif, tidak memperhatikan praktikan sehingga menghambat proses belajar mengajar.
- f) Ada siswa yang sering membuat kegiatan sendiri dan mengganggu siswa yang lain.

Secara keseluruhan, program dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pada tahap persiapan (pembekalan) sudah cukup memberikan bekal bagi praktikan untuk terjun ke lapangan karena sudah relevan dengan hal yang sebenarnya yang ada di lapangan.

3) Usaha untuk mengatasi hambatan

- a) Mengetahui karakteristik siswa yang beragam: praktikan menyiasati dengan melakukan variasi metode dan media dalam mengajar.

- b) Untuk membangun suasana yang kondusif di kelas, praktikan melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode yang membuat siswa fokus, misalnya dengan memutar video, lalu menganalisis.
- c) Praktikan berusaha memahami siswa dengan adanya dialog atau percakapan dengan siswa agar mempererat hubungan sehingga mudah memahami sifat siswa.
- d) Berkonsultasi dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing untuk lebih mengetahui cara mengajar yang efektif dan runtut di dalam kelas dengan alokasi yang ada dan jumlah siswa yang banyak dengan berbagai sifat yang berbeda.
- e) Memberikan pertanyaan kepada siswa yang kurang memperhatikan atau asik bermain sendiri.
- f) Mengulang kembali dalam menjelaskan suatu materi dengan pelan dan sabar.

2. Refleksi

Setelah kegiatan PPL ini selesai, praktikan mendapatkan banyak pengalaman dan pemahaman bahwa menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru bukan hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga mendidik siswa, bagaimana caranya ilmu itu bernilai dan diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus bisa menjadi teladan bagi siswa karena karakteristik anak usia SMP adalah senang meniru, melakukan apa yang telah mereka lihat. Guru juga harus memperhatikan kelengkapan administrasi seperti RPP, presensi siswa, dan lain-lain.

Seorang pendidik harus memahami fungsi dan tugasnya. Guru dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan dan pada kondisi itu pula guru belajar menunjukkan sikap keguruan yang diperlukannya. Seorang yang berkepribadian khusus yakni kombinasi dari pengetahuan sikap dan keterampilan keguruan yang akan ditransformasikan kepada anak didik.

Selama kurang lebih dua bulan menjalani PPL, praktikan menyadari bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia. Guru merupakan salah satu media bagi siswa untuk mengerti dunia dan mengerti bagaimana bersikap dan berperilaku.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman lapangan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mlati, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kegiatan PPL dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menemukan permasalahan actual seputar kegiatan belajar mengajar di lokasi tempat PPL. Selain itu, mahasiswa juga dapat menemukan solusi pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut.
2. Kegiatan PPL sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memberikan pengalaman dan wawasan, serta gambaran yang nyata mengenai pembelajaran di sekolah sebagai bekal bagi seorang calon pendidik sebelum terjun dalam dunia pendidikan secara utuh.
3. Kegiatan PPL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya, misal dalam pengembangan media, menyusun materi sendiri berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai, dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Bagi Pihak LPPMP UNY
 - a. Perlunya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan PPL untuk masa datang. Oleh karena itu, perlu disempurnakan dan disosialisasikan lagi dengan baik, karena tidak dipungkiri bahwa masih ada hal-hal yang belum dimengerti oleh mahasiswa, serta guru pembimbing sendiri.
 - b. Perlunya koordinasi yang baik antara LPPMP dan DPL melakukan supervisi ke lokasi agar mereka juga mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa PPL. Dengan kegiatan supervisi ini pula diharapkan LPPMP dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi kelompok ataupun kritik yang membangun kelompok menjadi lebih baik lagi.
 - c. LPPMP lebih sering mengadakan acara diskusi bersama dengan ketua kelompok untuk menyampaikan hambatan atau kesulitan dilapangan dan mencari solusi atau jalan keluarnya. Dengan demikian diharapkan bahwa kelompok-kelompok yang sedang mengalami permasalahan atau kesulitan cepat teratasi dan kegiatan PPL berjalan dengan lancar.
 - d. Pengalokasian waktu antara kegiatan PPL dan KKN untuk masa yang akan datang perlu di benahi lagi, karena dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berbarengan ini memiliki banyak hambatan. Misalnya kurang bisa memetakan waktu yang baik antara KKN dan PPL.

2. Bagi Pihak SMA Negeri 1 Mlati

- a. Perlu adanya perawatan dan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana media pembelajaran secara optimal.
- b. Perlu peningkatan kedisiplinan dan ketertiban bagi peserta didik dalam lingkungan sekolah agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif.
- c. Perlu peningkatan nilai-nilai moril dari siswa kepada Guru maupun Karyawan SMA N 1 Mlati.
- d. Perlu pengoptimalan penggunaan media penunjang pembelajaran (CD, gambar, LCD) agar kompetensi yang ditentukan dapat tercapai melalui pembelajaran yang lebih menarik.

3. Bagi Pihak Mahasiswa PPL

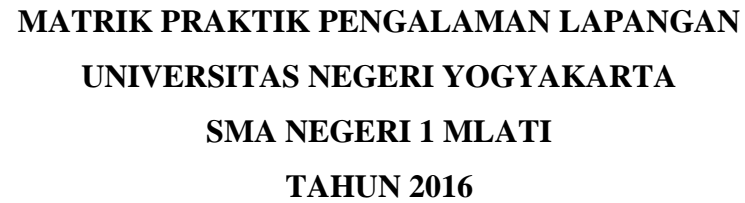
- a. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin dengan mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari dan mengikuti pengajaran mikro dengan maksimal.
- b. Praktikan harus belajar lebih keras, menimba pengalaman sebanyak-banyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.
- c. Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim hendaknya selalu dijaga sampai kegiatan PPL berakhir.
- d. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik dengan siapa saja, pandai menempatkan diri dan berperan sebagaimana mestinya.
- e. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap disiplin dan bertanggungjawab.
- f. Mempersiapkan sedini mungkin materi yang akan diberikan kepada peserta didik agar dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan konsep.
- g. Praktikan harus banyak membaca referensi tentang materi yang akan diajarkan, dan sering berkonsultasi dengan guru pembimbing.
- h. Praktikan sebaiknya mampu membawakan metode-metode yang lebih kreatif dalam setiap proses pembelajarann.
- i. Pembuatan perangkat pembelajaran yang lengkap dan baik untuk persiapan pelaksanaan mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

TIM Penyusun. 2016. *Panduan Pengajaran Mikro*. Yogyakarta: PL PPL & PKL UNY.

TIM PPL UNY. 2016. *Panduan PPL*. Yogyakarta: LPPMP UNY

LAMPIRAN



Nama Mahasiswa : Lisa Ristyaningsih
No Mahasiswa : 1341244017
Fak/Jur/Prodi : FIS/PKNH/PKN
Dosen Pembimbing : Setiati Widiastuti, M.Hum


[illegible]

5.	Kegiatan Sekolah												
	a. Upacara Bendera Hari Senin			1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		12
	b. 17 Agustus							2					2
6.	Pembuatan Laporan PPL										10	6	14
	JUMLAH												216

Yogyakarta, 18 Juli 2016

Mengetahui,

Kepala Sekolah



Drs. Aris Sutardi

NIP. 19640128 199003 1 003

Dosen Pembimbing Lapangan



Setiati Widiastuti, M.Hum

NIP 19600328 198403 2 001

Guru Pembimbing



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiswa



Lisa Ristyaningsih

NIM. 13401244017



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2016

F01

Untuk Mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Nama Mahasiswa : Lisa Ristyaningsih

Alamat Sekolah : Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman , Yogyakarta

NIM : 13401244017

Guru Pembimbing : Ervin Iswandayani, S.Pd

Fak / Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pembimbing : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari / Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
		Penyerahan Mahasiswa PPL	Penerimaan mahasiswa PPL dan pengarahan dari pihak SMA N 1 Mlati	-	-
MINGGU I					
		Upacara Bendera sekaligus penerimaan dan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan	Peserta didik kelas X resmi mulai menjalani MPLS	-	-

1.	Senin, 18 Juli 2016	Sekolah (MPLS)			
		Konsultasi dengan Guru Pendamping	Pergantian format RPP	-	-
		Pembuatan RPP I	RPP Pertemuan 1	Listrik sekolah mati, laptop habis baterai	Menunggu listrik kembali menyala dan melanjutkan RPP
		Piket Rutin di Sekolah	Membersihkan dan merapikan ruang piket, mengisi buku kemajuan sekolah serta melayani siswa/orang yang berkepentingan.	-	-
2.	Selasa, 19 Juli 2016	Piket Rutin	Melayani siswa dan tamu yang berkepentingan.	-	-
		Pembuatan media pembelajaran pertemuan	Power Point materi pertama kelas XI “Budaya Politik di Indonesia”		
		Pembagian LKS	Membantu membagi atau menata LKS untuk di bagikan ke setiap kelas.	Jumlahnya banyak	Dikerjakan secara kerja sama sekitar 5 Anak anggota PPL
		Mencari buku yang akan digunakan selama proses pembelajaran	Meminjam buku yang ada di perpustakaan	Ketersediaan buku sangat terbatas dan penataan kurang rapi sehingga sulit untuk mencari	Bertanya dengan petugas perpustakaan dan dibantu mencari buku yang dimaksud

		Mencari materi pendukung (Video) untuk menunjang proses KBM	Power point tentang Budaya Politik di Indonesia	Tidak menemukan video yang sesuai.	Dilanjutkan besok
3	Rabu, 20 Juli 2016	Meneruskan mencari media pembelajaran	Video Budaya politik yang rencana ditayangkan sebagai kesimpulan saja.	-	-
		Piket jaga di loby	Melayani tamu yang datang, melayani surat ijin bagi siswa yang akan meninggalkan jam pelajaran selesai.	-	-
		Membuat RPP I kelas X	RPP untuk pertemuan pertama dengan sub materi sistem pembagian kekuasaan negara	Belum selesai pembuatan RPP, namun waktu sudah menunjukkan jam pulang sekolah	Dilanjutkan besok
4.	Kamis, 21 Juli 2016	Piket perpustakaan	Membantu petugas perpustakaan memberi label buku. Buku yang baru datang dari penerbit langsung diberi label administrasi perpustakaan dan di tata di rak buku	-	-
		Lanjutan membuat RPP pertemuan pertama kelas X	RPP pertemuan pertama	-	-
		Piket Rutin	Melayani tamu yang datang,	-	-

			melayani surat ijin bagi siswa yang akan meninggalkan jam pelajaran selesai.		
5	Jum'at, 22 Juli 2016	Tadarus	Membaca Al-Quran		
		Proses pembelajaran pertemuan pertama kelas XI IPS 1	Perkenalan antara guru dan siswa, dan langsung memasuki materi pertama pengertian budaya politik sampai tipe-tipe budaya politik.	Siswa tidak memperhatikan, banyak siswa yang bolos	Siswa ditegur dan diperingatkan untuk tidak mengulanginya lagi
MINGGU II					
1	Senin, 25 Juli 2016	Upacara bendera	Semua siswa, guru, dan mahasiswa PPL mengikuti upacara bendera dengan khikmat.		
		Menyiapkan materi untuk mengajar	Belajar	-	-
		Proses pembelajaran pertemuan pertama di kelas XI IPA 2	Perkenalan antara guru dan siswa, dan langsung memasuki materi pertama pengertian budaya politik sampai tipe-tipe budaya politik.		
2	Selasa, 26 Juli 2016	Piket perpustakaan	Melayani peminjaman buku bagi tiap siswa.	-	-
		Membuat RPP pertemuan	Materi pertemuan kedua	-	-

		kedua untuk kelas XI	tentang pengembangan sosialisasi budaya politik.		
		Piket Rutin Sekolah	Melayani kepentingan siswa maupu tamu yang berkunjung ke Sekolah.		
3	Rabu, 27 Juli 2016	Mempersiapkan untuk mengajar	Belajar		
		Proses mengajar petemuan pertama di kelas X MIA 2	Tahap awal pengenalan dimana di dampingi juga oleh Guru Pembimbing, lalu diteruskan memasuki materi sistem pembagian kekuasaan negara.		
		Mencari materi penunjang untuk kelas XI	Video kampanye		
4	Kamis, 28 Juli 2016	Piket Rutin	Dimulai dengan keliling seluruh kelas mengecek kehadiran siswa, serta melayani orang yang berkepentingan.		
		Piket Perpustakaan	Melayani peminjaman buku.		
5	Jumat, 29 Juli 2016	Tadarusan	Membaca Al-Quran bersama anak-anak kelas XI IPS 1		
		Masuk Kelas pertemuan kedua XI IPS 1	Dengan materi selanjutnya tentang sosialisasi politik	Masih banyak siswa yang tidak	

			dengan metode snowball throwing.	memperhatikan	
	MINGGU III				
1	Senin, 1 Agustus 2016	Upacara Bendera	Diikuti oleh Guru, karyawan, dan seluruh siswa serta mahasiswa PPL UNY.		
		Membuat RPP Pertemuan ketiga kelas XI	Materi tentang tingkat Partisipasi Politik	Belum mencari media untuk bahan penunjang pembelajarannya	
		Masuk kelas XI IPA 2 Pertemuan Kedua	Mengisi materi sosialisasi politik	Peserta didik kurang aktif lebih suka mencatat.	
2	Selasa, 2 Agustus 2016	Piket perpustakaan	Merapihkan buku cetak siswa		
		Melanjutkan mencari media	Menemukan video		
		Piket Rutin	Melayani kepentingan orang, baik siswa maupun umum.		
3	Rabu, 3 Agustus 2016	Masuk kelas X pertemuan kedua	Dengan membawa materi tentang Kementerian Negara RI dengan metode diskusi lalu dipresentasikan di depan kelas.	Kurang efisien ketika melaksanakan presentasi	
		Merevisi RPP	Menyelesaikan pembuatan RPP, RPP jadi.		

4	Kamis, 4 Agustus 2016	Piket Rutin	Melayani siswa dan orang yang berkepentingan		
		Mencari media pengajaran	Mendapatkan contoh video pentingnya partisipasi politik		
		Piket Perpustakaan	Melayani peminjaman buku.		
5	Jumat, 5 Agustus 2016	Tadarus	Membaca Al-Quran	Banyak siswa yang tidak membaca Al-Quran	
		Mengajar kelas XI pertemuan ketiga.	Mengajar materi partisipasi politik dengan metode ceramah dan memberikan tugas mengerjakan uji kompetensi LKS bab 1		
	MINGGU IV				
1	Senin, 8 Agustus 2016	Upacara	Upacara bendera diikuti oleh semua warga SMA N 1 Mlati		
		Membuat soal ulangan harian untuk kelas XI	Materi ulangan dari materi budaya politik sampai debat politik		
		Mengajar kelas XI pertemuan ketiga	Mengajar materi partisipasi politik dengan metode ceramah dan memberikan tugas mengerjakan uji kompetensi LKS bab 1		

	Selasa, 9 Agustus 2016	Piket perpustakaan	Melayani meminjaman buku cetak.		
		Melanjutkan membuat soal harian	Membuat soal pilihan ganda 15, uraian singkat, dan essay.		
		Piket Rutin Sekolah	Melayani kepentingan orang, baik siswa maupun umum.		
	Rabu, 10 Agustus 2016.	Masuk kelas X pertemuan ketiga	Pertemuan ketiga diisi dengan materi praktik penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai pancasila.	Sampai pertemuan terakhir siswa merasa kesulitan karena tidak ada buku pegangan.	Di copy materi pelajaran lalu di bagikan kepada siswa-siswa untuk bahan belajar.
	Kamis, 11 Agustus 2016.	Piket Rutin	Dimulai dengan keliling seluruh kelas mengecek kehadiran siswa, serta melayani orang yang berkepentingan.		
		Membuat soal ulangan untuk kelas X.	Soal dibuat sesuai dengan materi yang sudah di ajarkan.		
		Piket Perpustakaan	Melayani peminjaman buku.		
	Jumat, 12 Agustus 2016	Tadarus	Membaca Al-Quran.		
		Masuk kelas pertemuan ke empat (ulangan harian satu)	Siswa melaksanakan ulangan harian satu, langsung dikerjakan di lembar soal yang sudah	Siswa banyak yang mencontek dan kelas susah untuk	Memberi teguran.

			disiapkan.	dikondisikan.	
	MINGGU V				
	Senin, 15 Agustus 2016	Upacara Bendera	Tidak dilaksanakan karena upacara minggu ini akan diadakan pada tanggal 17 Agustus.		
		Mengkoreksi hasil ulangan harian pertama serta tugas uji kompetensi bab 1 XI IPS 2.	Belum selesai semua.		
		Mengajar kelas XI pertemuan keempat	Pembelajaran (Ulangan harian) tidak terlaksana, karena semua siswa mengikuti persiapan upacara.	Waktu pembelajaran menjadi terhambat.	Ulangan dilaksanakan minggu depan.
	Selasa, 16 Agustus 2016.	Piket perpustakaan	Melayani peminjaman buku, dan merapihkan ruang perpustakaan.		
		Melanjutkan mengoreksi LKS XI IPS 2.			
		Piket Rutin Sekolah	Menjaga dan melayani orang yang berkepentingan bila ingin ijin, atau bagi guru yang menitipkan tugas.		
	Rabu, 17 Agustus 2016	Upacara Kemerdekaan RI.	Diikuti oleh warga sekolah dan upacara berjalan dengan		

			khimat.		
		Mengajar kelas X ke empat	Tidak terlaksana ulangan harian karena tanggal merah, sesetelah upacara tidak ada KBM		Ulangan minggu depan.
	Kamis, 18 Agustus 2016.	Piket Rutin	Menjaga dan melayani orang yang berkepentingan bila ingin ijin, atau bagi guru yang menitipkan tugas.		
		Piket Perpustakaan .	Melayani peminjaman buku.		
	Jumat, 19 Agustus 2016.	Membuat metode pembelajaran.			
	MINGGU VI				
	Senin, 22 Agustus 2016	Upacara Bendera.	Diikuti oleh seluruh warga SMA N 1 Mlati.		
		Mengajar kelas XI pertemuan ke lima (11.30-13.45)	Pelaksanaan ulangan harian satu. Semua siswa mengerjakan dengan baik.		
	Selasa, 23 Agustus 2016.	Piket perpustakaan .	Melayani peminjaman buku, dan merapihkan ruang perpustakaan.		
		Mengevaluasi hasil ulangan XI IPA 2	Hasil ulangan sudah baik, jumlah siswa yang nilainya di bawah KKM 4 Siswa.		Untuk nilai yang dibawah KKM mengerjakan soal

					remidi.
		Piket Rutin Sekolah.	Menjaga dan melayani orang yang berkepentingan bila ingin ijin, atau bagi guru yang menitipkan tugas.		
	Rabu, 24 Agustus 2016	Masuk kelas X pertemuan ke lima .	Melaksanakan ulangan harian pertama. Siswa mengerjakan soal ulangan dengan baik.		
		Mengevaluasi/mengkoreksi hasil pekerjaan LKS kelas XI IPA 2.	Hasilnya baik nilai juga banyak yang memuaskan.		
	Kamis, 25 Agustus 2016.	Piket Rutin .	Melayani siswa yang berkepentingan (ijin masuk) atau yang lain.		
		Mengevaluasi hasil ulangan kelas X.	Siswa banyak yang mendapatkan nilai baik, yang remidi ada 8 siswa.		Akan dilaksanakan remidi bagi nilai yang belum mencapai KKM.
		Piket Perpustakaan	Melayani peminjaman buku.		
	Jumat, 26 Agustus 2016	Membuat RPP Kelas XI	Materi tentang budaya demokrasi.		
	MINGGU VII				
	Senin, 29 Agustus 2016	Upacara bendera	Diikuti oleh seluruh warga SMA N 1 Mlati.		

		Monitoring LPPMP	Dihadiri oleh 9 orang dari LPPMP, guru-guru, dan mahasiswa PPL membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi.		
		Mengajar di kelas XI IPA 2 keenam	Memulai materi baru bab 2, tentang budaya demokrasi.		
	Selasa, 30 Agustus 2016	Piket perpustakaan.	Melayani peminjaman buku, dan merapihkan ruang perpustakaan.		
		Membuat RPP kelas X (10-00-11.30)	Materi tentang wilayah negara.		
		Piket Rutin Sekolah (12.00-13.50).	Menjaga dan melayani orang yang berkepentingan bila ingin ijin, atau bagi guru yang menitipkan tugas.		
	Rabu, 31 Agustus 2016.	Masuk kelas X pertemuan keenam .	Masuk kelas dengan materi memasuki bab ke dua, tentang wilayah negara.		
		Mengevaluasi tugas pengayaan kelas X.	Semua siswa mendapatkan nilai baik.		
	Kamis, 1 Agustus 2016.	Piket Rutin .	Dimulai dengan keliling seluruh kelas mengecek kehadiran siswa, serta melayani orang		

			yang berkepentingan.		
		Piket Perpustakaan.	Melayani peminjaman buku.		
	Jumat, 2 September 2016	Membuat RPP Kelas XI.			
	MINGGU VIII				
	Senin, 5 September 2016.	Upacara Bendera.	Upacara diikuti seluruh warga sekolah dan berjalan dengan khikmat.		
		Membuat lampiran Laporan.	Mengerjakan lanjutan pembuatan lapotran-laporan (perangkat mengajar)		
	Selasa, 6 September 2016	Piket rutin	Menjaga ruang piket dan memeriksa siswa yang tidak masuk sekolah.		
		Melanjutkan pembuatan laporan.	Membuat latar belakang laporan PPL.		
		Mengajar kelas XI IPA 2	Mengajar dengan materi masyarakat madani dengan media portopolio.		
		Piket Perpustakaan	Membantu mengecap buku-buku paket yang baru.		
	Rabu, 7 September 2016	Melanjutkan pembuatan laporan PPL,	Menyelesaikan lampiran-lampitran seperti catatan harian dan mingguan.		

	Kamis, 8 September 2016	Mengajar kelas X MIA 2	Materi pembelajaran tentang kedudukan Warga Negara dan Penduduk dengan menayangkan video.		
		Piket Rutin	Menjaga ruang piket, melayani siswa yang berkepentingan.		
		Piket Perpustakaan	Membantu menuliskan nomor buku paket.		
		Melanjutkan pembuatan laporan PPL	Menyusun lampiran laporan.		
	Jumat, 9 September 2016.	Melanjutkan penyusunan laporan.	Menyusun laporan PPL. Mencari informasi mengenai kondisi sekolah SMA N 1 Mlati		
	Senin, 12 September	Libur PPL	Karena bertepatan dengan tanggal merah.		
	Selasa, 13 September 2016	Menyelesaikan Laporan PPL	Laporan PPL Selesai.		
	Rabu, 14 September 2016	Penarikan PPL	Penarikan PPL dihadiri oleh DPL, Guru-guru dan mahasiswa PPL UNY sebagai ucapan terimakasih dan permohonan maaf kepada warga SMA N 1 Mlati.		

PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Semester : 1 (ganjil)

Tahun Pelajaran : 2016/2017
Kelas : X dan XI

Program								Pelaksanaan
Hari/ Tang gal	Kel as	Ja m Ke -	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Ab se nsi	Hambatan/ Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jum'at , 22 Juli 2016	XI IPS 1	1-2	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik. 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 1.3 Mendeskripsikan pentingnya	- Mendeskripsikan pengertian budaya politik - Mengidentifikasikan pengertian budaya politik menurut para ahli - Mendeskripsikan komponen-komponen	- Power Point - Ceramah - Diskusi	-	Siswa tidak memperhatikan.	

			<p>sosialisasi pengembangan budaya politik.</p> <p>1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.</p>	<p>budaya politik</p> <ul style="list-style-type: none">- Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan.- Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

Senin, 25 Juli 2016	XI IPA 2	7-8	<p>1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.</p> <p>1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.</p> <p>1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.</p> <p>1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan pengertian budaya politik - Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli - Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik - Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan. - Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Power Point - Ceramah - Diskusi 	-	Waktu terbuang sia-sia karena peserta didik memilih untuk mencatat materi, sehingga ketika dijelaskan tidak fokus.	
---------------------------	----------------	-----	---	---	---	---	--	--

				politiknya.				
Rabu, 27 Juli 2016	X MIA 2	3-4	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik	1.1.1 Mensyukuri adanya praktik penyelengga raan	- Power Point - <i>White Board</i> , Spidol.	-	Karena tidak ada buku pegangan, peserta didik tidak dapat	

			<p>penyelenggara an pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara an pemerintahan Negara.</p> <p>3.1 Menganalisis</p>	<p>pemerintahan n negara tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>2.1.1 Peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap praktik penyelenggara</p>	- Diskusi		<p>secara penuh mendapatkan informasi pengetahuan.</p>	
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

			nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	raan pemerintahan tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. 3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. 3.1.2 Peserta didik mampu menganalisis konsep pembagian				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>sistem kekuasaan negara.</p> <p>4.1.1 Peserta didik mengkritisi hasil diskusi tentang macam- macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>4.1.2 Peserta didik mampu mengkritisi konsep pembagian sistem kekuasaan</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				negara.				
Jumat , 29 Juli 2016	XI IPS 1	1-2	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	1.3.1 Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik. 1.3.2 Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik 1.3.3 Mengidentifikasi proses	- <i>White Board</i> - Spidol - Video • Metode Snowball Throwing.		Soal yang disusun ketika melakukan Snowball Throwing tidak kreatif. Sehingga pemahamannya kurang.	

				<p>sosialisasi politik</p> <p>1.3.4 Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang</p> <p>1.3.5 Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik.</p>				
Senin, 1 Agustus 2016	XI IPA 2	7-8	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	1.3.1 Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>White Board</i> - Spidol - Video - Metode 		Peserta didik lebih suka mencatat, dan ketika metode snowball throwing	

				<p>pengembangan politik.</p> <p>1.3.2 Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik</p> <p>1.3.3 Mengidentifikasi proses sosialisasi politik</p> <p>1.3.4 Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam</p>	<p>Snowball Throwing</p> <p>.</p>		<p>pembuatan soalnya juga kurang kreatif.</p>	
--	--	--	--	---	-----------------------------------	--	---	--

				masyarakat berkembangan 1.3.5 Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik.				
Rabu, 3 Agustus 2016	X MIA 2	3-4	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai- nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.1 Mengamalkan nilai- nilai Pancasila	1.1.1. Mensyukuri adanya praktik penyelenggaran pemerintahan Negara tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Power Point</i> - <i>White Board</i> - Spidol • Diskusi Lalu di Presentasi 		Ketika melakukan presentasi di depan kelas, peserta didik masih ada yang tidak aktif dalam bertanya.	

			<p>dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>	<p>Indonesia.</p> <p>2.1.1 Peserta didik menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian</p>	an			
--	--	--	---	--	----	--	--	--

				<p>Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian. Negara RI.</p> <p>3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian.</p> <p>3.1.2 Peserta didik menganalisis klasifikasi</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non Kementerian.</p> <p>4.1.1 Peserta didik mampu mengkritisi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia</p> <p>4.1.2 Peserta didik mampu mengkritisi tentang klasifikasi</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>kementerian Negara RI dan non kementerian.</p> <p>4.1.3 Menyimpulka n hasil temuan kerangka praktik penyelenggar aan pemerintahan negara sesuai nilai- nilai Pancasila.</p>				
Jumat , 5 Agust us 2016	XI IPS 1	1-2	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.	<p>1.4.1 Mendeskri psikan pengertian partisipasi politik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Video - <i>White Board</i> - Spidol 			

				<p>1.4.2 Memetakan konsep partisipasi politik.</p> <p>1.4.3 Mengaplikasikan praktik partisipasi politik</p> <p>1.4.4 Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memutar Video . • Diskusi 			
Senin, 8 Agustus 2016	XI IPA 2	7-8	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.	<p>1.4.1 Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik.</p> <p>1.4.2 Memetakan konsep</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Video - <i>White Board</i> - Spidol • Memutar 		-	

				partisipasi politik. 1.4.3 Mengaplikasikan praktik partisipasi politik Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik	Video . • Diskusi			
Rabu, 10 Agustus 2016.	X MIA 2	3-4	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang	3.1.1 Mensyukuri adanya Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan .	- <i>White Board</i> - Spidol • TSTS (<i>To Stay To Straight</i>)		Ketika kelompok bertukar pendapat, kelas kurang kondusif.	

			<p>Maha Esa.</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>	<p>3.1.2 Peserta didik menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan .</p> <p>3.1.3 Peserta didik mampu</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggar aan pemerintahan</p> <p>3.1.4 Peserta didik menganalisis nilai-nilai pancasila dalam sistem pemerintahan di Indonesia.</p> <p>3.1.5 Peserta didik mampu mengkritisi tentang Nilai- nilai Pancasila dalam</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Penyelenggara aan pemerintahan Menyimpulkan hasil temuan kerangka praktik penyelenggara aan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila.</p> <p>4.1.1 Peserta didik mampu mengkritisi tentang Nilai- nilai Pancasila dalam</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Penyelenggara aan pemerintahan</p> <p>4.1.2 Menyimpulka n hasil temuan kerangka praktik penyelenggara aan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila.</p>				
Jumat , 12 Agustus 2016	XI IPS 1	1-2						<p>Melakukan Ulangan Harian Satu.</p> <p>(Materi Ulangan Budaya politik sampai Debat</p>

								Politik)
Senin, 15 Agustus 2016	XI IPA 2	7-8						Tidak terlaksananya proses belajar mengajar, karena jam pelajaran digunakan untuk latihan upacara.
Rabu, 17 Agustus	X MIA 2	3-4						Tidak terlaksana proses belajar mengajar,

2016								karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Senin, 22 Agustus 2016	XI IPA 2	7-8						Pelaksanaan Ulangan Harian 1, materi ulangan Bab 1.
Rabu, 24 Agustus 2016	X MIA 2	3-4						Melaksanakan Ulangan harian ke satu Bab 1.
Senin, 28 Agustus 2016	XI IPA 2	7-8	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi	2.1.1 Mendeskripsikan pengertian Demokrasi. 2.1.2 Mengidentifikasi	- Power Point - <i>White Board</i> - Spidol			

				asi pemikiran tentang Demokrasi. 2.1.3 Menganalisis ciri-ciri Demokrasi. 2.1.4 Memahami prinsip-prinsip Demokrasi 2.1.5 Mendeskripsi kan Demokratisas i	<ul style="list-style-type: none"> • Coopera tive Skrips 			
Rabu, 30 Agust us 2016.	X MIA 2	3-4	1.2 menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang- undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga	1.2.1 Peserta didik mampu memahami ketentuan Undang- Undang Negara Republik				

			<p>negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p> <p>2.2 mengamalkan nilai- nilai yang terkandung dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>3.2 Menganalisis ketentuan Undang- undang Dasar Negara</p>	<p>Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara.</p> <p>1.2.2 Peserta didik mensyukuri keberadaan Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p>	<p>Peserta didik menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara.</p> <p>2.2.1 Peserta didik mampu</p>				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

				menunjukkan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang batas-batas wilayah Negara Indonesia. 2.2.2 Peserta didik				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				mampu menunjukkan ras atanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi tentang Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.2.1 Pesertadidik				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur Wilayah Negara				
				3.2.2 Peserta didik menganalisis batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia. Peserta didik				

				<p>menganalisis Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>4.2.1 Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Wilayah Negara Indonesia.</p> <p>4.2.2 Peserta didik mampu mengkritisi tentang batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia. Peserta didik mampu mengkritisi Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.				
Selas a, 6 Septe mber 2016	XI IPA 2	3-4	2.2 Mengidentifikasi ciri- ciri masyarakat madani	2.2.1 Mendeskripsi kan konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>) 2.2.2 Mengidentifik asi karakteristik masyarakat madani 2.2.3 Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.	- <i>White Board</i> - Spidol • <i>Portopoli o</i>			

Kamis , 7 Septe mber 2016	X MIA 2		<p>1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p> <p>2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang</p>	<p>3.1.3 Peserta didik mampu memahami ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang status warga negara Indonesia.</p> <p>3.1.4 Peserta didik mensyukuri keberadaan Asas-asas Kewarganeg</p>	<p>- Video</p> <p>- Diskusi</p>			
---------------------------------------	---------------	--	---	---	---------------------------------	--	--	--

			<p>wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>3.2 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>4.2 menyaji hasil analisis tentang</p>	<p>araan Indonesia</p> <p>3.1.5 Peserta didik mensyukuri keberadaan adanya Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia.</p> <p>3.1.6 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang status warga negara Indonesia. 3.1.7 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<p>sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia.</p> <p>3.1.8 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>presentasi syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Peserta didik mampu menunjukkan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi Penyebab Hilangnya Kewarganega raan Indonesia.</p> <p>3.1.9 Peserta didik</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur status warga negara Indonesia.</p> <p>3.1.10 Peserta didik menganalisis ketentuan undang-undang dasar yang mengatur</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>asas-asas kewarganeg araan Indonesia</p> <p>3.1.11 Peserta didik menganalisis syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia.</p> <p>3.1.12 Peserta didik menganalisis is pertahanan dan keamanan negara Indoensia Penyebab Hilangnya</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Kewarganegaraan Indonesia</p> <p>4.2.1 Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang status warga Negara Indonesia.</p> <p>4.2.2 Peserta didik mampu mengkritisi tentang asas-asas menjadi warga</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>negara Indonesia.</p> <p>4.2.3 Peserta didik mampu mengkritisi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia.</p> <p>4.2.4 Peserta didik mampu mengkritisi Penyebab Hilangnya Kewarganeg araan Indonesia.</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



KARTU BIMBINGAN PPL/MAGANG III DI SEKOLAH/ LEMBAGA
PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY
2016
TAHUN

F04

UNTUK MAHASISWA

Nama Sekolah/ Lembaga : SMA N 1 Mlati
Alamat Sekolah/ Lembaga : Cepungan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta Fax./ Telp. Sekolah/Lembaga :
Nama DPL PPL/ Magang III : Setiati Widiastuti, M.Hum
Prodi / Fakultas DPL PPL/ Magang III : Pkn / Fakultas Ilmu Sosial
Jumlah Mahasiswa PPL/ Magang III : 2 (dua)

No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PPL/ Magang III
1	Selasa, 9/8'16	2	RPP		<i>[Signature]</i>
2	Senin, 15/8'16	2	Penyusunan soal		<i>[Signature]</i>
3	Senin, 29/8'16	2	Definisi Koordinasi & Guv pamong		<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 28/9'16	2	Laporan		<i>[Signature]</i>

PERHATIAN :

- ☛ Kartu bimbingan PPL ini dibawa oleh mhs PPL/ Magang III (1 kartu untuk 1 prodi)
- ☛ Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini harap diisi materi bimbingan dan dimintakan tanda tangan dari DPL PPL/ Magang III setiap kali bimbingan di lokasi.
- ☛ Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PPL/ Magang III untuk keperluan administrasi.

Mengetahui,
Kepala Sekolah / Lembaga

Mlati, 16 September 2016
Mhs PPL/ Magang III Prodi Pkn.....



[Signature]
Lisa Ristiana, S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMA N 1 Mlati
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X/1 (Satu)
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
Tema :Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 Mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintahan negara tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. 1.1.2 Mensyukuri keberadaan adanya pengklasifikasian sistem pembagian kekuasaan Negara.

	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	2.1.1 Peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. 3.1.2 Peserta didik mampu menganalisis konsep pembagian sistem kekuasaan negara.
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	4.1.1 Peserta didik mengkritisi hasil diskusi tentang macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. 4.1.2 Peserta didik mampu mengkritisi konsep pembagian sistem kekuasaan negara.

C. Materi Pembelajaran

1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.
 - a. Makna sistem pembagian kekuasaan negara.
 - b. Macam-macam pembagian kekuasaan negara.

D. Media, Alat / Bahan dan SumberBelajar

- Media : Tayangan Video, Power Point
- Alat / Bahan : LCD, Laptop, *White Board*, Spidol.
- Sumber belajar : -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X: buku Guru/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.

E. Kegiatan Pembelajaran

No	Rincian Kegiatan	Waktu
.1.	Pendahuluan 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 2) Guru memberikan motivasi dan bersyukur bahwa Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3) Apersepsi (menanyakan materi sebelumnya yang terkait dengan materi sekarang) 4) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 5) Guru menyampaikan topik tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	10 Menit
.2.	Kegiatan Inti Mengamati 1) Siswa mengamati tayangan video/film/gambar, Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab, tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Menanya 2) Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari terkait dengan gambar/video. Masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda. Mengumpulkan Informasi 3) Peserta didik secara berkelompok dianjurkan untuk menggunakan sumber lain dari internet; web, media sosial lainnya dalam mempelajari Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Mengasosiasikan 4) Peserta didik melakukan analisis/diskusi tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Mengomunikasikan 5) Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya. 6) Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian	60 Menit

	dari guru.	
.3.	<p>Penutup</p> <p>1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>2) Guru memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman : Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian</p> <p>3) Guru menyimpulkan materi yang telah di bahas padapertemuan ini.</p> <p>4) Guru memberikan tugas untuk minggu selanjutnya.</p> <p>5) Guru menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah berjalan baik dan lancar.</p>	20 Menit

Penilaian

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
Menjelaskan macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.	<p>a. Jelaskan pengertian kekuasaan negara!</p> <p>b. Sebutkan dan jelaskan macam-macam kekuasaan negara menurut John Lock dan Montesquieu!</p>	<p>a) Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.</p> <p>b) Menurut John Locke : a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang</p> <p>b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undangundang</p>	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

		<p>c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.</p> <p>Menurut Montesque :</p> <p>a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.</p>	
Menjelaskan konsep pembagian sistem kekuasaan negara	<p>a. Jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal!</p> <p>b. Jelaskan pembagian kekuasaan secara vertical!</p>	<p>a. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan</p>	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

		<p>pemerintah daerah.</p> <p>Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.</p> <p>b. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan</p>	
--	--	---	--

		<p>pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	
--	--	--	--

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Teknik penilaian

- Penilaian sikap sosial dan spriritual
Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok. Sedangkan dalam penilaian spriritual dapat dilihat dengan pengamatan seberapa jauh siswa menghargai dan mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- Penilaian kognitif/ tes tertulis

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana peserta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.

- Penilaian keterampilan.

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.

b. Instrumen Penilaian

a. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual, Sosial dan Keterampilan

Petunjuk : jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

	Rubrik Penilaian				
	Peserta didik bersyukur kepada Tuhan YME atas segala nikmat yang diberikan dan senantiasa bersyukur sistem pembagian kekuasaan di Indonesia	Peserta didik turut menjaga Menghargai nilai-nilai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memahami jalannya macam-macam sistem pembagian kekuasaan Negara.	Peserta didik memperhatikan dengan baik selama proses pembelajaran	Peserta didik senantiasa menumbuhkan rasa ingin tahu dengan cara memberi pendapat atau bertanya saat diskusi berlangsung	Peserta didik dengan cepat dan tanggap menjawab atas pertanyaan yang diajukan saat diskusi kelas
Nama					
Aderian					
Aldi					

Amanur					
Anita					
Aura					
Bagas					
Dhyana					
Elizabet					
Faiza					
Farah					
Hany					
Huzaifatin					
Ilham Nur					
Irfan Aldi					
Isra'im					
Jowinka					
Marheni					
Mellania					
Nafizah					
Nourma					
Rachma					
Reynaldo					
Ridho					
Risma					
Sekar Arum					
Shibhotullo					
Shinta					
Titian Nur					
Tsabita					
Vera Intan					
Vica Rizky					
Yaswan					

- Remedial

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi mengenai Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat di sesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.

- Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi mengenai Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.

Sleman, 21 Juli 2016

Mengetahui,


Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

Lampiran

Materi Pembelajaran

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

a. Macam-macam Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali terdengar baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Begitu pula di masyarakat, ketika ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, maka setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan?

Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273), kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273)

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu ini dinamakan dengan *Trias Politica*.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi control dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara* (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu

dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

- 1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

- 4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 5) Kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- 6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

b. Pembagian kekuasaan secara vertical

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMA N 1 Mlati
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X/1 (Satu)
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1x Pertemuan)
Tema :Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	<div>1.1.1 Mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia.</div> <div>1.1.2 Mensyukuri keberadaan adanya nilai-nilai pancasila mengenai klasifikasi kemeterian negara.</div>

	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	2.1.1 Peserta didik menunjukkan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian. Negara RI.
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian. 3.1.2 Peserta didik menganalisis klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non Kementerian.
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	4.1.1 Peserta didik mampu mengkritisi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia 4.1.2 Peserta didik mampu mengkritisi tentang klasifikasi kementerian Negara RI dan non kementerian. 4.1.3 Menyimpulkan hasil temuan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila.

C. Materi Pembelajaran

1. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian :
 - a. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya.
 - b. Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi.

D. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar

- Media : Tayangan Video, Power Point

- Alat / Bahan : LCD, Laptop, *White Board*, Spidol.
- Sumber belajar : -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X: buku Guru/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.

Kegiatan Inti

No	Rincian Kegiatan	Waktu
.1.	Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat sertabuku yang diperlukan). 2) Guru memberikan motivasi dan bersyukur bahwa Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3) Apersepsi (menanyakan materi sebelumnya yang terkait dengan materi sekarang) 4) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 5) Guru menyampaikan topik tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara mengenai Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 	10 Menit
.2.	Kegiatan Inti <p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siswa mengamati tayangan video/film/gambar, Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab, tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. <p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari terkait dengan gambar/video. Masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda. <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Peserta didik secara berkelompok dianjurkan untuk menggunakan sumber lain dari internet; web, media sosial lainnya dalam mempelajari mengenai Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. <p>Mengasosiasikan</p>	60 Menit

	<p>1) Peserta didik melakukan analisis/diskusi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>Mengomunikasikan</p> <p>2) Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya.</p> <p>3) Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.</p>	
.3.	<p>Penutup</p> <p>1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>2) Guru memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman.</p> <p>3) Guru menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini.</p> <p>4) Guru memberikan tugas untuk minggu selanjutnya.</p> <p>5) Guru memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutupkegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karenatelah berjalan baik dan lancar.</p>	20 Menit

Penilaian

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
Menjelaskan Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian.	a. Sebutkan tugas Kementerian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara!	<p>a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.</p> <p>b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya,</p>	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

		<p>pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.</p> <p>c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.</p>	
Menjelaskan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non Kementerian	a. Sebutkan klasifikasi kementerian negara RI berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia	<p>a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya</p>	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

	Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara!	disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah	
--	--	--	--

E. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Teknik penilaian

- Penilaian sikap sosial dan spriritual
Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok. Sedangkan dalam penilaian spriritual dapat dilihat dengan pengamatan seberapa jauh siswa menghargai dan mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- Penilaian kognitif/ tes tertulis
Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana peserta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.
- Penilaian keterampilan.
Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.

b. Instrumen Penilaian

a. Rubrik Penilaian Sikap Spriritual, Sosial dan Keterampilan

Petunjuk : jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

Nama	Rubrik Penilaian				
	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta didik	Peserta didik

	didik besyuk ur kepada Tuhan YME atas segala nikmat yang diberika n dan senanti asa selalu bersyuk ur adanya fungsi dan kedudu kan kement erian negara RI	didik turut menjaga Mengharg ai nilai- nilai pengabdia n kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memahami jalannya tugas dan fungsi serta kedudukan kementeria n negara RI	didik memperhati kan dengan baik selama proses pembelajara n	senantiasa menumbuhk an rasa ingin tahu dengan cara memberi pendapat atau bertanya saat diskusi berlangsung	dengan cepat dan tanggap menjawab atas pertanyaan yang diajukan saat diskusi kelas
Aderian					
Aldi					
Amanur					
Anita					
Aura					
Bagas					
Dhyana					
Elizabet					
Faiza					
Farah					
Hany					
Huzaifatin					
Ilham Nur					

Irfan Aldi					
Isra'im					
Jowinka					
Marheni					
Mellania					
Nafizah					
Nourma					
Rachma					
Reynaldo					
Ridho					
Risma					
Sekar Arum					
Shibhotullo					
Shinta					
Titian Nur					
Tsabita					
Vera Intan					
Vica Rizky					
Yaswan					

- Remedial

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi mengenai Kedudukan Dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat di sesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.

- Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi mengenai Kedudukan Dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai Kedudukan Dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia

Sleman, 21 Juli 2016

Mengetahui,

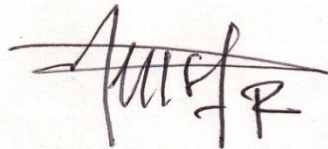
Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

LAMPIRAN

1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

- a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

- c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian Negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan di bawah ini. Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

- 1) Kementerian Dalam Negeri
- 2) Kementerian Luar Negeri
- 3) Kementerian Pertahanan

b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Kementerian Keuangan
- 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4) Kementerian Perindustrian
- 5) Kementerian Perdagangan
- 6) Kementerian Pertanian
- 7) Kementerian Kehutanan
- 8) Kementerian Perhubungan
- 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11) Kementerian Pekerjaan Umum
- 12) Kementerian Kesehatan
- 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 14) Kementerian Sosial
- 15) Kementerian Agama
- 16) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 17) Kementerian Komunikasi dan Informatika

c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

- 1) Kementerian Sekretariat Negara
- 2) Kementerian Riset dan Teknologi
- 3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 4) Kementerian Lingkungan Hidup
- 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- 8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara

10) Kementerian Perumahan Rakyat

11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawa koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN);
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
20. Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
21. Badan SAR Nasional (Basarnas);
22. Badan Standardisasi Nasional(BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
24. Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri
26. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
30. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMA N 1 Mlati
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X/1 (Satu)
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
Tema :Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

A. Kompetensi Inti

- 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 Mensyukuri adanya Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan 1.1.2 Menyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	2.1.1 Peserta didik menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan

	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan 3.1.2 Peserta didik menganalisis nilai-nilai pancasila dalam sistem pemerintahan di Indonesia
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	4.1.1 Peserta didik mampu mengkritisi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan 4.1.2 Menyimpulkan hasil temuan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila.

C. Materi Pembelajaran

1. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan mengenai sistem pembagian kekuasaan negara RI dan Kementerian RI dan Non Kementerian negara R1
2. Media, Alat / Bahan dan SumberBelajar
 - Media : Tayangan Video, Power Point
 - Alat / Bahan : LCD, Laptop, *White Board*, Spidol.
 - Sumber belajar : -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X: buku Guru/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.

Kegiatan Inti

No	Rincian Kegiatan	Waktu
.1.	Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat sertabuku yang diperlukan). 2) Guru memberikan motivasi dan bersyukur bahwa Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3) Apersepsi (menanyakan materi sebelumnya yang terkait dengan materi sekarang) 4) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 5) Guru menyampaikan topik tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara mengenai 	10 Menit 20 menit

	Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan menyelesaikan presentasi minggu lalu.	
.2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>Mengamati</p> <p>1) Siswa mengamati tayangan video/film/gambar, Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab, tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>Menanya</p> <p>2) Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari terkait dengan gambar/video. Masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda.</p> <p>Mengumpulkan Informasi</p> <p>3) Peserta didik secara berkelompok dianjurkan untuk menggunakan sumber lain dari internet; web, media sosial lainnya dalam mempelajari mengenai Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Mengasosiasikan</p> <p>1) Peserta didik melakukan analisis/diskusi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.</p> <p>Mengomunikasikan</p> <p>2) Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dengan bertukar pasangan dengan kelompok lain, dan kelompok yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya.</p> <p>3) Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.</p>	60 Menit
.3.	<p>Penutup</p> <p>1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>2) Guru memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman.</p> <p>3) Guru menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini.</p> <p>4) Guru memberikan tugas untuk minggu selanjutnya.</p> <p>5) Guru memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutupkegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karenatelah berjalan baik dan lancar.</p>	10 Menit

Penilaian

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
Menjelaskan hasil temuan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila.	a. Berikan contoh praktik penyelenggaraan Negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.		Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

3. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Teknik penilaian

- Penilaian sikap sosial dan spriritual

Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok. Sedangkan dalam penilaian spriritual dapat dilihat dengan pengamatan seberapa jauh siswa menghargai dan mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- Penilaian kognitif/ tes tertulis

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana peserta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.
- Penilaian keterampilan.

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.

b. Instrumen Penilaian

a. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual, Sosial dan Keterampilan

Petunjuk : jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

Nama	Rubrik Penilaian				
	Peserta didik besyuk	Peserta didik turut menjaga	Peserta didik memperhatikan	Peserta didik senantiasa menumbuhk	Peserta didik dengan cepat dan tanggap

	ur kepada Tuhan YME atas segala nikmat yang diberika n dan senanti asa selalu bersyuk ur adanya praktik penyele nggara an pemerin tah Negara	Mengharg ai nilai- nilai pengabdia n kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memahami praktik penyeleng garaan Negara	kan dengan baik selama proses pembelajara n	an rasa ingin tahu dengan cara memberi pendapat atau bertanya saat diskusi berlangsung	menjawab atas pertanyaan yang diajukan saat diskusi kelas
Aderian					
Aldi					
Amanur					
Anita					
Aura					
Bagas					
Dhyana					
Elizabet					
Faiza					
Farah					
Hany					
Huzaifatin					
Ilham Nur					
Irfan Aldi					
Isra'im					
Jowinka					
Marheni					
Mellania					

Nafizah					
Nourma					
Rachma					
Reynaldo					
Ridho					
Risma					
Sekar Arum					
Shibhotullo					
Shinta					
Titian Nur					
Tsabita					
Vera Intan					
Vica Rizky					
Yaswan					

- Remedial

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat di sesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.

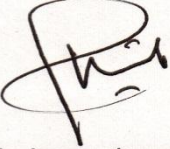
- Pengayaan

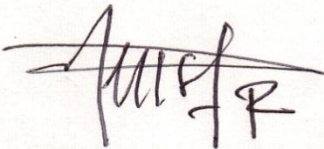
Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai Kedudukan Dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia.

Pada pertemuan selanjutnya diadakan Ulangan Harian 1.

Sleman, 21 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL

Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL

Lisa Ristyaningsih
NIM 13401244017

LAMPIRAN

Beberapa Contoh Pelanggaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara

Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi, dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai contohnya dapat dilihat pada penyelenggaraan negara. Ada beberapa kejadian mengenai pelanggaran Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara, salah satu contohnya adalah pengaduan gugatan terhadap Undang-Undang (UU). Pengaduan gugatan Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada beberapa periode antara 2003-2012 ada ser 400 pengaduan. Pengaduan tersebut terkait dengan adanya indikasi pelanggaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang yang dirancang. Beberapa kasus pengaduan tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi kemudian di proses dan ser 27 persen dibatalkan. Pembatalan Undang-Undang tersebut dilakukan, karena sebagian besar didapatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa yang paling membahayakan pada saat ini bukan hanya korupsi uang atau kekayaan negara, melainkan juga korupsi dalam pembuatan peraturan kebijakan. Berbagai kejadian pelanggaran ini akan terus berlangsung, maka akan timbul kasus korupsi yang berkesinambungan. Korupsi pada peraturan dan kebijakan akan memunculkan banyak korupsi karena peraturan dan kebijakan dijadikan sebagai sumber. Ada dua kelompok besar bentuk korupsi peraturan dan kebijakan, yaitu menyangkut masalah politik dan korupsi. Beberapa Undang-Undang yang diindikasikan adanya praktik korupsi adalah Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Selain itu, ada pula potensi dalam peraturan kebijakan dalam hal sumber daya alam, misalnya Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perhutanan, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam. Undang-Undang mengenai Sumber Daya Alam disinyalir sengaja dibuat untuk memberi peluang korupsi. Undang-Undang yang dibuat tersebut agar orang atau institusi bisa korupsi. Pada praktiknya, beberapa Undang-Undang tersebut membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan kasus pada pelanggaran dalam pembuatan Undang-Undang tersebut, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam mengkritisi penyelenggara negara. Sangat sulit hanya mengandalkan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki Undang-Undang yang ada. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak akan memproses Undang-Undang sebelum ada pengaduan dari luar. Oleh karena itu, perlu tindakan yang terstruktur oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan akademisi dan masyarakat untuk membahas kembali Undang-Undang yang bermasalah.

Pada kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara tersebut dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat yang dimaksud bukan otoriter, kuat artinya memiliki tujuan jelas, aturan hukum yang jelas, dan siap menindak segala hal yang salah. Ada beberapa pendapat tokoh mengenai permasalahan pelanggaran dalam Undang-Undang. Salah satu tokoh tersebut adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengusulkan agar pembahasan Undang-Undang yang bermasalah melibatkan orang-orang bijak yang tidak terlibat politik praktis. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut

bisa dibahas secara obyektif. Pancasila tidak akan bisa membumi jika hanya dijadikan mitos tanpa model praktis dalam memecahkan masalah hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila perlu di kembangkan sebagai metodologi hidup atau ideologi praktis. Pada saat ini tidak ada lembaga yang menangani aplikasi Pancasila. Bahkan dalam pendidikan, Pancasila bukan menjadi pelajaran wajib. Apabila Pancasila tidak lagi menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat maka berarti telah sengaja meminggirkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Nilai-Nilai Pancasila;

1. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

2. Nilai Falsafah Hidup Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya Bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia yang berkembang akibat usaha bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan esensial yang menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

3. Nilai Ideologi Ideologi negara dalam arti cita-cita negara memiliki ciri-ciri sebagai diantaranya mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Mewujudkan satu asas kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup yang harus di pelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, di perjuangkan dan dipertahankan. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Hal ini dibuktikan dari

adanya sifat-sifat yang melekat pada Pancasila maupun kekuatan yang terkandung di dalamnya, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas tiga dimensi, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara nyata hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat dan atau bangsanya menjadi volkgeits/jiwa bangsa). Dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Dimensi fleksibilitas/dimensi pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

4. Nilai Jiwa Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa . Demikianlah, maka Pancasila yang gali dari bumi Indonesia sendiri salah satunya yaitu merupakan Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

5. Nilai Pandangan Hidup Pengertian pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, dimana dengan aturan aturan yang di buat untuk mencapai yang di cita citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.

Manfaat Pancasila sebagai pendangan hidup diantaranya :

- a. Kekokohan dan tujuan, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan pandangan hidup.
- b. Pemecahan masalah, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan.

c. Pembangunan diri, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, social dan budaya dalam gerak masyarakat yang makin maju dan akan membangun dirinya.

Pancasila sebagai isi pandangan hidup :

a. Konsep dasar, dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar ialah pikiran – pikiran yang di dalamnya terkandung gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik yang dicita citakan suatu bangsa

b. Pikiran dan gagasan, dalam pandangan hidup terkandung pula pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik

c. Kristalisasi dan nilai, pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Upaya Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Alfred North Whitehead (1864 – 1947), tokoh utama filsafat proses, berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus menerus “menjadi”, walaupun unsur permanensi realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat pula dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas (pengada). Moerdiono (1995/ 1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya.

Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh

pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. Bahkan Moerdiono (1995/1996: 15) mengemukakan, bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum- universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Driyarkara (dalam Suwarno, 1993: 110- 111) mengemukakan proses pelaksanaan ideologi Pancasila, dengan gambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis (berupa konsep, teori) menjadi kategori imperatif (berupa norma-norma) dan kategori operatif (berupa praktik hidup). Proses transformasi berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan, yang berupa pengurangan, penambahan, dan penggantian.

Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praktis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak tepat membuat "sakral" dan taboo berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu diubah, beberapa lagi mungkin

perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dynamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kemenjadian yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi; wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi; faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis (Suwarno, 1993: 126). Pembaharuan dan perubahan bukanlah melulu bersumber dari satu sisi saja, yaitu akibat yang timbul dari dalam, melainkan bisa terjadi karena pengaruh dari luar. Terjadinya proses perubahan (dinamika) dalam aktualisasi nilai Pancasila tidaklah semata-mata disebabkan kemampuan dari dalam (potensi) dari Pancasila itu sendiri, melainkan suatu peristiwa yang terkait atau berelasi dengan realitas yang lain. Dinamika aktualisasi Pancasila bersumber pada aktivitas di dalam menyerap atau menerima dan menyingkirkan atau menolak nilai-nilai atau unsur-unsur dari luar (asing). Contoh paling jelas dari terjadinya perubahan transformatif dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adalah empat kali amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002. Dewasa ini, akibat kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, terjadilah perubahan pola hidup masyarakat yang begitu cepat. Tidak satupun bangsa dan negara mampu mengisolir diri dan menutup rapat dari pengaruh budaya asing. Demikian juga terhadap masalah ideologi. Dalam kaitan ini, Habib Mustopo (1992: 11 -12) mengemukakan, bahwa pergeseran dan perubahan nilai-nilai akan menimbulkan kebimbangan, terutama didukung oleh kenyataan masuknya arus budaya asing dengan berbagai aspeknya. Kemajuan di bidang ilmu dan teknologi komunikasi & transportasi ikut mendorong hubungan antar bangsa semakin erat dan luas. Kondisi ini di satu pihak akan menyadarkan bahwa kehidupan yang mengikat kepentingan nasional tidak luput dari pengaruhnya dan dapat menyinggung

kepentingan bangsa lain. Ada semacam kearifan yang harus dipahami, bahwa dalam kehidupan dewasa ini, teknologi sebagai bagian budaya manusia telah jauh mempengaruhi tata kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam keadaan semacam ini, tidak mustahil tumbuh suatu pandangan kosmopolitan yang tidak selalu sejalan dengan tumbuhnya paham kebangsaan. Beberapa informasi dalam berbagai ragam bentuk dan isinya tidak dapat selalu diawasi atau dicegah begitu saja. Mengingkari dan tidak mau tahu tawaran atau pengaruh nilai-nilai asing merupakan kesesatan berpikir, yang seolah-olah menganggap bahwa ada eksistensi yang bisa berdiri sendiri. Kesalahan berpikir demikian oleh Whitehead disebut sebagai the fallacy of misplaced concreteness (Damardjati Supadjar, 1990: 68). Jika pengaruh itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, atau tidak mendukung bagi terciptanya kondisi yang sesuai dengan Pancasila, maka perlu dikembangkan sikap yang kritis terutama terhadap gagasan-gagasan, ide-ide yang datang dari luar. Dalam konteks budaya, masalah pertemuan kebudayaan bukan masalah memfilter atau menyaring budaya asing, tetapi mengolah dan mengkreasi dalam interaksi dinamik sehingga tercipta sesuatu yang baru. Jati diri bangsa, budaya politik adalah sesuatu yang harus terus menerus dikonstruksikan, karena bukan kenyataan yang mandeg (Sastrapradja, 1996: 11). Kalau ideologi-ideologi besar di dunia sekarang ini diperhatikan dengan seksama, maka terlihat mereka bergeser secara dinamik. Para penyangga ideologi itu telah melakukan revisi, pembaharuan, dan pemantapan-pemantapan dalam mengaktualisasikan ideologinya. Perkembangan zaman menuntut bahwa ideologi harus memiliki nafas baru, semangat baru dengan corak nilai, ajaran dan konsep kunci mengenai kehidupan yang memiliki perspektif baru. Ideologi Pancasila pun dituntut demikian. Pancasila harus mampu menghadapi pengaruh budaya asing, khususnya ilmu dan teknologi modern dan latar belakang filsafatnya yang berasal dari luar. Notonagoro telah menemukan cara untuk memanfaatkan pengaruh dari luar tersebut, yaitu secara eklektif mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilosofan dari luar tersebut, tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diinkorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila. Dengan demikian, terhadap pengaruh baru dari luar, maka Pancasila bersifat terbuka dengan syarat dilepaskan dari sistem filsafatnya, kemudian dijadikan unsur yang serangkaian dan memperkaya struktur filsafat Pancasila (Sri Soeprapto, 1995: 34). Sepaham dengan Notonagoro, Dibyasuharda (1990: 229) mengkualifikasikan Pancasila sebagai struktur atau sistem yang terbuka dinamik, yang dapat menggarap apa yang datang dari luar, dalam arti luas, menjadi miliknya tanpa mengubah identitasnya, malah mempunyai daya ke luar, mempengaruhi dan mengkreasi. Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila ada daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pandangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya di masa mendatang. Sedangkan penerapan atau penolakan terhadap nilai-nilai budaya luar tersebut berdasar pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan pengembangan ideologi, bukan hanya Pancasila yang menyerap atau dipengaruhi oleh nilai-nilai asing, namun nilai-nilai Pancasila bisa ditawarkan dan berpengaruh, serta menyokong kepada kebudayaan atau ideologi lain. Bahkan Soerjanto Poespowardjo (1989: 14) menjelaskan, bahwa dinamika yang ada pada aktualisasi Pancasila memungkinkan bahwa Pancasila juga tampil sebagai alternatif untuk melandasi tata kehidupan internasional, baik

untuk memberikan orientasi kepada negara-negara berkembang pada khususnya, maupun mewarnai pola komunikasi antar negara pada umumnya. Ideologi Pancasila bukanlah pseudo religi. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijabarkan secara rasional dan kritis agar membuka iklim hidup yang bebas dan rasional pula. Konsekuensinya, bahwa Pancasila harus bersifat terbuka. Artinya, peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan arti dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar. Dengan begitu ideologi Pancasila akan menunjukkan sifatnya yang dinamik, yaitu memiliki kesediaan untuk mengadakan pembaharuan yang berguna bagi perkembangan pribadi manusia dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan masa depan perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik. Kreativitas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyeleksi nilai-nilai baru dan mencari alternatif bagi pemecahan masalah-masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ideologi Pancasila tidak a priori menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing, melainkan mampu menyerap nilai-nilai yang dipertimbangkan dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Menurut Hardono Hadi (1994: 57), bangsa Indonesia, sebagai pengemban ideologi Pancasila, tidak defensif dan tertutup sehingga sesuatu yang berbau asing harus ditangkal dan dihindari karena dianggap bersifat negatif. Sebaliknya tidak diharapkan bahwa bangsa Indonesia menjadi begitu amorf, sehingga segala sesuatu yang menimpa dirinya diterima secara buta tanpa pedoman untuk menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk diintegrasikan dalam pengembangan dirinya.

Bangsa Indonesia mau tidak mau harus terlibat dalam dialog dengan bangsa-bangsa lain, namun tidak tenggelam dan hilang di dalamnya. Proses akulturasi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia juga dituntut berperan aktif dalam pergaulan dunia. Bangsa Indonesia harus mampu ikut bermain dalam interaksi mondial dalam menentukan arah kehidupan manusia seluruhnya. Untuk bisa menjalankan peran itu, bangsa Indonesia sendiri harus mempunyai kesatuan nilai yang menjadi keunikan bangsa, sehingga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam percaturan internasional. Identitas diri bukan sesuatu yang tertutup tetapi sesuatu yang terus dibentuk dalam interaksi dengan kelompok masyarakat bangsa, negara, manusia, sistem masyarakat dunia (Sastrapratedja, 1996: 3). Semuanya itu mengharuskan adanya strategi kebudayaan yang mampu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan bangsa. Abdulkadir Besar (1994: 35) menawarkan pelaksanaan “strategi dialogi antar budaya” dalam menghadapi gejala penyeragaman atau globalisasi dewasa ini.. Artinya, membiarkan budaya asing yang menggglobal berdampingan dengan budaya asli. Melalui interaksi yang terus menerus, masing-masing budaya akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Hasil akhir yang diharapkan dari interaksi itu adalah terpeliharanya cukup diferensiasi, sekaligus tercegahnya penyeragaman universal. Ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia tidak mandeg, melainkan harus diperbaharui secara terus menerus, sehingga mampu memberikan pedoman, inspirasi, dan dukungan pada setiap anggota bangsa Indonesia dalam memperkembangkan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan pembaharuan yang sehat selalu bertitik tolak pada masa lampau dan

sekaligus diarahkan bagi terwujudnya cita-cita di masa depan. Setiap zaman menampilkan corak kepribadiannya sendiri, namun kepribadian yang terbentuk pada zaman yang berbeda haruslah mempunyai kesinambungan dari masa lampau sampai masa mendatang sehingga menggambarkan aspek historitasnya (Hardono Hadi, 1994: 76). Kesinambungan tidak berarti hanya pengulangan atau pelestarian secara persis apa yang dihasilkan di masa lampau untuk diterapkan pada masa kini dan masa mendatang. Unsur yang sama dan permanen maupun unsur yang kreatif dan baru, semuanya harus dirajut dalam satu kesatuan yang integral. Teori hilemorfisme dari Aristoteles bisa mendukung pandangan tersebut. Aristoteles menegaskan, bahwa meskipun materi (hyle) menjadi nyata bila dibentuk (morfe), namun materi tidaklah pasif. Artinya ada gerak. Setiap relitas yang sudah berbentuk (berdasar materi) dapat juga menjadi materi bagi bentuk yang lain, sehingga setiap realitas mengalami perubahan. Perubahan yang ada bukan kebaruan sama sekali namun perubahan yang kesinambungan. Artinya, aktualitas yang ada sekarang berdasar pada realitas yang telah ada pada masa lampau dan terbuka bagi adanya perubahan di masa depan. Sebagai suatu paradigma, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Pancasila yang merupakan satuan dari sila-silanya harus menjadi sumber nilai, kerangka berfikir, serta asas moralitas bagi pembangunan. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi secara obyektif dan subyektif. Aktualisasi Pancasila secara obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan Negara, bidang politik, bidang ekonomi dan bidang hukum. Sedangkan aktualisasi Pancasila secara subyektif yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

A. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial-budaya, dan Hukum di Era Globalisasi Pancasila itu menggambarkan Indonesia, Indonesia yang penuh dengan nuansa plural, yang secara otomatis menggambarkan bagaimana multikulturalnya bangsa . Ideologi Pancasila hendaknya menjadi satu panduan dalam berbangsa dan bernegara. Para founding father dengan cerdas dan jitu telah merumuskan formula alat perekat yang sangat ampuh bagi negara bangsa yang spektrum kebhinekaannya teramat lebar (multifacet natio state) seperti Indonesia. Alat perekat tersebut tiada lain daripada Pancasila yang berfungsi pula sebagai ideologi, dasar negara serta jatidiri bangsa. Sampai kini Pancasila diyakini sebagai yang terbaik dari sekian alternatif yang ada, merupakan ramuan yang tepat dan mujarab dalam mempersatukan bangsa, sehingga Syafi'i Maarif menyebutnya sebagai "Indonesia Masterpiece" (karya agung bangsa Indonesia). Namun demikian Pancasila tidak akan dapat memberimanfaat apapun manakala keberadannya hanya bersifat sebagai konsep atau software belaka. Untuk dapat berfungsi penuh sebagai perekat bangsa. Pancasila harus diimplementasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pancasila), dan dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya. 1. Bidang Politik Landasan aksiologis (sumber nilai) system politik Indonesia adalah dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV "..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia". Sehingga sistem politik Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Dimana demokrasi Pancasila itu merupakan system pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat: a. Kebebasan, terbagikan/terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan. b. Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kontrol publik. c. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. d. Supremasi hukum. Begitu pula standar demokrasinya yang : a. Bermekanisme „checks and balances“, transparan, akuntabel, b. Berpihak kepada „social welfare“, serta c. Meredam konflik dan utuhnya NKRI. Perbaiki moral tiap individu yang berimbas pada budaya anti-korupsi serta melaksanakan tindakan sesuai aturan yang berlaku adalah sedikit contoh aktualisasi Pancasila secara Subjektif. Aktualisasi secara objektif seperti perbaikan di tingkat penyelenggara pemerintahan. Lembaga-lembaga negara mesti paham betul bagaimana bekerja sesuai dengan tatanan Pancasila. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus terus berubah seiring tantangan zaman. (Kompas, 01 April 2003). "Demokrasi sebagai suatu sistem kehidupan didalam masyarakat dijamin keelaluasaannya untuk mengekspresikan kepentingan". Pada kalimat itulah yang kemudian berkembang bahwa kepentingan kelompok cenderung akan lebih besar daripada kepentingan nasional. Demi kepentingan kelompok/ partai, mereka rela menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan untuk memperbesar cengkeramannya pada upaya penguasaan bangsa. Pada kenyataannya kepentingan rakyat dan kepentingan Nasional justru diabaikan pada hal mereka itu adalah konstituen yang harusnya mendapat perhatian dan kesejahteraan. Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebih (The Real Executive) yang melahirkan budaya Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga terjadi krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan. Ini bisa dilihat betapa banyaknya pejabat yang mengidap penyakit "amoral" meminjam istilah Sri Mulyani-moral hazard. Hampir tiap komunitas (BUMN maupun BUMS), birokrasi, menjadi lumbung dan sarang "bandit" yang sehari-hari menghisap uang negara dengan praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sejak Republik Indonesia berdiri, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme selalu muncul ke

permukaan. Berbagai macam usaha dan program telah dilakukan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman bagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuat mereka kapok atau gentar. Mengapa tidak diterapkan, misalnya hukuman mati atau penjara 150 tahun bagi yang terbukti. Para elit politik dan golongan atas seharusnya konsisten memegang dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dalam era globalisasi saat ini, pemerintah tidak punya banyak pilihan. Karena globalisasi adalah sebuah kepastian sejarah, maka pemerintah perlu bersikap. "Take it or Die" atau lebih dikenal dengan istilah "The Death of Government". Kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera diubah menjadi public services management

2. Bidang Ekonomi Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki aset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak. Sehingga perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Selain itu ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan.

Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan. Pilar Sistem Ekonomi Pancasila yang meliputi: 1. Ekonomika etik dan ekonomika humanistik. 2. Nasionalisme ekonomi & demokrasi ekonomi 3. Ekonomi berkeadilan sosial. Namun pada kenyataannya, sejak pertengahan 1997 krisis ekonomi yang menimpa Indonesia masih terasa hingga hari ini. Di tingkat Asia, Indonesia yang oleh sebuah studi dari The World Bank (1993) disebut sebagai bagian dari Asia miracle economics, the unbelievable progress of development, ternyata perekonomiannya tidak lebih dari sekedar economic bubble, yang mudah sirna begitu diterpa badai krisis (World Bank, 1993). Krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia Orde Baru dan Orde Lama yang dialami sekarang ini telah mencuatkan tuntutan reformasi total dan mendasar (radically). Bermula dari krisis moneter (depresi rupiah) merambah ke lingkungan perbankan hingga ke lingkup perindustrian. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diterapkan tidak membumi, hanya sebatas "membangun rumah di atas langit" dan akibatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

menjadi tersingkirkan. Rakyat masih terus menjadi korban kegagalan kebijakan pemerintah. Potret perekonomian Indonesia semakin buram, memperhatikan kebijakan pemerintah yang selalu “pasrah” dengan Bank Dunia atau pun International Monetary Fund (IMF) dalam mencari titik terang perbaikan ekonomi Indonesia. Belum lagi menumpuknya utang luar negeri semakin menghimpit nafas bangsa Indonesia, sampai-sampai seorang bayi baru lahir pun telah harus menanggung hutang tidak kurang dari 7 juta rupiah. Seorang pengamat Ekonomi Indonesia, Laurence A. Manullang, mengemukakan bahwa selama bertahun-tahun berbagai resep telah dibuat untuk menyembuhkan penyakit utang Internasional, tetapi hampir disepakati bahwa langkah pengobatan yang diterapkan pada krisis utang telah gagal. Fakta yang menyedihkan adalah Indonesia sudah mencapai tingkat ketergantungan (kecanduan) yang sangat tinggi terhadap utang luar negeri. Sampai sejauh ini belum ada resep yang manjur untuk bisa keluar dari belitan utang. Penyebabnya adalah berbagai hambatan yang melekat pada praktik yang dijalankan dalam sistem pinjaman internasional, tepatnya negara-negara donor (Bogdanowicz-Bindert, 1993). Keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk segera memasuki industrialisasi dengan meninggalkan agraris, telah menciptakan masalah baru bagi national economic development. Bahkan menurut sebagian pakar langkah Orde baru dinilai sebagai langkah spekulatif seperti mengundi nasib, pasalnya, masyarakat Indonesia yang sejak dahulu berbasis agraris Sebagai konsekuensinya, hasil yang didapat, setelah 30 tahun dicekoki ideologi „ekonomisme” itu justru kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin merosot tajam (dekadensia). Jika hingga saat ini kualitas perekonomian belum menampakkan perubahan yang signifikan, tidak menutup kemungkinan, akan mendapat pukulan mahadasyat dari arus globalisasi. Kekhawatiran ini muncul, karena pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat lemah masih parsial dan cenderung dualisme, antara kemanjaan (ketergantungan) pemerintah kepada IMF, sementara keterbatasan akomodasi bentuk perekonomian masyarakat yang tersebar (diversity of economy style) di seluruh pelosok negeri tidak tersentuh. Hal ini juga terlihat jelas pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak proporsional, tidak mencerminkan model perekonomian yang telah dibangun oleh para Founding Father terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus, misalnya, pencabutan subsidi di tengah masyarakat yang sedang sulit mencari sesuap nasi, mengelabui masyarakat dengan raskin (beras untuk rakyat miskin), atau jaring pengaman sosial (JPS) lain yang selalu salah alamat.

3. Bidang Sosial Budaya Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005: 172) Aktualisasi Pancasila dalam bidang social budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya (keadaban) Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras-serasi- seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma/aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan/ dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatkan kembali proses integrasi nasional baik secara vertical maupun horizontal.

Begitu luasnya cakupan kebudayaan tetapi dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal Iptek dan pola hidup, perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia. Seperti terjadinya pergeseran gaya hidup (life style) yang oleh sejumlah pakar gejala ini termasuk jenis kemiskinan sosial-budaya. Beberapa indikasi dapat dikemukakan di sini, antara lain: manusia hidup cenderung materialistik dan individualistik, menurunnya rasa solidaritas, persaudaraan, rasa senasib-sepenanggungan, keharusan mengganti mata pencaharian, pelecehan terhadap institusi adat, dan bahkan pengikisan terhadap nilai-nilai tertentu ajaran agama. Ciri ini telah ada dan berkembang hingga ke daerah-daerah. Dulu masih dapat dinikmati indahnya hubungan kekeluargaan (silaturahmi), realitas sekarang semua itu sudah tergantikan dengan komunikasi jarak jauh. Misalnya, kebiasaan berkunjung ke daerah untuk merayakan lebaran atau hari-hari penting lainnya, telah tergantikan dengan telpon atau e-mail. Mestinya kondisi ini tidak perlu terjadi pada bangsa yang dikenal ramah, santun, dan religius. Perubahan sosial berikutnya bahwa pluralitas tidak terfokus hanya pada aspek SARA, tetapi dimasa yang akan datang kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ditandai dengan adanya sinergi dari peran, fungsi dan profesionalisme individu atau kelompok. Sehingga kontribusi profesi individu/kelompok itulah yang akan mendapat tempat dimanapun mereka berprestasi. Ini menunjukkan bahwa filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu sampai pada tingkat akal, rasa dan kehendak manusia.

4. Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan hankam. Pertahanan dan keamanan harus diletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Pertahanan dan Keamanan, Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of appreciation akan mengandung fungsi-fungsi sebagai: the line at which supervision should give way to State's discretion in enacting or enforcing its law, striking (menemukan) a balance between a right guaranteed and a permitted derogation (limitation), Move principle of justification than interpretation, Preventing unnecessary restriction, To avoid damaging dispute, A Uniform Standard of Protection, Gives flexibility needed to avoid damaging confrontations.

□ [19.](#) Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang hukum akan mewarnai segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa "law making process", struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan "law enforcement" maupun budaya hukum yang berkaitan dengan "law awareness". Peranan Pancasila sebagai margin of

appreciation yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasinya telah terjadi pada: 1. Pada saat dimantapkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada saat 4 kali proses amendemen 2. Pada saat merumuskan HAM dalam hukum positif Indonesia 3. Pada saat proses internal di mana The Founding Fathers menentukan urutan Pancasila. Mengingat TNI sebagai bagian integral bangsa Indonesia senantiasa memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional berperan serta mewujudkan keadaan aman dan rasa aman masyarakat, sesuai perannya sebagai alat pertahanan NKRI. TNI sebagai bagian dari rakyat berjuang bersama rakyat, senantiasa menggugah kepedulian TNI untuk mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi, juga terwujudnya hubungan sipil militer yang sehat dan persatuan kesatuan bangsa melalui pemikiran, pandangan, dan langkah-langkah reformasi internal ini. Beberapa arah kebijakan negara yang tertuang dalam GBHN, dan yang harus segera direalisasikan, khususnya dalam bidang hukum antara lain:

1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui Undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiaannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
2. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan para penegak hukum, termasuk Kepolisian RI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
3. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
4. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Satu hal yang perlu garis bawahi, bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya semua lembaga, institusi maupun person yang ada di dalamnya harus tunduk dan patuh pada hukum. Maka ketika hukum di Indonesia betul-betul ditegakkan dengan tegas, dan dikelola dengan jujur, adil dan bijaksana, maka negeri ini akan makmur dan tentram.

C. Membangun Kembali Paradigma Pancasila Melalui Komonikasi Partisipatoris Komonikasi yang partisipatoris adalah kritik yang dibangun atas krisis legitimasi terhadap corak kepemimpinan negara yang tidak memihak pada kepentingan rakyat. Kritik itu pertama kali dalam ideologi Marxian, ideologi neo-Marxian, Teo Adorno, Horkeimer, bahkan mereka yang sekarang tergolong dalam Mazhab Frankfurt. Kritik diatas kritik dicari dalam menyetarakan atau memberi jalan keseimbangan antara komonikasi dengan tindakan. Antara pejabat dan rakyat dalam kerangka undang- undang yang tidak multitafsir dan pemihakan pada satu kepentingan. Undang-undang dibuat konkret dengan melibatkan secara langsung rakyat, dengan alur komonikasi partisipatoris antara rakyat dengan pejabat perancang undang-undang. Maka diperlukan organ yang dapat mewakili kepentingan rakyat dan parlemen. Kepentingan ini harus dibawah oleh seorang pejabat yang tidak membawa embel partai, mereka diangkat adalah karena keahlian akademik, disamping itu diperlukan organ atau lembaga dari elemen teleologik. Hanya dengan cara demikian, ground norm Pancasila akan tampak dalam kerangka abstraksi teoritikal untuk semua rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang

dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *stufenbau theory*-nya. Disamping itu, setiap nilai-nilai filsufis dan aktualisasi Pancasila yang dikonkretkan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Memerlukan cara radikal dan keseriusan untuk, tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai “slogan”, lambang, dan “simbol mati” untuk dipraktikkan dalam tatanan politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Kesenjangan, korupsi yang “membudaya” dan deviasi keuangan yang terjadi di setiap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah hari dimana akan lahir sejarah ketidakpercayaan pada ideologi Pancasila. Oleh karena itu dari kacamata penulis sendiri kegoncangan nilai persatuan yang dibalut dalam pakem agama, tidak sah sila pertama. Semata-mata tidak disebabkan oleh faktor karakter individu yang radikal dan dipandang ekstrim atas agama yang dianutnya. Dengan komunikasi yang partisipatoris, peningkatan kesejahteraan, penguatan institusi hukum melalui re-aktualisasi kepercayaan publik atas penegakan hukum penting dihadirkan agar tidak terjadi mafia politik, mafia hukum, mafia demokrasi, dan mafia pajak. Sepertinya hilang sosok “pejabat yang teladan” untuk dijadikan alat ukur, dalam menilai bahwa ia telah membawa harapan menegakkan semua nilai-nilai aktual yang diabstraksikan dan diejawantahkan oleh Pancasila sebagai landasan filsufis, normatif, dan praktis. Hanya dengan komunikasi yang partisipatif, akan terlahirkan pluralisme dan multikulturalisme yang termaktub dalam sila pertama. Hanya dengan demokrasi yang mensejahterakan akan tercipta persatuan dalam negara yang terdiri dari beberapa kepulauan. Hukum yang tegak akan menciptakan kesejahteraan dalam memulihkan luka lama dari tidur panjang, karena telah melupakan nilai Pancasila agar diaktualisasikan demi tegaknya keadilan seperti yang diurai oleh “semiotik” dewi Themis keadilan sejak pertama kali term “adil,” ramai diimpikan oleh bangsa Yunani dan Romawi kuno. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warganegara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Tidak ada yang dapat mengelakan arus globalisasi yang menghampiri bahkan negeri ini, globalisasi adalah tantangan bangsa ini yang bermula dari luar dan tentunya memberikan tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi bangsa ini. Ketika globalisasi tidak disikapi dengan cepat dan tepat maka hal ini akan mengancam eksistensi sebagai sebuah bangsa. Indonesia sesungguhnya memiliki satu pamungkas yang menyatukan sekian potensi lokal dalam sebuah perahu untuk mengarungi arus globalisasi, yakni Pancasila. Namun dengan begitu derasnya arus globalisasi yang menerpa bangsa ini, seakan memudahkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dapat diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum. Dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila baik secara internal maupun dalam sudut praktik (politik, ekonomi, sosial-budaya dan hukum) penting untuk membangun komunikasi yang partisipatoris antara pejabat pemerintah dan rakyat agar pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tercapai dalam keseimbangan (*balance*) antara pemerintah dan rakyat sebagai elemen yang penting bagi negara (*state*)..

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMA N 1 Mlati
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X/1 (Satu)
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1x Pertemuan)
Tema :Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	1.2 menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga	<div>1.2.1 Peserta didik mampu memahami ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara.</div> <div>1.2.2 Peserta didik mensyukuri keberadaan Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang</div>

	negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil	Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>2.2.1 Peserta didik menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara.</p> <p>2.2.2 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang batas-batas wilayah Negara Indonesia.</p> <p>2.2.3 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi tentang Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
	3.2 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur Wilayah Negara</p> <p>3.1.2 Peserta didik menganalisis batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>3.1.3 Peserta didik menganalisis Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>
	4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-	4.2.1 Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam

	undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	<p>UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara Indonesia.</p> <p>4.2.2 Peserta didik mampu mengkritisi tentang batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>4.2.3 Peserta didik mampu mengkritisi Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>
--	--	--

C. Materi Pembelajaran

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Media, Alat / Bahan dan Sumber Belajar

- Media : Tayangan Video, Power Point
- Alat / Bahan : LCD, Laptop, *White Board*, Spidol.
- Sumber belajar : -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X: buku Guru/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.

Kegiatan Inti

No	Rincian Kegiatan	Waktu
.1.	<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat sertabuku yang diperlukan). 2) Guru memberi motivasi dan bersyukur karena siswa dianggap sudah berhasil menguasai materi pada bab sebelumnya. 3) Apersepsi (menanyakan materi sebelumnya yang terkait dengan materi sekarang) 4) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 5) Guru menyampaikan topik Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tentang Wilayah Negara 	10 Menit

	Kesatuan Indonesia.	
.2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>Mengamati</p> <p>1) Siswa mengamati tayangan video/film/gambar, Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab tentang materi Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Menanya</p> <p>2) Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari terkait dengan gambar/video. Masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda.</p> <p>3) Guru dapat memberikan bantuan berupa kata tanya, atau potongan pertanyaan yang dilengkapi oleh peserta didik.</p> <p>Mengumpulkan Informasi</p> <p>4) Peserta didik secara berkelompok dianjurkan untuk menggunakan sumber lain dari internet; web, media sosial lainnya dalam Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Mengasosiasikan</p> <p>5) Peserta didik melakukan analisis/diskusi Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Mengomunikasikan</p> <p>6) Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya.</p> <p>7) Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.</p>	60 Menit
.3.	<p>Penutup</p> <p>1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>2) Guru memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman.</p> <p>3) Guru menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini.</p> <p>4) Guru memberikan tugas untuk minggu selanjutnya.</p> <p>5) Guru memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutupkegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karenatelah berjalan baik dan lancar.</p>	20 Menit

Penilaian

Tugas Kelompok 2.1

Setelah kalian membaca dan memahami uraian di atas kerjakanlah tugas di bawah ini. 1. Coba kalian lakukan identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan di wilayah daratan lautan Indonesia. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
Menjelaskan batas-batas wilayah negara.	a. Negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia		Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10
	b. Negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia		Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

Tugas Pemahaman

Setiap wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain tentunya pernah mengalami beberapa permasalahan. Coba kalian identifikasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Presentasikan di depan guru dan teman kalian.

No	Permasalahan	Negara yang terlibat	Penyelesaian
1	Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.	Malaysia	Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian wilayah Malaysia.
2			
3			

4			
5			

E. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Teknik penilaian

- Penilaian sikap sosial dan spriritual
 Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok. Sedangkan dalam penilaian spriritual dapat dilihat dengan pengamatan seberapa jauh siswa menghargai dan mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- Penilaian kognitif/ tes tertulis
 Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana peserta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.
- Penilaian keterampilan.
 Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.

b. Instrumen Penilaian

a. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual, Sosial dan Keterampilan

Petunjuk : jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

	Rubrik Penilaian				
	Peserta didik bersyukur kepada Tuhan YME atas segala nikmat	Peserta didik turut menjaga Menghargai nilai-nilai pengabdian kepada Tuhan Yang	Peserta didik memperhatikan dengan baik selama proses pembelajaran	Peserta didik senantiasa menumbuhkan rasa ingin tahu dengan cara memberi pendapat atau bertanya	Peserta didik dengan cepat dan tanggap menjawab atas pertanyaan yang diajukan saat diskusi kelas
Nama					

	yang diberika n dan senanti asa selalu bersyuk ur Adanya ketentu an dalam UU yang mengat ur perbata san- perbata san wilayah negara dan Kekuas aan Negara atas Kekaya an Alam yang Terkan dung dalam Wilayah Negara Kesatu an Republi k	Maha Esa dengan memahami batas- batas wilayah Negara dan Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandun g dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia		saat diskusi berlangsung	
--	--	---	--	-----------------------------	--

	Indones ia				
Aderian					
Aldi					
Amanur					
Anita					
Aura					
Bagas					
Dhyana					
Elizabet					
Faiza					
Farah					
Hany					
Huzaifatin					
Ilham Nur					
Irfan Aldi					
Isra'im					
Jowinka					
Marheni					
Mellania					
Nafizah					
Nourma					
Rachma					
Reynaldo					
Ridho					
Risma					
Sekar Arum					
Shibhotull o					
Shinta					
Titian Nur					
Tsabita					
Vera Intan					
Vica Rizky					
Yaswan					

- Remedial

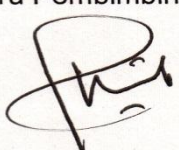
Remidial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi mengenai Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat di sesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.

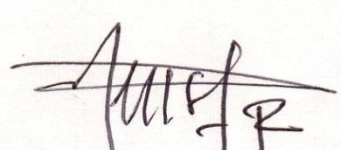
- **Pengayaan**

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi mengenai Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara.

Sleman, 21 Juli 2016

Mengetahui,

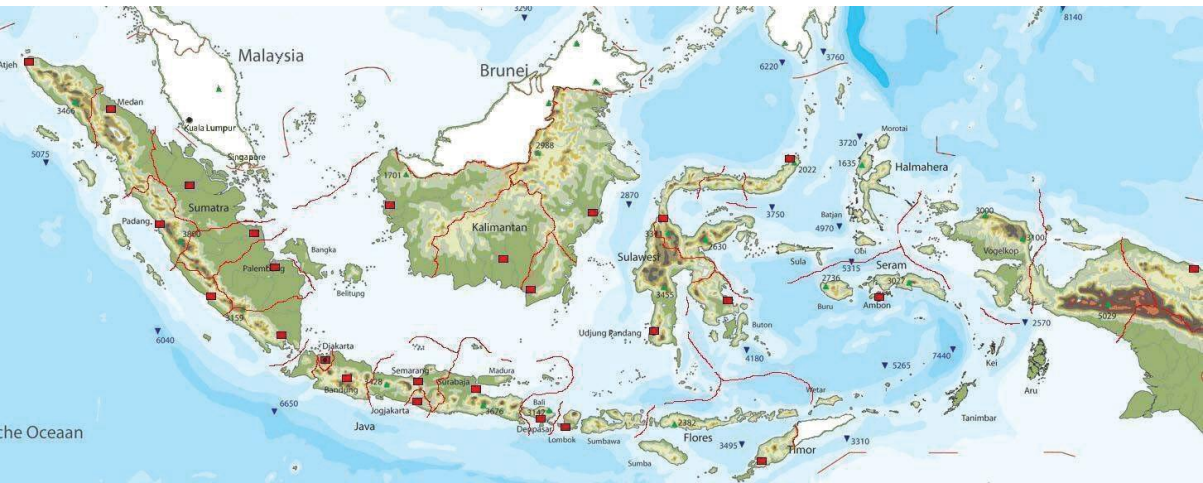
Guru Pembimbing PPL

Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL

Lisa Ristyaningsih
NIM 13401244017

LAMPIRAN

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Nah sekarang coba kalian amati gambar 2.2.



Setelah kalian mengamati gambar di atas, coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian jadikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan sebagai bahan diskusi.

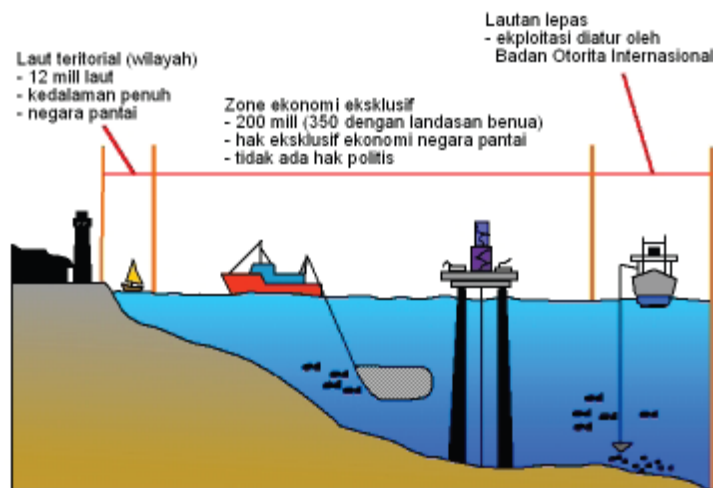
Nah, untuk memperlancar proses diskusi yang akan kalian lakukan, bacalah terlebih dahulu lanjutan pemaparan materi berikut ini. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang*. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia,

pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: *“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = *United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km², termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km², yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km². Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, rumput laut, kerang udang dan sebagainya) ada dan terkandung didalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional

yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.4 Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB, Tahun 1982
Berdasarkan gambar di atas, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu:

a. Zona Laut Teritorial

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

b. Zona Landas Kontinen

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologimerupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masingmasing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan

alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat

maupun daerah. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, terhampar ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Dengan demikian negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan

dan lautan. Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negaranegara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dimana dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

a. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan

Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati *batas-batas wilayah negara* keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

2. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wilayah Indonesia, terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beranekaragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Bukan hanya didaratan dan lautan di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak

bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa:

- 1) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- 2) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban kewajiban sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas/Semester : X/1

Materi Pokok : Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1x pertemuan)

I. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

II. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga	1.2.1 Peserta didik mampu memahami ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang status warga negara Indonesia. 1.2.2 Peserta didik mensyukuri keberadaan Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia

	<p>negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p>	<p>1.2.3 Peserta didik mensyukuri keberadaan adanya Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia.</p> <p>1.2.4 Peserta didik mensyukuri keberadaan Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia</p>
	<p>2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p>	<p>2.2.1 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang status warga negara Indonesia.</p> <p>2.2.2 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia.</p> <p>2.2.3 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia.</p> <p>2.2.4 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia</p>
	<p>3.2 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan,</p>	<p>3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur status warga negara Indonesia.</p> <p>3.1.2 Peserta didik menganalisis ketentuan undang-undang dasar yang mengatur asas-asas kewarganegaraan Indonesia</p>

	pertahanan dan keamanan	<p>3.1.3 Peserta didik menganalisis syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia.</p> <p>3.1.4 Peserta didik menganalisis pertahanan dan keamanan negara Indonesia Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia</p>
	4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	<p>4.2.1 Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang status warga Negara Indonesia.</p> <p>4.2.2 Peserta didik mampu mengkritisi tentang asas-asas menjadi warga negara Indonesia.</p> <p>4.2.3 Peserta didik mampu mengkritisi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia.</p> <p>4.2.4 Peserta didik mampu mengkritisi Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.</p>

- III. MATERI PEMBELAJARAN

 - Status Warga Negara Indonesia.
 - Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia.
 - Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia.
 - Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.

IV. MEDIA PEMBELAJARAN

- Video : Kedudukan Warga Negara dalam UUD 1945

- V. PERANGKAT /SUMBER PEMBELAJARAN

 - Undang-Undang Dasar 1945;
 - Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. xiv, 158. : illus. ; 25 cm.

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan I

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kelas agar kondusif 	3'

	<p>(berdoa dan absensi)</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar• Apersepsi• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>Sebelum peserta didik memahami kedudukan warga negara serta penduduk Indonesia, guru dapat menunjukkan ilustrasi/video konsep mengenai materi pembelajaran tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengamati<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik mengamati tayangan video.• Menanya<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik diminta untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatannya terhadap tayangan video tersebut. Guru dapat memberikan bantuan berupa kata tanya, atau potongan pertanyaan yang dilengkapi oleh peserta didik.• Mengeksplorasi<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik dibantu guru memfokuskan pada pertanyaan yang hendak dipecahkan.- Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk merancang eksperimen berdasarkan hipotesis yang mereka buat.- Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan.- Kelompok melakukan eksperimen berdasarkan rancangan yang telah mereka buat dengan bimbingan guru.• Mengasosiasikan	13'

	<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik berdiskusi untuk menganalisis data hasil eksperimennya.• Mengomunikasikan<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik mengomunikasikan proses dan hasil penyelidikannya.- Peserta didik menerima umpan balik dari guru dan/atau teman sekelas.	
3.	Penutup <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik (dengan atau tanpa bantuan guru) membuat rangkuman/simpulan pelajaran;• Kesimpulan<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan menerima umpan balik keterlibatannya dalam proses dan hasil pembelajaran.• Motivasi• Salam Penutup	4'

VII. PENILAIAN

1. Teknik Penilaian

a. Penilaian sikap

Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

b. Penilaian pengetahuan tes tertulis

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana peserta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.

c. Penilaian keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.

2. Instrumen Penilaian

a. Rubrik Penilaian Sikap dan Keterampilan

Petunjuk : jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

Nama	Rubrik Penilaian				
	Peserta didik bersyukur kepada Tuhan YME sebagai warga negara Indonesia	Peserta didik turut menjaga status kependudukannya sebagai warga negara Indonesia	Peserta didik memperhatikan dengan baik selama proses pembelajaran	Peserta didik senantiasa menumbuhkan rasa ingin tahu dengan cara memberi pendapat atau bertanya saat diskusi berlangsung	Peserta didik dengan cepat dan tanggap menjawab pertanyaan yang diajukan saat diskusi kelas
Aderian					
Aldi					
Amanur					
Anita					
Aura					
Bagas					
Dhyana					
Elizabeth					
Faiza					
Farah					
Hany					
Huzaifatin					
Ilham Nur					
Irfan Aldi					
Isra'im					
Jowinka					
Marheni					

Mellania					
Nafizah					
Nourma					
Rachma					
Reynaldo					
Ridho					
Risma					
Sekar Arum					
Shibhotullo					
Shinta					
Titian Nur					
Tsabit a					
Vera Intan					
Vica Rizky					
Yaswan					

b. Rubrik Penilaian Pengetahuan atau Tes Tertulis

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
Menyebutkan undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia.	Sebutkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia!	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia. b. Undang-Undang RI Nomor 2	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

		<p>Tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan Antara Indonesia dan RRC.</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1968 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946.</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p>	
Menguraikan bahwa kewarganegara	Selain melalui naturalisasi, uraikan cara	1. Kelahiran 2. Dikabulkan permohonan	Jawaban sempurna = 50,

an dapat di dapat melalui beberapa cara.	mendapatkan kewarganegaraan!	3. Akibat perkawinan 4. Ikut ayah dan ibu 5. Pernyataan	jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10
--	------------------------------	---	--

- Remedial

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi mengenai Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat di sesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.


- Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai meteri mengenai Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia.

Sleman, 21 Juli 2016

Mengetahui,

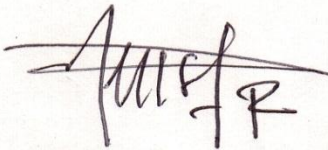
Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

LAMPIRAN

1. Syarat Warga Negara Indonesia

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian samakah pengertian rakyat dengan penduduk dan juga warga negara. Jawabannya berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni:

- a. **Penduduk dan bukan penduduk.** Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- b. **Warga negara dan bukan warga negara.** Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 - (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - (2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Dari uraian di atas menimbulkan suatu pertanyaan apakah setiap penduduk adalah Warga Negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari pada Warga Negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang-orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia.

Selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Oleh karena itu kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang paling banyak jumlahnya. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). Surat keterangan penduduk itu sangat penting, oleh karena itu apabila kalian sudah dewasa kelak (sudah mencapai usia 17 tahun), kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting ? Sebagai contoh: bahwa hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP-lah yang dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Asas *ius sanguinis* (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
- b. Asas *ius soli* (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:
 - 1) Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang

menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.

- 2) Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:

- a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).
- b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa) Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai:
 - a) Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
 - b) Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Naturalisasi biasa Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:
 - 1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
 - 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih;
 - 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
 - 7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
 - 8) membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.
- b. Naturalisasi Istimewa Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

c. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan:
 - 1) telah berusia 18 tahun ;
 - 2) bertempat tinggal di luar negeri;
- d. masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden;
- e.. masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri;
- g. turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI / 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 x pertemuan)

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya politik di Indonesia

Jurusan : IPA-IPS

Nama Guru PPL : Lisa Ristyaningsih

A. Standar Kompetensi

1. Menganalisis budaya politik di Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- 1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.
- 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
- 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.
- 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.	Mendeskripsikan pengertian budaya politik	Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab
		Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli	Mandiri

		Mendeskrripsikan komponen-komponen budaya politik	
2.	1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.	Mendeskrripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan.	
		Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.	

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu:

1. Mendeskrripsikan pengertian budaya politik setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai budaya politik.
2. Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat menyebutkan pengertian budaya politik menurut para ahli.
3. Mendeskrripsikan komponen-komponen budaya politik setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat menunjukkan komponen-komponen budaya politik yang ada.
4. Mendeskrripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan agar dapat menunjukkan sikap berdasarkan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia.
5. Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat membedakan tipe dari masing-masing budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Budaya Politik

2. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

3. Komponen-Komponen Budaya Politik
- F. Metode Pembelajaran

1. Ceramah

2. Diskusi
- G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

a. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video

b. Alat Pembelajaran : White board, spidol

c. Bahan Pembelajaran : Budiyanto. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SMA Kelas XI)". Penerbit Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta, Buku Kuliah Cholisin, M.Si.
- H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	<div><div>Pendahuluan</div><div><ul style="list-style-type: none">Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi)Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajarApersepsiMenyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari</div></div>	10 menit
2.	<div><div>Kegiatan Inti</div><div><ul style="list-style-type: none">Eksplorasi<ul style="list-style-type: none">Dalam kegiatan eksplorasi: menjelaskan pengertian budaya politik.Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli.Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik.Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan.Memedakan tipe-tipe budaya</div></div>	60 menit

	<p>politik berdasarkan orientasi politiknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok yaitu (a) pengertian budaya politik; (b) pengertian budaya politik menurut para ahli; (c) komponen-komponen budaya politik; (d) tipe-tipe budaya politik; (e) tipe budaya politik cberdasarkan orientasi budaya politik, setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan. Konfirmasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 	
3.	Penutup <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kesimpulan Motivasi Salam Penutup 	20 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrume	Instrumen Soal

		n	
1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan pengertian budaya politik secara umum!
2. Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan pengertian Budaya Politik menurut para ahli ! b. Dari pengertian budaya politik dari beberapa ahli, coba simpulkan pengertian budaya politik menurut anda.
3. Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan komponen objek politik yang anda ketahui!
4. Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan.	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan tipe budaya politik berdasarkan sikap budaya politik militan! b. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi menjadi dua. Sebut dan jelaskan!
5. Memedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan ciri-ciri tipe budaya

orientasi politiknya.			politik parochial, kaula, dan partisipan!
--------------------------	--	--	--

Kunci Jawaban :

- Sebut dan Jelaskan pengertian budaya politik secara umum!
Bahwa budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsure masyarakat yang berbeda budaya politiknya seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya.
- Jelaskan pengertian Budaya Politik menurut para ahli !
 - Gabriel A. Almond dan Sidney Verba
Menurut Almond dan Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dimengerti oleh para anggota suatu sistem politik.
 - Austin Ranney

Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objekobjek politik.
 - Samuel Beer
Samuel Beer mengemukakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
 - Dari pengertian budaya politik dari beberapa ahli, coba simpulkan pengertian budaya politik menurut anda!
(available)
- Komponen Objek Politik:
 - Komponen kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.
 - Komponen afektif, yaitu berupa perasaan sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya.

- c) Komponen evaluatif, yaitu berupa keputusan dan mendapat tentang objek-objek yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan criteria informasi dan perasaan.
- 4. Tipe budaya politik berdasarkan sikap budaya politik militan, bahwa tipe budaya politik dengan sikap ini tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan peraturannya yang mungkin salah.
- 5. Ciri tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya:
 - a. Budaya politik parochial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif. Ciri masyarakatnya masih banyak sekali yang acuh dengan keadaan khususnya budaya politik yang berkembang di masyarakat.
 - b. Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif. Ciri masyarakatnya pikirannya sudah mulai maju tetapi realita sikapnya masih bersifat pasif.
 - c. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Ciri masyarakatnya sudah maju secara pikiran dan sikap terhadap politiknya sudah tinggi.


J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	5	10-15	20	20
2.	5	10-15	20	20
3.	3	5-7	10	10
4.	3	5-7	10	10
5.	4	7-10	15	15
6.	3	5-7	10	10
7.	4	7-10	15	15
Total Skor				100

Sleman, 19 Juli 2016


Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih
NIM 13401244017

LAMPIRAN MATERI

BUDAYA POLITIK INDONESIA

A. Pendahuluan

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia adalah politik. Keterlibatan manusia dalam politik dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan politik menjadi bagian proses yang dilakukan warga negara. Setiap warga negara memiliki aspirasi dalam bidang politik. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, maupun pemilihan wakil rakyat. Dalam bentuk lain, kegiatan politik warga negara diwadahi dalam sebuah organisasi yang disebut partai politik. Di dalamnya, setiap warga negara memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai peran warga negara sebagai insan politik dan sistem politik. Dari organisasi partai politik diharapkan tercipta kematangan budaya politik.

B. Pengertian Budaya Politik

1. Pengertian Umum Budaya Politik

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga Indonesia menurut **Benedict R. Anderson**, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa memiliki hubungan dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut, budaya politik memengaruhi dalam proses-proses politik.

Berikut ini merupakan beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahaminya secara teoritis.

- a) Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan adat istiadat, takhayul dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
- b) Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Kemudian menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militant, utopis, terbuka, atau tertutup.
- c) Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- d) Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas dan prioritas kebijakan.

2. Pengertian Budaya Politik menurut Para Ahli

Berikut ini merupakan pengertian budaya politik menurut beberapa ahli ilmu politik.

a. Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

b. Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empiric, symbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

c. Alan R. Ball

Budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.

d. Austin Ranney

Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek- objek politik.

e. Gabriel A. Almond dan Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu.

Dengan memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh dua manfaat yakni:

- a. sikap warga negara terhadap sistem politik kan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap sistem politik itu;
- b. hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

3. Komponen-Komponen Budaya Politik

Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif.

a. Komponen kognitif

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan bidang politik dan kepercayaan pada politik peranan dan segala kewajibannya.

b. Komponen orientasi afektif

Komponen orientasi afektif adalah segala perasaan terhadap politik peranannya, para aktor, dan penampilannya.

c. Komponen orientasi evaluatif

Orientasi evaluatif adalah keputusan dan paradigma tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Menurut Almond dan Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik dapat digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen evaluatif orientasi politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang dianut seseorang warga negara menjadi dasar bagi sikap dan perannya terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika politik.

C. Tipe-Tipe Budaya Politik

1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

a. Budaya politik militant

Budaya politik militant tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternative yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan peraturannya mungkin yang salah.

b. Budaya politik toleransi

Budaya politik ini merupakan budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Budaya politik ini berusaha mencari consensus yang wajar, yaitu selalu membuka pintu untuk kerja sama. Yang dilakukan budaya politi ini adalah sikap netral atau kritis terhadap ide orang, bukan curiga terhadap orang.

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas:

a. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolute

Budaya politik ini memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi.

b. Budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, krisis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai tradisi berdasarkan pengembangan masa kini.

Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai sesuatu yang membahayakan. Tiao perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan berbahaya yang harus dikendalikan, perubahan dianggap penyimpangan.

2. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Almond dan Verba mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik menjadi tiga. Ketiga budaya politik tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipasi.

a. Budaya politik parochial

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana. Ciri khas budaya politik parokial yaitu:

- a. spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik memiliki kekhususan tugas.
- b. satu peranan dilakukan bersama dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersama dengan peranannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

b. Budaya politik subjek

Dalam budaya politik subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politik. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya politik ini telah menyadari otoritas pemerintahan. Namun demikian posisi sebagai subjek (kawula) mereka dipandang sebagai posisi yang positif. Biasanya, sikap-sikap seperti ini timbul diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti proses kolonialisasi dan kediktatoran.

c. Budaya politik partisipan

Masyarakat dengan budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang ditujukan kepada sistem politik secara keseluruhan, struktur politik, dan administratif.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI / 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya politik di Indonesia

Jurusan : IPA-IPS

Nama Guru PPL : Lisa Ristyaningsih

- A. Standar Kompetensi
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia
- B. Kompetensi Dasar
- 1.1 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1.	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	Mendesripsikan pengertian partisipasi politik	
		Memetakan konsep partisipasi politik	
		Mengaplikasikan praktik partisipasi politik	

		Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik	
--	--	--	--

D. Tujuan Pembelajaran

1. Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik.
2. Memetakan konsep partisipasi politik.
3. Mengaplikasikan praktik partisipasi politik.
4. Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik.

E. Materi Pembelajaran

1. **Pengertian Pengertian Partisipasi Politik**
2. **Konsep Partisipasi**
3. **Praktik Partisipasi Politik**
4. **Tingkat Partisipasi Politik**

F. Metode Pembelajaran

1. Ceramah
2. Diskusi dengan metode Team Game Tournament

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

- a. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video
- b. Alat Pembelajaran : White board, spidol
- c. Bahan Pembelajaran : Budiyanto. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SMA Kelas XI)". Penerbit Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta, Buku Kuliah Cholisin, M.Si.

H. Kegiatan Pembelajaran

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi) • Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar • Apersepsi • Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 	10 menit
1.	Kegiatan Inti <ul style="list-style-type: none"> • Eksplorasi 	60 menit

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik. ✓ Memetakan konsep partisipasi politik. ✓ Mengaplikasikan praktik partisipasi politik. ✓ Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok, setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan atau menjawab pertanyaan yang siswa dapat • Konfirmasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 	
2.	Penutup <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi • Kesimpulan • Motivasi • Salam Penutup 	20 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Mendeskripsikan pengertian	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan pengertian

partisipasi politik			partisipasi politik secara umum!
2. Memetakan konsep partisipasi politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan perbedaan konsep partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dengan Miriam Budiardjo!
3. Mengaplikasikan praktik partisipasi politik	Non Tes	Lisan	a. Siswa memaparkan pengetahuannya mengenai praktik partisipasi dengan bahasanya sendiri.
4. Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan tingkatan dalam partisipasi politik!

Kunci Jawaban:

1. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.
2. Perbedaan konsep partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo dengan Ramlan Surbakti:

Nama Tokoh	Perbedaan
Miriam Budiardjo	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan seseorang atau sekelompok orang. b. Keikutsertaan secara aktif dalam kehidupan politik. c. Cara memilih pimpinan negara dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. d. Cara pemilihan pemimpin mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Ramlan Surbakti	<ul style="list-style-type: none"> a. Keikutsertaan warga negara biasa yang dapat menentukan segala keputusan mengenai kehidupannya. b. Keikutsertaan warga negara biasa mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

3. Improve secara langsung dari siswa.
4. Tingkat partisipasi:

a. Kategori pengamat

Intensitas partisipasinya, terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat hubungannya rendah, atau tingkat efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakanyang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber aya yang cukup bsnyak.

b. Kategori aktivis

c. Intensitas partisipasinya tinggi dalam partisipasi politik yaitu meliputi pejabat umum, pejabat partai penuh waktu dan pimpinan kelompok kepentingan.

J. Pedoman Penskoran


No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	3	5-7	10	10
2.	3	5-7	10	10
3.	3	5-7	10	10
4.	3	5-7	10	10
5.	3	5-7	10	10
6.	3	5-7	10	10
7.	3	5-7	10	10

8.	3	5-7	10	10
9.	3	5-7	10	10
10.	3	5-7	10	10
Total Skor				100

Sleman, 16 Juli 2016

Mengetahui,

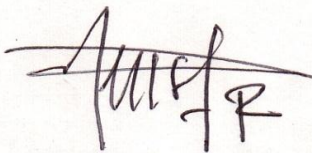
Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

LAMPIRAN

A. Peran Serta dalam Budaya Politik Partisipan

1. Pengertian Partisipasi Politik

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan). Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.

Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristocrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

2. Konsep Partisipasi Politik

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukakan tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan post behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.

Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu:

- a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik?
- b. Siapa saja yang terlibat?
- c. Apa implikasinya?
- d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik?
- e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik?

Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik.

Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Sarjana	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwijk	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat public agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah• Terdapat usaha warga negara untuk memengaruhi pejabat publik.
Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung	<ul style="list-style-type: none">• Berupa kegiatan individu atau kelompok• Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih

	memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).	pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik.
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik • Dilakukan oleh warga negara biasa
Michael Rush dan Philip Althoft	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	<ul style="list-style-type: none"> • Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik • Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi

3. Praktik Partisipasi Politik

Berdasarkan riset-riset tentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik. Bentuk-bentuk itu diantaranya:

- Kegiatan pemilihan
- Lobbying
- Kegiatan organisasi
- Mencari koneksi (*contacting*)
- Tidnakan kekerasan (*violence*)

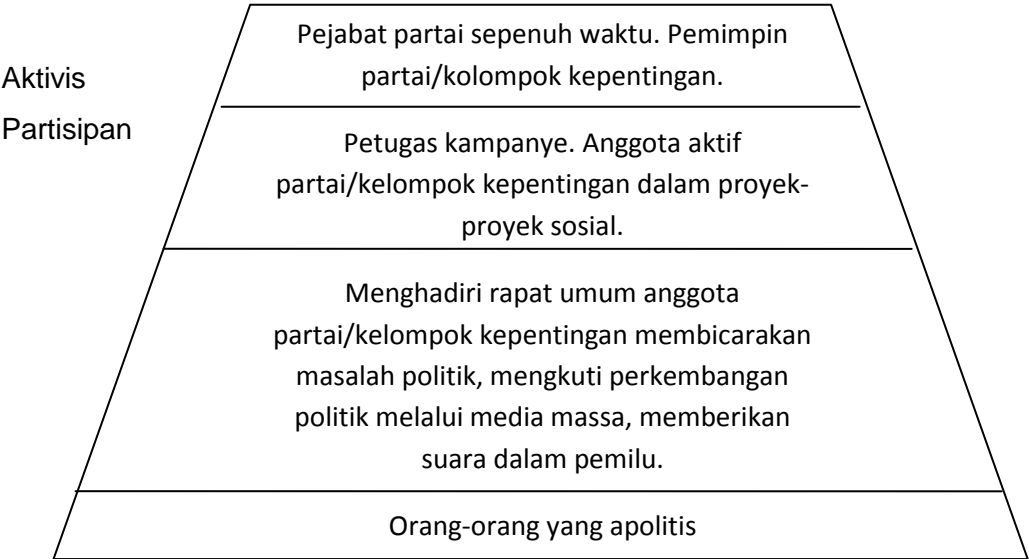
f. Tingkatan Partisipasi Politik

Pada dasarnya seluruh tingkatan partisipasi politik secara praktis mungkin sekali memiliki perbedaan antara yang demokratis dengan nondemokratis, karena akan memiliki implikasi yang besar pada pembatasan-pembatasan partisipasi politik rakyat atau perluasan-perluasan partisipasi politik. Selain itu, meskipun suatu sistem politik sama-sama demokratis, bentuk-bentuk partisipasi politik dan tingkatan-tingkatannya sangat mungkin terdapat perbedaan.

Hubungan antara dua criteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”, lingkup partisipasi politik yang beasr biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, maka intensitasnya semaikin tinggi. Contoh, kegiatan aktivis-aktivis partai politik, pejabat partai politik, dan kelompok-kelompok

penekan. Jadi, dalam hal ini, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik maka semakin rendah atau kecil intensitasnya, dan sebaliknya semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi”.

Perhatikan bentuk piramida partisipasi politik berikut ini.



Berdasarkan piramida partisipasi politik di atas, kriteria tingkatan partisipan seperti yang dikemukakan **Huntington** dan **Nelson** memiliki kesesuaian.semakin tinggi partisipasi politik, semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin luas cakupannya. Sebaliknya, semakin menuju ke bawah, semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil intensitasnya. Untuk lebih bisa memahaminya, perhatikan penjelasan berikut:

No	Tingkat Partisipasi	Keterangan
1.	Kategori Pengamat	Intensitas Partisipasi Terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat hubungannya rendah, atau tingkat efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.
2.	Kategori Aktivis	Intensitas Partisipasi Mereka memiliki intensitas tinggi dalam partisipasi politik adalah para pejabat umum, pejabat partai penuh waktu, dan pimpinan kelompok kepentingan. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan hubungan <i>pribadi</i> dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan public yang dibuat pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI / 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya politik di Indonesia

Jurusan : IPA-IPS

Nama Guru PPL : Lisa Ristyaningsih

- A. Standar Kompetensi**
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia
- B. Kompetensi Dasar**
- 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi**

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1.	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik	
		Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik	

		Mengidentifikasi proses sosialisasi politik	
		Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang	
		Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik	

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu:

1. Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik.
2. Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik.
3. Mengidentifikasi proses sosialisasi politik.
4. Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang.
5. Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Sosialisasi Politik
2. Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Para Ahli
3. Proses Sosialisasi Politik
4. Proses Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang
5. Sosialisasi dan Komunikasi Politik

F. Metode Pembelajaran

1. Ceramah
2. Snowball Throwing

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

- a. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video
- b. Alat Pembelajaran : White board, spidol
- c. Bahan Pembelajaran : Budiyanto. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SMA Kelas XI)". Penerbit Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta, Buku Kuliah Cholisin, M.Si.

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan II

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	<p>Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi)• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar• Apersepsi• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	10 menit
1.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksplorasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan eksplorasi: menjelaskan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik✓ Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik.✓ Mengidentifikasi proses sosialisasi politik melalui tayangan video.✓ Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang.✓ Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik.• Elaborasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing siswa, setelah selesai membuat soal setiap siswa melemparkan soalnya ke	60 menit

	<p>teman yang lain. Lalu siswa yang lain menjawab pertanyaan yang di dapatnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 	
2.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi • Kesimpulan • Motivasi • Salam Penutup 	20 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan apa yang dimaksud sosialisasi pengembang an budaya politik secara umum!
2. Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan pengertian sosialisasi pengembang an budaya politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond
3. Mengidentifikasi proses sosialisasi politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan tahap proses

			sosialisasi politik !
4. Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebutkan tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang menurut Robert Le Vine!
5. Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan hubungan antara sosialisasi politik dengan komunikasi politik!

Kunci Jawaban:

1. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, dictator, maupun sistem politik lainnya. Sosialisasi politik merupakan pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Terlaksananya sosialisasi politik ini sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Gabriel Almond
Gabriel Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
3. Proses sosialisasi politik anak menurut Easton dan Dennis:
Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup

perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Pemahaman ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik

4. Tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang menurut Robert Le Vine:
 - a. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.
 - b. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.
 - c. Pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.
5. Hubungan antara sosialisasi politik dengan komunikasi politik yaitu, proses sosialisasi politik dalam kaitannya dengan fungsi komunikasi politik berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri.

J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	3	5-7	10	10
2.	3	5-7	10	10
3.	3	5-7	10	10
4.	3	5-7	10	10
5.	3	5-7	10	10
6.	3	5-7	10	10
7.	3	5-7	10	10
8.	3	5-7	10	10
9.	3	5-7	10	10
10.	3	5-7	10	10
Total Skor				100

Sleman, 16 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

LAMPIRAN

A. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

1. Pengertian Umum

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik berlaku di dalam semua sistem negara, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, maupun diktator. Di setiap negara, sosialisasi politik menjadi media untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Sosialisasi politik tersebut mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses sosialisasi politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan hingga membentuk tingkah laku politik. Tingkah laku politik seseorang biasanya akan berkembang secara berangsur-angsur. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap seseorang. Berbagai pengaruh tersebut menjadi faktor pendorong untuk memunculkan persepsi.

2. Pengertian menurut Para Ahli

a. Gabriel A. Almond

Gabriel Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

b. Irvin L. Child

Irvin L. Child berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu-individu yang dilahirkan dengan banyak

sekali jajaran potensi tingkah laku yang dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya dengan dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan dapat diterima sesuai dengan standar-standar kelompoknya.

c. Richard E. Dawson, dkk

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka menginjak dewasa.

d. Alfian

Alfian mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Pertama, sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
- 2) Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Dari sekian banyak definisi tersebut, tampak beberapa kesamaan para ahli dalam mengemukakan beberapa segi penting sosialisasi politik, yaitu:

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
- c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.

- d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

3. Proses Sosialisasi Politik

Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Pemahaman ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Seorang anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu:

- a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan polisi.
- b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
- c. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
- d. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

4. Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang

Tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang menurut Robert Le Vine:

- a. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.
- b. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.
- c. Pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.

5. Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

Sosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik belajar secara emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifest (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat.

Dalam suatu sistem politik negara, fungsi sosialisasi menunjukkan bahwa semua sistem politik cenderung berusaha mengekalkan kultur dan struktur mereka sepanjang waktu. Hal ini dilakukan terutama melalui pengaruh struktur-struktur primer dan sekunder yang dilalui oleh anggota muda masyarakat dalam proses pendewasaan mereka.

Di dalam realitas kehidupan masyarakat, pola-pola sosialisasi juga mengalami perubahan seperti juga berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pula soal perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam subsistem masyarakat yang beraneka ragam.

Pada sisi lain sosialisasi politik merupakan proses induksi ke dalam suatu kultur politik yang dimiliki oleh sistem politik yang dimaksud. Hasil akhir proses ini adalah seperangkat sikap mental, kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai, dan perasaan-perasaan terhadap sistem politik dan aneka perannya serta peran yang berlaku.

Proses sosialisasi politik dalam kaitannya dengan fungsi komunikasi politik berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

- A. Standar Kompetensi**
 - 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
- B. Kompetensi Dasar**
 - 2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi**

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi	Mendeskripsikan pengertian Demokrasi	Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai pendapat, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab.
		Mengidentifikasi pemikiran tentang Demokrasi	
		Menganalisis ciri-ciri Demokrasi	

		Memahami prinsip-prinsip Demokrasi	
		Mendeskripsikan Demokratisasi	

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu :

1. Mendeskripsikan pengertian demokrasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami secara benar konsep dasar demokrasi.
2. Mengidentifikasi pemikiran tentang demokrasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat mengerti pemikiran tentang demokrasi.
3. Menganalisis ciri-ciri demokrasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dapat menyebutkan ciri-ciri demokrasi.
4. Memahami prinsip-prinsip demokrasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dapat mengerti prinsip-prinsip demokrasi.
5. Mendeskripsikan demokratisasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dapat mengerti secara benar mengenai demokratisasi.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Demokrasi
2. Pemikiran tentang Demokrasi
3. Ciri-Ciri Demokrasi
4. Prinsip-Prinsip Demokrasi
5. Demokratisasi

F. Metode Pembelajaran

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Ceramah

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

1. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video
2. Alat Pembelajaran : LCD Proyektor, Spidol
3. Bahan Pembelajaran :

a. Budiyanto. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI". PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga: Jakarta.

b. Putrianti, Widiarti, Zulaika. 2016. "Pendidikan Kewarganegaraan". MGMP Pendidikan Kewarganegaraan: Sleman.

c. Suyatmi, Henny Hendrastuti. 2011. "Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan V

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi) Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar Apersepsi Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 	10 menit
2.	Kegiatan Inti <ul style="list-style-type: none"> Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Siswa mendeskripsikan pengertian demokrasi. ✓ Siswa memahami pemikiran tentang demokrasi. ✓ Siswa menganalisis ciri-ciri demokrasi. ✓ Siswa memahami prinsip-prinsip demokrasi ✓ Siswa mendeskripsikan demokratisasi. Elaborasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas- 	65 menit

	<p>tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok yaitu (a) pengertian demokrasi; (b) pemikiran tentang demokrasi; (c) ciri-ciri demokrasi; (d) prinsip-prinsip demokrasi; (e) demokratisasi, setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Konfirmasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi• Kesimpulan• Motivasi• Salam Penutup	15 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Mendeskripsikan pengertian demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan pengertian demokrasi secara sederhana!

			b. Jelaskan pengertian demokrasi menurut Giovanni Sartori
2. Mengidentifikasi pemikiran tentang demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	<p>a. Jelaskan bahwa istilah demokrasi bertolak dari suatu pola pikir!</p> <p>b. Disamping perumusan <i>rule of the law</i>, muncul rumusan demokrasi politik menurut Henry B. Mayo yang mencakup mengenai nilai-nilai, Sebutkan!</p>
3. Menganalisis ciri-ciri demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebutkan tiga ciri –ciri negara dengan sistem politik demokrasi!
4. Mendeskripsikan prinsip-prinsip demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	<p>a. Sebutkan prinsip demokrasi menurut Lyman Tower Sargent!</p> <p>b. Sebut dan</p>

			Jelaskan lima tingkat persamaan demokrasi dalam masyarakat!
5. Mendeskripsikan demokratisasi	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan pengertian demokratisasi secara mendasar menurut pendapat Anda!

Kunci Jawaban :

1. AAAA


J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	3	5-7	10	10
2.	3	5-7	10	10
3.	4	6-8	15	15
4.	4	6-8	15	15
5.	4	6-8	15	15
6.	4	6-8	15	15
7.	3	5-7	10	10
8.	3	5-7	10	10
Total Skor				100

Sleman, 19 Juli 2016

Mengetahui,


Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

LAMPIRAN MATERI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
(PERTEMUAN V)

A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakil- wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, sikap dan perilaku masyarakatnya selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Istilah tersebut diutarakan pertama kali di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Athena dianggap sebagai negara yang pertama kali menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. Perkembangan istilah demokrasi terjadi seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini karena demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan suatu negara yang berdasarkan pada konsep dan prinsip trias politika. Dalam demokrasi, kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2. Hakikat Demokrasi

Pada hakikatnya, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata

masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Dengan demikian, demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value). **Hendry B.**

Mayo mengemukakan tentang nilai-nilai dalam demokrasi, antara lain:

- a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peacefull settlement of conflict),
- b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful changein a changing society),
- c. menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (membatasi pemakaian kekerasan/paksaan seminimal mungkin (minim of coercion),
- d. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),
- e. menjamin tegaknya keadilan,
- f. memajukan ilmu pengetahuan,
- g. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan demokrasi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal.

Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya, membawa keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan tersebut antara lain:

1. kebebasan untuk berpendapat,

2. kebebasan untuk membuat kelompok,
3. kebebasan untuk berpartisipasi,
4. kesetaraan antarwarga,
5. saling percaya,
6. kerja sama.

Akan tetapi, mengingat masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dilaksanakan dengan batasan-batasan untuk saling menghormati. Hal paling penting inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah saat ini guna mengurangi kesalahpahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi. Bila tidak, kesalahpahaman sering kali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat.

Diamond & Lipset, 3 (tiga) syarat pokok demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan :

1. Kompetisi, yang sungguh-sungguh dan meluas untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan;
2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan;
3. Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik.

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Gambarnya sebagai berikut :

1. Yang melakukan kekuasaan negara adalah wakil-wakil yang terpilih untuk menyalurkan kehendak rakyat.
2. Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat.
3. Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasama dan dukungan.

Budaya demokrasi adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi. Unsur-unsur budaya demokrasi adalah :

1. Kebebasan, adalah eleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari

pihak manapun. Bukan kebebasan untuk melakukan hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan cara tidak melanggar aturan yang berlaku.

2. Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Di dalam masyarakat manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Solidaritas sebagai perekat pendukung agar tidak jatuh kedalam perpecahan.
4. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran. Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berada dengan pendirian sendiri.
5. Menghormati kejujuran adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konflik di masa depan.
6. Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan member penalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan.
7. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain yang tercermin dalam sopan santun, dan beradab.

3. Pemikiran tentang Demokrasi

Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat, karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :

- a. Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
- b. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
- c. Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.

- d. Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.

4. **Macam-Macam Demokrasi**

No.	Dasar Pemikiran	Macamnya
1.	Atas dasar penyaluran kehendak rakyat	<i>Demokrasi Langsung</i> <i>Demokrasi Tidak Langsung</i>
2.	Atas dasar prinsip ideologi	<i>Demokrasi Konstitusional</i> <i>Demokrasi Rakyat</i>
3.	Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya	<i>Demokrasi Formal (negara-negara liberal)</i> <i>Demokrasi Material (negara-negara komunis)</i> <i>Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)</i>

Bentuk-bentuk demokrasi menurut Sklar :

No.	Bentuk Demokrasi	Uraian/Keterangan
1.	Demokrasi Liberal	Yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh UU & pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
2.	Demokrasi Terpimpin	Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menududuki kekuasaan.
3.	Demokrasi Sosial	Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4.	Demokrasi Partisipasi	Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
5.	Demokrasi Konstitusional	Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok budaya & menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Macam-macam demokrasi menurut permasalahannya :

Permasalahan	Demokrasi	Demokrasi	Demokrasi
--------------	-----------	-----------	-----------

	Liberal	Komunis	Pancasila
Ciri khas	Barat	Timur	Indonesia
Suber ajaran	Paham liberalis	Paham Marxisme-Komunisme	Pancasila
Dasar pandangan terhadap manusia	Memandang bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan bebas merdeka (sebagai makhluk individu)	Memandang bahwa manusia tidak mempunyai arti sebelum bersama-sama dengan manusia lain (sebagai makhluk sosial)	Memandang bahwa manusia sejak lahir merupakan makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial
Pelaksanaan hak	Hak-hak individu lebih diutamakan daripada hak-hak sosial kebebasan yang sebebaskan-bebasnya (mutlak)	Hak-hak sosial/masyarakat lebih diutamakan dari pada hak individu	Hak manusia rakyat dikembangkan secara seimbang. Atau hak individu dikembangkan seirama dengan hak-hak sosial. Kebebasan yang bertanggung jawab
Asas dalam mengambil keputusan	Ditempuh dengan suara terbanyak (mayoritas menguasai minoritas)	Ditentukan oleh pengurus partai komunis atas nama kaum proletar (minoritas menguasai mayoritas)	Diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah mufakat
Bentuk negara	Sekuler	Atheis	Negara yang berdasar Ketuhanan yang maha

			Esa.
--	--	--	------

B. Ciri-Ciri dan Prinsip Demokrasi

1. Ciri-Ciri Demokrasi

Esensi cirri-ciri emipiris demokrasi, adalah bahwa demokrasi senantiasa berkaitan erat dengan pertanggungjawaban (*account ability*), kompetisi, keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar, seperti hak untuk berekspresi, berserikat, berkumpul dan sebagainya.

Demokrasi pada umumnya ditandai dengan ciri-ciri :

- a. Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintahan.
- b. Perasaan pendapat umum (media massa) yang bebas dan bertanggung jawab.
- c. Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan.

Henry B. Mayo memberikan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai (*values*), yaitu :

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat.
- f. Mengakui tegaknya keadilan.

Demokrasi di negara berkembang, masyarakat masih mencari dan menemukan identitas :

- a. Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif)
- b. Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.
- c. Pelaksanaannya cenderung bersifat pelaksanaan “otoriter”.

Demokrasi Pancasila, bersumber pada ideologinya demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:

1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang di dasarkan pada sila-sila Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

2. Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip dasar demokrasi secara universal, bahwa yang disebut pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintahan harus dibatasu, dan hak-hak individu harus dilindungi. Lyman Tower Sargent, prinsip-prinsip dalam demokrasi :

- a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- b. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara,
- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
- d. Suatu sistem perwakilan, dan
- e. Suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayoritas.

Dalam teori dan praktik politik demokrasi, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat persamaan”.

1. Persamaan politik
2. Persamaan di depan hukum
3. Persamaan kesempatan
4. Perasmaan ekonomi
5. Persamaan sosial

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, berdasarkan UUD 1945 :

- a. Kedaulatan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditunjukkan untuk rakyat.
- b. Berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta nilai keadilan sosial.

- c. Badan-badan perwakilan rakyat sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
- d. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Perbandingan prinsip demokrasi Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi universal.

Demokrasi Universal	Demokrasi Pancasila
<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. - Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. - Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipaki oleh para warga negara. - Suatu sistem perwakilan. - Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. - Keseimbangan antara hak dan kewajiban. - Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri dan orang lain. - Mewujudkan rasa keadilan sosial - Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. - Mengutamakan persatuan nasuional dan kekeluargaan. - Menjunjung tinggi cita-cita nasional.

C. Demokratisasi

Demokratisasi merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) baik langsung atau tidak langsung dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

Demokratisasi merupakan bentuk yang lebih luas dari pada sekedar liberalisasi, karena dalam tahap ini terdapat persaingan yang terbuka, sehingga rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih

tetapi juga hak untuk dipilih. Dengan demikian tanggung jawab pejabat public terhadap rakyat yang memilihnya menjadi besar.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

- A. Standar Kompetensi
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
- B. Kompetensi Dasar
- 2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1	2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani	Mendeskrripsikan konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>)	Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai pendapat, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab.
		Mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani	
		Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani	

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu :

- 1. Mendeskripsikan konsepsi masyarakat madani (*civil society*) setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami secara benar konsep dasar masyarakat madani.
- 2. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat mengerti macam-macam karakteristik masyarakat madani.
- 3. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dapat memahami secara utuh dalam menuju masyarakat madani.

E. Materi Pembelajaran

- 1. Konsepsi Masyarakat Madani (*Civil Society*)
- 2. Karakteristik Masyarakat Madani
- 3. Menuju Masyarakat Madani

F. Metode Pembelajaran

- 1. Portopolio
- 2. Diskusi

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

- 1. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video/Gambar
- 2. Alat Pembelajaran : LCD Proyektor, Spidol
- 3. Bahan Pembelajaran :
 - a. Budiyanto. 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI”. PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga: Jakarta.
 - b. Putrianti, Widiarti, Zulaika. 2016. “Pendidikan Kewarganegaraan”. MGMP Pendidikan Kewarganegaraan: Sleman.
 - c. Suyatmi, Henny Hendrastuti. 2011. “Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan VI

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi)• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar	10 menit

	<ul style="list-style-type: none">• Apersepsi• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi:<ul style="list-style-type: none">✓ Siswa mendeskripsikan konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>).✓ Siswa mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani.✓ Siswa menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.• Elaborasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas-tugas yaitu membuat portopolio yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok yaitu mengenai materi pada pertemuan ke VI setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.• Konfirmasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan	65 menit

	tentang hal-hal yang belum diketahui.	
3.	Penutup <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi• Kesimpulan• Motivasi• Salam Penutup	15 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Mendeskripsikan konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>)	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan konsepsi mengenai masyarakat madani secara umum! b. Jelaskan konsep masyarakat madani yang diabstraksikan para ahli memiliki indikator sebagai identitas karakter!
2. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan karakteristik masyarakat madani!
3. Menganalisis budaya demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	a. Buatlah peta konsep

menuju masyarakat madani	s		mengenai bentuk masyarakat partisipatif yang harus dikembangk an agar kehidupan yang demokratis ditopang oleh masyarakat madani!
-----------------------------	---	--	---

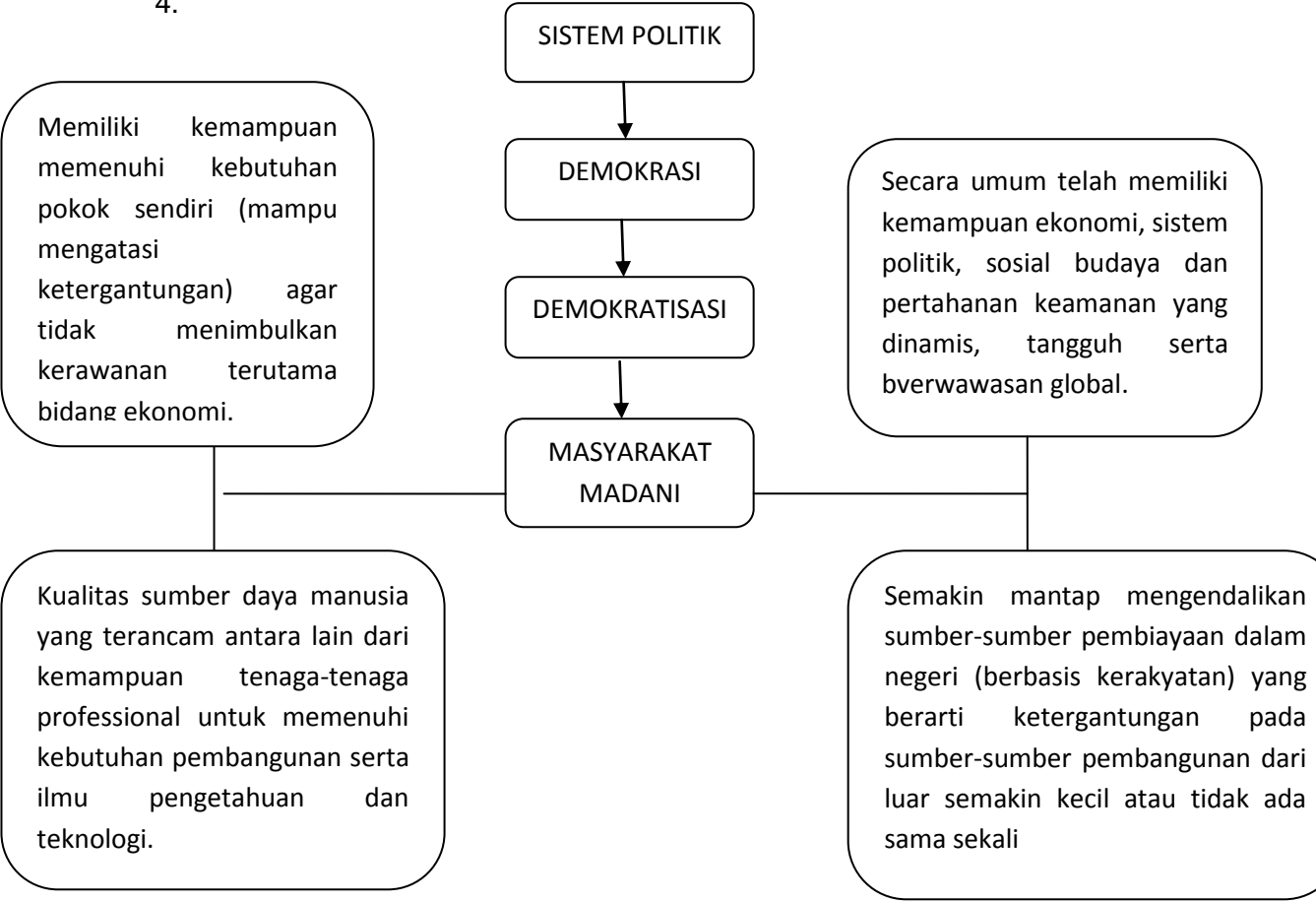
Kunci Jawaban :

1. Konsepsi masyarakat madani di Indonesia sepakat bila digunakan sebagai padanan yang tepat untuk istilah *civil society* yang merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestrabilan masyarakat.
2. Pertama : **Sifat partisipatif**, yaitu masyarakat madani tidak akan menyerahkan seluruh nasibnya pada negara, tetapi mereka menyadari bahwa yang akan dominan menentukan masa depan mereka haruslah berasal dari diri sendiri.
Kedua : **Otonom**, yaitu selain sebagai masyarakat partisipatif, masyarakat madani juga memiliki karakter mandiri yaitu dalam mengembangkan dirinya tidak tergantung dan menunggu bantuan negara.
Ketiga : **Tidak bebas nilai**, yaitu seluruh komponen masyarakat madani memiliki keterikatan terhadap nilai-nilai yang merupakan kesepakatan hasil musyawarah demokratis (bukan sekedar consensus).
Keempat : **merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif (plural)**, yaitu meskipun eksistensinya yang partisipatif dan otonom terhadap kekuatan negara, namun masyarakat madani adalah bagian dari komponen-komponen negara.

Kelima : **Termanifestasi dlaam organisasi**, yaitu prinsip-prinsip organisasi depegang oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material.

3. Karakteristik masyarakat madani :
- a) Free Public Sphere, adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.
 - b) Demokratis, merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya.
 - c) Toleran, suatu sikap yang dikembangkan masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.
 - d) Pluralisme, sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani.
 - e) Keadilan sosial, untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh spek kehidupan.

4.



J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban	Skor
----	--------------	------

	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	Maksimal
1.	5	10-17	20	20
2.	5	12-20	25	25
3.	5	12-25	25	25
4.	5	15-25	30	30
Total Skor				100

K. Soal Pemahaman

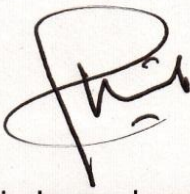
Setelah mempelajari mengenai materi “ciri-ciri masyarakat madani (pengertian, ciri-ciri, karakteristik dll), lakukan diskusi kelompok. Langkah-langkah :

- a) Bentuk kelompok 1 baris setiap kelompok.
- b) Siswa berdiskusi untuk membuat wacana atau kliping sesuai dengan topik pembelajaran yaitu dengan bentuk portopolio.
- c) Setiap kelompok bekerja sama (berdiskusi untuk menemukan ide pokok serta member tanggapan terhadap wacana kemudian dibuat se kreatif mungkin, lalu ditempel di sebuah media yang sudah di sediakan.
- d) Mempresentasikan hasil portopolio (setiap kelompok).

Sleman, 16 Juli 2016


Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih
NIM 13401244017

LAMPIRAN MATERI

CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI

1. Konsepsi Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Istilah masyarakat madani atau dalam bahasa Inggris disebut Civil Society pertama dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis. Cicero memahaminya identik dengan negara. Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai/norma hukum dipatuhi masyarakat.

Civil society berasal dari dunia barat yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain:

- a) Diterjemahkan dengan istilah masyarakat sipil. Civil artinya warga negara suatu negara society artinya masyarakat.
- b) Diterjemahkan dengan istilah masyarakat beradab/peradaban. Diterjemahkan dari civilized (beradab) dan society (masyarakat).
- c) Diterjemahkan dengan istilah masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata madinah kota tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Madinah berasal dari kata Madaniyah yang artinya peradaban, masyarakat madani juga berarti masyarakat yang beradab.
- d) Berkaitan dengan hal diatas, Civil Society diartikan sebagai masyarakat kota. Karena Madinah adalah sebuah negara kota (city-state) yang mengingatkan kita pada polis di zaman Yunani Kuno. Masyarakat kota sebagai model masyarakat yang beradab.
- e) Diterjemahkan sebagai masyarakat warna/kewargaan. Masyarakat disini adalah pengelompokan masyarakat yang bersifat otonom dari negara.

Jadi masyarakat madani adalah konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi.

Indicator, al: menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan atas dasar prinsip saling menghormati, berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antara warga negara dan negara.

Identifikasi ada-tidaknya perkembangan masyarakat madani:

- a) Sifat partisipatif;
- b) Sifat otonom;
- c) Tidak bebas nilai;

- d) Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif (plural);
- e) Termanifestasi dalam organisasi.

2. Karakteristik Masyarakat Madani

Untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan beberapa persyaratan yang sekaligus menjadi karakteristik masyarakat tersebut. Prasyarat-prasyarat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain itu meliputi :

a) Free public Sphere (ruang public untuk berpendapat)

Adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang public yang bebas setiap warga negara dalam posisi yang setara mampu menyampaikan pendapat, mempublikasi informasi dan menyalurkan aspirasi tanpa tekanan dan kekhawatiran.

b) Demokratis

Merupakan syarat mutlak terwujudnya masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku sopan dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras, dan agama.

c) Toleransi

Merupakan sikap yang dikembangkan dan dibesarkan pada kesabaran setiap anggota masyarakat (warga negara) untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berbeda.

d) Pluralisme (kemajemukan)

Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

e) Keadilan sosial

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

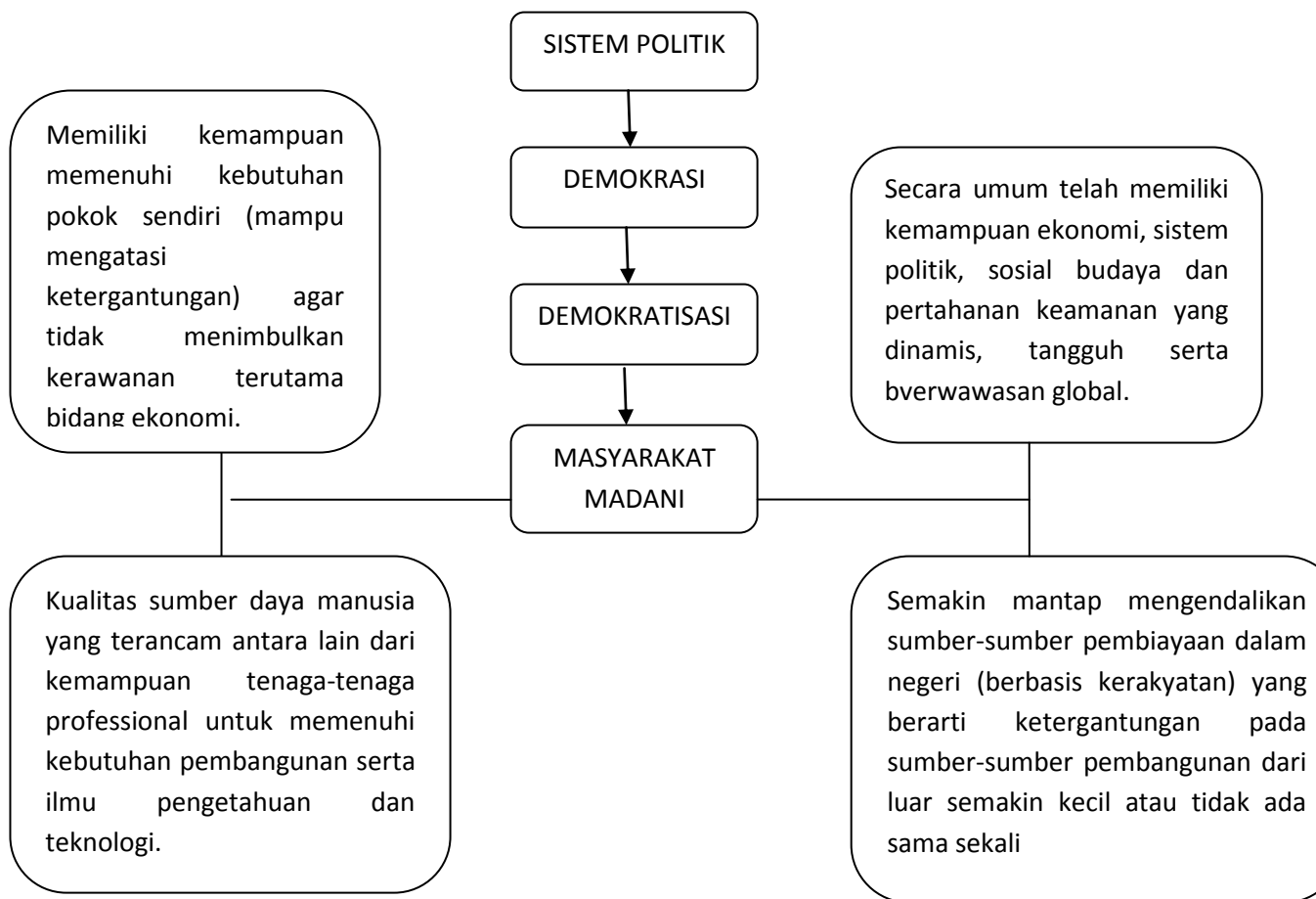
3. Menuju Masyarakat Madani

Masyarakat madani (civil society), merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Masyarakat telah mampu mengembangkan gotong royong, musyawarah dan toleransi dengan berdasarkan nilai-nilai tradisional. Mereka juga telah

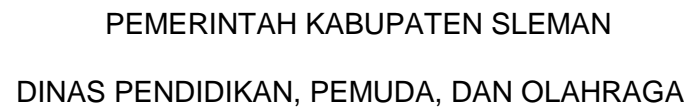
mampu mengembangkan budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman.

Prasayarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasi.



Kendala-kenda yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani :

- a) Tingkat pendidikan
 - b) Pendapatan
 - c) Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah
 - d) Adanya budaya/kultur masyarakat yang belum sesuai dengan demokrasi.
- Misal : sikap paternalistic dan sikap belum menerima perbedaan pendapat sebagian masyarakat.



Alamat : Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 55286. Telp (0274)865856

DAFTAR HADIR SISWA

Semester : 1/2
Tahun Pelajaran : 2016/2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Laki-laki	9
Perempuan	23
Jumlah	32

Guru Mata Pelajaran



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

**KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN HARIAN 1
TAHUN AJARAN 2016/2017**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Alokasi Waktu : 90 menit
Bentuk Soal & Jumlah : 1. Pilihan Ganda : 20 butir
2. Uraian : 4 butir

Program : MIA
Kurikulum : Kurikulum 2013

Jenis Soal : Tertulis

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1.	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan kementerian negara Indonesia.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mensyukuri keberadaan nilai-nilai pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara. Mensyukuri keberadaan nilai-nilai pancasila dalam tugas dan fungsi kedudukan kementerian negara Indonesia Mampu menjelaskan pengertian kekuasaan negara. 	Pilihan ganda	1,
	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	Macam-macam sistem kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menyebutkan pasal-pasal yang mengatur sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan macam-macam sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. 	Pilihan ganda Uraian	2,3,4,5,6,7 1,2
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	Tugas dan fungsi lembaga kemeterian Indonesia dan lembaga non kemeterian. Dan klasifikasi kementerian negara Indonesia.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menyebutkan pasal-pasal yang mengatur sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan tugas dan fungsi kementerian negara. Mampu mendeskripsikan tugas dari kemeterian-kementerian negara. Mengetahui klasifikasi lembaga kementerian Negara Indonesia dan 	 Uraian	8,9,10,11, 11,12, 13, 14,15, 17, 18, 19, 20. 3


Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
				Non Kementerian Indonesia.		
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	Bentuk praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengkritisi nilai-nilai pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Mampu memberikan keputusan bersama tentang praktik penyelenggaraan negara. Mampu memberikan contoh praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 	Pilihan Ganda Uraian	16, 4

Mlati, 1 Agustus 2016

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran


Ervin Iswandayani, S.Pd
 NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL


Lisa Ristyaningsih
 NIM 13401244017

Nama :

Kelas :

No. Abs :

ULANGAN HARIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

KELAS X MIA-2, RABU, 24 AGUSTUS 2016

A. PILIHAN GANDA (Skor 20)

Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya disebut
 - a. Kekuasaan
 - b. Kekuasaan Negara
 - c. Kekuasaan Pemerintah
 - d. Kekuasaan Aktor Politik
 - e. Kekuasaan Eksekutif
2. Secara berurutan macam-macam kekuasaan menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* adalah
 - a. Kekuasaan yudikatif, legislatif, federatif
 - b. Kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif
 - c. Kekuasaan federatif, eksekutif, legislatif
 - d. Kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif
 - e. Kekuasaan eksekutif, legislative, federative
3. Kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai organnya maupun fungsinya merupakan pengertian
 - a. Kekuasaan
 - b. Pembagian Kekuasaan
 - c. Pemisahan Kekuasaan
 - d. Pemusatan Kekuasaan
 - e. Pelaksanaan Kekuasaan
4. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal
 - a. Pasal 2 ayat (1)
 - b. Pasal 2 ayat (2)
 - c. Pasal 3 ayat (1)
 - d. Pasal 23E ayat (2)
 - e. Pasal 23 ayat (1)

5. Dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri merupakan wujud kekuasaan
- a. Kekuasaan Konstitutif
 - b. Kekuasaan Eksekutif
 - c. Kekuasaan Moneter
 - d. Kekuasaan Inspektif
 - e. Kekuasaan Legislatif
6. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD, Gubernur/wakil Gubernur dan DPRD provinsi merupakan tingkatan pemerintahan melalui sistem pembagian kekuasaan secara
- a. Vertikal
 - b. Horizontal
 - c. Vertikal dan Horizontal
 - d. Bertingkat
 - e. Berjenjang
7. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi asas
- a. Demokrasi
 - b. Kepastian Hukum
 - c. Kepentingan Umum
 - d. Proporsionalitas
 - e. Desentralisasi
8. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal diatur dalam UUD 1945 pasal
- a. Pasal 28 A
 - b. Pasal 18 ayat (2)
 - c. Pasal 28 C
 - d. Pasal 18 ayat (5)
 - e. Pasal 8 ayat (1)
9. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah merupakan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada
- a. Pemerintahan Daerah
 - b. Pemerintahan Pusat
 - c. Kementrian Negara
 - d. Aparatur Negara
 - e. Presiden
10. Perhatikan kementrian di bawah ini!
- 1) Kementrian Dalam Negeri
 - 2) Kementrian Pekerjaan Umum
 - 3) Kementrian Kelautan dan Perikanan

- 4) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dari pernyataan diatas yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 ditunjukkan nomor

- a. 1,2,3
- b. 1,3,5
- c. 2,3,5
- d. 2,3,4
- e. 3,4,5

11. Lembaga Non Kementrian yang berkoordinasi di bawah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

- a. Badan Intelejen Negara
- b. Badan Kepegawaian Negara
- c. Arsip Nasional Republik Indonesia
- d. Badan Koordinasi Penanaman Modal
- e. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

12. Berikut merupakan kementrian koordinator kecuali

- a. Kementrian koordinator bidang keamanan
- b. Kementrian koordinator bidang perekonomian
- c. Kementrian koordinator bidang pertahanan
- d. Kementrian koordinator bidang politik dan hukum
- e. Kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat

13. Perhatikan Kementrian di bawah ini!

- 1) Kementerian Riset dan Teknologi
- 2) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- 5) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pernyataan di atas yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah ditunjukkan pada nomor, *kecuali*....

- a. 1 & 2
- b. 2 & 4
- c. 1 & 3
- d. 3 & 5
- e. 4 & 5

14. Urusan kementrian yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan disebut

- a. Undang-Undang Organik
- b. Undang-Undang Nomenklatur

- c. Undang-Undang Pemerintahan
- d. Undang-Undang Dasar Negara 1945
- e. Perumusan dan Penetapan Kebijakan

15. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor

- a. Nomor 103 Tahun 2001
- b. Nomor 103 Tahun 2013
- c. Nomor 103 Tahun 2014
- d. Nomor 104 Tahun 2011
- e. Tahun 104 Tahun 2013

16. Dalam Pancasila yang menunjukkan mencakup tugas dari Kementrian termasuk dalam sila ke

- | | |
|------------------|------------------|
| a. 1 dan 2 | d. 1,3,4 dan 5 |
| b. 1, 2 dan 3 | e. 1,2,3,4 dan 5 |
| c. 1, 2, 3 dan 4 | |

17. Setelah di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo Menteri Perhubungan diduduki oleh....

- a. Sri Mulyani
- b. Eko Putro Sanjoyo
- c. Budi Karya Sumadi
- d. Airlangga Hartarto
- e. Enggartiasto Lukita

18. Perhatikan pernyataan dibawah ini!

- 1) memilih Presiden dan wakil presiden
- 2) mengubah dan menetapkan UUD
- 3) melantik presiden dan wakil presiden
- 4) memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.

Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah

- | | |
|----------|------------|
| a. 1,2,3 | d. 1,3,4 |
| b. 1,3,5 | e. 1,2,3,4 |
| c. 2,3,4 | |

19. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali

- a. memutus pembubaran partai politik

- b. memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- c. memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum
- d. menguji UUD terhadap Undang-Undang
- e. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

20. Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan Negara, merupakan tugas dari lembaga

- a. eksekutif
- b. legislative
- c. yudikatif
- d. DPR
- e. MPR

B. URAIAN (Skor 80)

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia.
2. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia.
3. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia.
4. Berikan minimal 2 (dua) praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

===== Selamat Mengerjakan & Semoga Sukses =====

BERANI JUJUR HEBAT!!!!!!

KUNCI JAWABAN

A. Pilihan ganda

- | | | | |
|------|------|-------|-------|
| 1. A | 6. B | 11. E | 16. E |
| 2. B | 7. E | 12. C | 17. C |
| 3. C | 8. D | 13. D | 18. C |
| 4. C | 9. C | 14. B | 19. D |
| 5. D | 10.D | 15. A | 20. A |

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

**KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN HARIAN 1 (SATU)
TAHUN AJARAN 2016/2017**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Alokasi Waktu : 90 menit
Bentuk Soal & Jumlah : 1. Pilihan Ganda : 15 butir
2. Uraian Singkat : 7 butir
3. Essay : 3 butir

Program : IPS 1
Kurikulum : KTSP

Jenis Soal : Tertulis

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1.	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Budaya Politik - Pengertian Budaya Politik - Komponen Budaya Politik - Peranan Individu 	X/I1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pengertian budaya politik. • Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik • Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli. 	Pilihan ganda	1,2, 3
					Uraian Singkat	3,
					Essay	
	1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe-tipe budaya politik - Pendapat mengenai Budaya Politik di Indonesia - Ciri-Ciri Umum - Faktor Penyebab Perkembangan 	XI/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan. • Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya. 	Pilihan ganda	4, 5, 6,
					Uraian Singkat	1, 2,
					Essay	
	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian sosialisasi pengembangan politik - pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik. - proses sosialisasi 	X/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik • Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik. • Mengidentifikasi proses sosialisasi politik. • Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang • Memetakan sosialisasi politik dan 		7, 8, 9, 10,
					Uraian	4, 5,
					Essay	


Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
		<ul style="list-style-type: none"> politik. sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik 		komunikasi politik		
	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	<ul style="list-style-type: none"> pengertian partisipasi politik. konsep partisipasi politik praktik partisipasi politik. tingkat partisipasi politik debat politik 	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik. Memetakan konsep partisipasi politik. Mengaplikasikan praktik partisipasi politik. Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik Mendeskripsikan tentang debat politik 	Pilihan Ganda Uraian Singkat Essay	11, 12, 13, 14, 15 6, 7 1,2,3

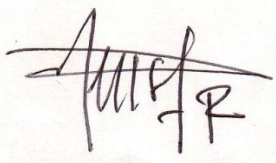
Mlati, 1 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran


Ervin Iswandayani, S.Pd
 NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL


Lisa Ristyaningsih
 NIM 13401244017

Nama :

Kelas :

No. Abs :

ULANGAN HARIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kelas XI IPS – 1, Kamis 12 Agustus 2016

A. Pilihan Ganda (skor 15)

1. Setiap warga negara merupakan insan politik dari suatu sistem politik suatu negara. Kebudayaan masyarakat dengan cirri-ciri yang lebih khas disebut
 - a. Perilaku Politik
 - b. Budaya Politik
 - c. Sistem Politik
 - d. Kepentingan Politik
 - e. Organisasi Politik
2. Budaya politik berdasarkan taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Ranah yang berhubungan dengan pengetahuan
 - a. Evaluatif
 - b. Afektif
 - c. Psikomotorik
 - d. Kognitif
 - e. Atraktif
3. Komponen objek politik yang berupa keputusan dan pendapat obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan disebut komponen yang berorientasi
 - a. Kognitif
 - b. Afektif
 - c. Kinestika
 - d. Psikomotorik
 - e. Evaluatif
4. Perhatikan cirri-ciri budaya politik di bawah ini!
 - 1) Masyarakat mempunyai karakter yang efektif
 - 2) Keikutsertaan masyarakat dikarenakan solidaritas, mobilisasi
 - 3) Masyarakat merasa tidak mampu mengubah sistem politik yang ada
 - 4) Masyarakat menyadari otoritas pemerintah
 - 5) Masyarakat mampu memberi evaluasi terhadap proses politik

Dari pernyataan diatas yang merupakan ciri budaya politik subjek ditunjukkan nomor

- a. 3,4,5
- b. 1,3,5
- d. 1,2,3
- e. 2,3,4

- c. 1,3,4
5. Dilihat dari gaya kepemimpinannya perkembangan budaya politik pada masa orde baru adalah
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Demokratik | d. Kharismatik, Ideologi |
| b. Ideologi primordial | e. Pragmatik Patrimonial |
| c. Otokratik | |
6. Budaya politik dengan sikap mental yang mutlak memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap sempurna dan tidak dapat di ubah lagi merupakan cirri budaya politik
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Militan | d. Sikap mental akomodatif |
| b. Toleransi | e. Parokial |
| c. Sikap mental absolut | |
7. Dibawah ini yang merupakan fungsi output politik adalah
- Pembuatan kebijakan, tujuan sosialisasi politik
 - Penerapan kebijakan, fungsi sosialisasi politik
 - Sifat sosialisasi politik, hakikat sosialisasi politik
 - Ajudikasi kebijakan, peranan sosialisasi politik
 - Penerapan kebijakan, ajudikasi kebijakan, pembuatan kebijakan
8. Sekolah menjadi salah satu sarana sosialisasi politik yang penting karena
- Sekolah merupakan tempat penanaman nilai-nilai politik yang actual
 - Sekolah merupakan faktor penentu dalam sosialisasi politik
 - Sekolah merupakan tempat yang akan menghasilkan masyarakat aktif dalam berpolitik
 - Siswa akan memperoleh pengetahuan awal tentang politik yang benar dari sudut akademis
 - Siswa dapat mengetahui perkembangan politik secara efisien
9. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik disebut
- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Rekrutmen politik | d. Partisipasi politik |
| b. Artikulasi politik | e. Kepentingan politik |
| c. Sosialisasi politik | |
10. Proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik secara *emotional learning* maupun indoktrinasi politik yang manifes dan dimediasi, Pengertian tersebut di kemukakan oleh
- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Robert Le Vine | d. Irvin L. Child |
| b. Hyman | e. Sidney Verba |
| c. Myron Weiner | |

11. Berikut merupakan fungsi dari partai politik, *kecuali*
- a. Represi
 - b. Rekrutmen politik
 - c. Artikulasi kepentingan
 - d. Persuasi
 - e. Reshuffle
12. Hal yang harus dihindari oleh masyarakat ketika pesta demokrasi diselenggarakan adalah
- a. Melaksanakan pemilu dengan tertib
 - b. Menjadi golput dalam pemilu
 - c. Member kebebasan menentukan pilihan
 - d. Melaksanakan pemilu dengan asas *luberjurdil*
 - e. Tidak menekan masyarakat untuk memilih
13. Perhatikan uraian dasar hukum berikut!
- 1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998
 - 4) Undang-Undang No 39 Tahun 2008
 - 5) Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945
- Dari uraian diatas yang merupakan dasar hukum debat politik, *kecuali*
- a. 1 & 2
 - b. 1 & 3
 - c. 2 & 3
 - d. 3 & 4
 - e. 4 & 5
14. Perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan berseedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan terlebih perubahan yang serba cepat merupakan cirri perilaku politik
- a. Radikal
 - b. Moderat
 - c. Status Quo
 - d. Konservatif
 - e. Liberal
15. Yang tidak termasuk wujud partisipasi positif masyarakat sebagai insan politik antara lain sebagai berikut
- a. Membentuk organisasi sosial politik
 - b. Aktif dalam partai politik
 - c. Memprovokasi masa untuk menentang kebijakan politik secara anarki
 - d. Memperjuangkan hak politik
 - e. Tidak menjadi golongan putih saat pemilu

B. Uraian Singkat. Isilah titik-titik dibawah ini! (skor 25)

Budaya politik di Indonesia memiliki tiga tipe budaya politik, yang diantaranya adalah _____, _____, _____. Selain itu

budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan yang salah satunya adalah budaya politik _____ dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternative yang baik. Di sadari ataupun tidak pada dasarnya setiap warga negara merupakan insan politik dari suatu sistem politik di suatu negara yang mana ada seorang tokoh ahli bernama _____ yang mengemukakan pendapatnya mengenai budaya politik yaitu sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik di lakukan.

_____ merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, dictator maupun sistem politik lainnya. Dalam proses sosialisasi politik Rush dan Althoff mengemukakan fungsi sosialisasi politik yang terbagi menjadi dua yaitu _____ dan _____.

Dalam perkembangannya adanya konsep partisipasi politik semakin dianggap penting karena member gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dengan demikian salah satu ahli bernama _____ mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Adanya macam-macam politik yaitu radikal, moderat, _____, _____, dan _____ yang merupakan wujud dari tingkah laku para aktor politik, warga negara atau interaksi antar pemerintah dan masyarakat.

C. Essay (skor 60)
Lengkapilah bagian kosong di dalam tabel!

No.	Nama Sistem	Kelebihan Sistem	Kekurangan
1.	a. Rakyat mengenal dengan baik orang yang mewakili daerahnya. b. Wakil setiap daerah sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyat. c.	a. Suara dari peserta pemilu yang kalah akan hilang, tidak dapat digabungkan. b. c. Wakil rakyat yang

		d.	menang dalam satu wilayah lebih memperhatikan wilayahnya sendiri, terkadang mengabaikan kepentingan nasional. d.
2.	Proporsional	a. b. c.	a. Peranan pemimpin partai sangat menentukan dalam penetapan daftar calon Badan Perwakilan Rakyat. b. Calon-calon yang diikutsertakan dalam pemilu kurang atau tidak dikenal oleh pemilih. c.

3.	Gabungan	<p>a. Sistem pemilihan presiden langsung lebih demokratis karena langsung melibatkan partisipasi rakyat.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p>	<p>a. Sistem memberikan peluang untuk menguntungkan kandidat dari partai besar dengan dana besar.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>

===== Selamat Mengerjakan & Semoga Sukses =====

KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda

1. E
2. C
3. E
4. B
5. E
6. B
7. D
8. D
9. E
10. D
11. E
12. A
13. C
14. E
15. E

Uraian Singkat

1. Parokial, Subjek (Kaula), Partisipan
2. Militan
3. Sidney and Verba
4. Sosialisasi Politik
5. Melatih Individu, Memelihara Sistem Politik
6. Huntington & Nelson

7. Liberal, Konservatif, Status Quo

Essay

1. Distrik,

Kelebihan :

- Adanya hubungan yang erat antara wakil distrik dengan rakyatnya
- Wakil distrik sangat memperhatikan dan memperjuangkan distriknya

Kelemahan :

- Meski partai besar berkuasa, jika suatu distrik kalah dalam pemilu, maka suaranya tidak terwakili distrik itu.
- Golongan minoritas kurang terwakili.

2. Proporsional,

Kelebihan :

- Lebih demokratis karena semua partai terwakili di parlemen.
- Tidak ada suara yang hilang karena semua digabung secara nasional.
- Badan Perwakilan Rakyat benar-benar menjadi wadah aspirasi rakyat.

Kelemahan :

- Wakil-wakil rakyat yang duduk di pusat kurang memahami dan memperhatikan kepentingan daerah.

3. Gabungan

Kelebihan :

- Presiden terpilih memiliki legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara terbanyak.
- Mampu meminimalisir distorsi demokrasi.
- Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.
- Menggabungkan dua sistem sekaligus.
- Partisipasi rakyat sangat mendukung sistem gabungan.
- Menghindari terjadinya money politik.

Kekurangan :

- Sistem ini menguntungkan partai besar dengan dana besar.
- Kekuasaan presiden sangat besar.
-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

**KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN HARIAN 1 (SATU)
TAHUN AJARAN 2016/2017**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Alokasi Waktu : 90 menit
Bentuk Soal & Jumlah : 1. Pilihan Ganda : 15 butir
2. Uraian Singkat : 7 butir
3. Essay : 3 butir

Program : IPA 2
Kurikulum : KTSP

Jenis Soal : Tertulis

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1.	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Budaya Politik - Pengertian Budaya Politik - Komponen Budaya Politik - Peranan Individu 	X/I1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pengertian budaya politik. • Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik • Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli. 	Pilihan ganda	1,2, 4,
					Uraian Singkat	3,
					Essay	
	1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe-tipe budaya politik - Pendapat mengenai Budaya Politik di Indonesia - Ciri-Ciri Umum - Faktor Penyebab Perkembangan 	XI/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan. • Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya. 	Pilihan ganda	3, 5, 6,
					Uraian Singkat	1, 2,
					Essay	
	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian sosialisasi pengembangan politik - pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik. - proses sosialisasi 	X/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik • Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik. • Mengidentifikasi proses sosialisasi politik. • Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang • Memetakan sosialisasi politik dan 		7, 8, 9, 10,
					Uraian	4, 5,
					Essay	


Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
		<ul style="list-style-type: none"> politik. sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik 		komunikasi politik		
	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	<ul style="list-style-type: none"> pengertian partisipasi politik. konsep partisipasi politik praktik partisipasi politik. tingkat partisipasi politik debat politik 	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik. Memetakan konsep partisipasi politik. Mengaplikasikan praktik partisipasi politik. Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik Mendeskripsikan tentang debat politik 	Pilihan Ganda Uraian Singkat Essay	11, 12, 13, 14, 15 6, 7 1,2,3

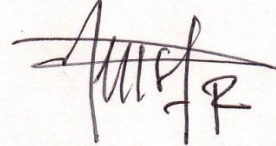
Mlati, 1 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran


Ervin Iswandayani, S.Pd
 NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL


Lisa Ristyaningsih
 NIM 13401244017

Nama :

Kelas :

No. Abs :

ULANGAN HARIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kelas XI IPA – 2, Senin 22 Agustus 2016

A. Pilihan Ganda (skor 15)

1. Budaya politik berdasarkan taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Ranah yang berhubungan dengan pengetahuan

- | | |
|--------------|-----------------|
| a. Afektif | d. Psikomotorik |
| b. Kinestika | e. Evaluatif |
| c. Kognitif | |

2. Setiap warga negara merupakan insan politik dari suatu sistem politik suatu negara. Kebudayaan masyarakat dengan cirri-ciri yang lebih khas disebut

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a. Sistem Politik | d. Kepentingan Politik |
| b. Organisasi Politik | e. Budaya Politik |
| c. Perilaku Politik | |

3. Perhatikan cirri-ciri budaya politik di bawah ini!

- 1) Masyarakat mempunyai karakter yang efektif
- 2) Keikutsertaan masyarakat dikarenakan solidaritas, mobilisasi
- 3) Masyarakat merasa tidak mampu mengubah sistem politik yang ada
- 4) Masyarakat menyadari otoritas pemerintah
- 5) Masyarakat mampu memberi evaluasi terhadap proses politik

Dari pernyataan diatas yang merupakan ciri budaya politik subjek ditunjukkan nomor

- | | |
|----------|----------|
| a. 1,3,4 | d. 2,3,4 |
| b. 3,4,5 | e. 1,2,3 |
| c. 1,3,5 | |

4. Komponen objek politik yang berupa keputusan dan pendapat obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan disebut komponen yang berorientasi

- | | |
|------------|-----------------|
| a. Afektif | d. Psikomotorik |
|------------|-----------------|

- b. Kinestika
 - c. Kognitif
 - e. Evaluatif

- 5. Budaya politik dengan sikap mental yang mutlak memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap sempurna dan tidak dapat di ubah lagi merupakan cirri budaya politik
 - a. Sikap mental akomodatif
 - b. Sikap mental absolut
 - c. Toleransi
 - d. Parokial
 - e. Militan

- 6. Dilihat dari gaya kepemimpinannya perkembangan budaya politik pada masa orde baru adalah
 - a. Ideologi primodial
 - b. Demokratik
 - c. Kharismatik, Ideologi
 - d. Pragmatik Patrimonial
 - e. Otokratik

- 7. Sekolah menjadi salah satu sarana sosialisasi politik yang penting karena
 - a. Sekolahh merupakan faktor penentu dalam sosialisasi politik
 - b. Sekolah merupakan tempat penanaman nilai-nilai politik yang actual
 - c. Siswa dapat mengetahui perkembangan politik secara efisien
 - d. Siswa akan memperoleh pengetahuan awal tentang politik yang benar dari sudut akademis
 - e. Sekolah merupakan tempat yang akan menghasilkan masyarakat aktif dalam berpolitik

- 8. Dibawah ini yang merupakan fungsi output politik adalah
 - a. Penerapan kebijakan, fungsi sosialisasi politik
 - b. Pembuatan kebijakan, tujuan sosialisasi politik
 - c. Ajudikasi kebijakan, peranan sosialisasi politik
 - d. Penerapan kebijakan, ajudikasi kebijakan, pembuatan kebijakan
 - e. Sifat sosialisasi politik, hakikat sosialisasi politik

- 9. Proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik secara *emotional learning* maupun indoktrinasi politik yang manifes dan dimedial, Pengertian tersebut di kemukakan oleh
 - a. Irvin L. Child
 - b. Robert Le Vine
 - c. Sidney Verba
 - d. Hyman
 - e. Myron Weiner

10. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik disebut

- a. Kepentingan politik
- b. Partisipasi politik
- c. Rekrutmen politik
- d. Artikulasi politik
- e. Sosialisasi politik

11. Hal yang harus dihindari oleh masyarakat ketika pesta demokrasi diselenggarakan adalah

- a. Menjadi golput dalam pemilu
- b. Melaksanakan pemilu dengan tertib
- c. Tidak menekan masyarakat untuk memilih
- d. Melaksanakan pemilu dengan asas *luberjurdil*
- e. Member kebebasan menentukan pilihan

12. Perhatikan uraian dasar hukum berikut!

- 1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998
- 4) Undang-Undang No 39 Tahun 2008
- 5) Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945

Dari uraian diatas yang merupakan dasar hukum debat politik, *kecuali*

- a. 1 & 3
- b. 1 & 2
- c. 4 & 5
- d. 2 & 3
- e. 3 & 4

13. Berikut merupakan fungsi dari partai politik, *kecuali*

- a. Persuasi
- b. Artikulasi kepentingan
- c. Rekrutmen politik
- d. Represi
- e. Reshuffle

14. Yang tidak termasuk wujud partisipasi positif masyarakat sebagai insan politik antara lain sebagai berikut

- a. Aktif dalam partai politik
- b. Membentuk organisasi sosial politik
- c. Memperjuangkan hak politik
- d. Tidak menjadi golongan putih saat pemilu
- e. Memprovokasi masa untuk menentang kebijakan politik secara anarki

15. Perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan berseedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan terlebih perubahan yang serba cepat merupakan cirri perilaku politik
- a. Konservatif

b. Status Quo

c. Liberal

d. Radikal

e. Moderat

B. Uraian Singkat. Isilah titik-titik dibawah ini! (skor 25)

Budaya politik di Indonesia memiliki tiga tipe budaya politik, yang diantaranya adalah _____, _____, _____. Selain itu budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan yang salah satunya adalah budaya politik _____ dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternative yang baik. Di sadari ataupun tidak pada dasarnya setiap warga negara merupakan insan politik dari suatu sistem politik di suatu negara yang mana ada seorang tokoh ahli bernama _____ yang mengemukakan pendapatnya mengenai budaya politik yaitu sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik di lakukan.

_____ merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, dictator maupun sistem politik lainnya. Dalam proses sosialisasi politik Rush dan Althoff mengemukakan fungsi sosialisasi politik yang terbagi menjadi dua yaitu _____ dan _____.

Dalam perkembangannya adanya konsep partisipasi politik semakin dianggap penting karena member gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dengan demikian salah satu ahli bernama _____ mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Adanya macam-macam politik yaitu radikal, moderat, _____, _____, dan _____ yang merupakan wujud dari tingkah laku para aktor politik, warga negara atau interaksi antar pemerintah dan masyarakat.

C. Essay (skor 60)

Lengkapilah bagian kosong di dalam tabel!

No.	Nama Sistem	Kelebihan Sistem	Kekurangan
1.	a. Rakyat mengenal	a. Suara dari peserta

		<p>dengan baik orang yang mewakili daerahnya.</p> <p>b. Wakil setiap daerah sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyat.</p> <p>c.</p> <p>d.</p>	<p>pemilu yang kalah akan hilang, tidak dapat digabungkan.</p> <p>b.</p> <p>c. Wakil rakyat yang menang dalam satu wilayah lebih memperhatikan wilayahnya sendiri, terkadang mengabaikan kepentingan nasional.</p> <p>d.</p>
2.	Proporsional	<p>a.</p> <p>b.</p>	<p>a. Peranan pemimpin partai sangat menentukan dalam penetapan daftar calon Badan Perwakilan Rakyat.</p> <p>b. Calon-calon yang diikutsertakan dalam pemilu</p>

		<p>c.</p>	<p>kurang atau tidak dikenal oleh pemilih.</p> <p>c.</p>
3.	Gabungan	<p>a. Sistem pemilihan presiden langsung lebih demokratis karena langsung melibatkan partisipasi rakyat.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p>	<p>a. Sistem memberikan peluang untuk menguntungkan kandidat dari partai besar dengan dana besar.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>

===== Selamat Mengerjakan & Semoga Sukses =====

BERANI JUJUR HEBAT !

Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. C
2. E
3. B
4. E
5. B
6. E
7. D
8. D
9. D
10. E
11. A
12. C
13. E

14. E

15. E

Uraian Singkat

1. Parokial, Subjek (Kaula), Partisipan
2. Militan
3. Sidney and Verba
4. Sosialisasi Politik
5. Melatih Individu, Memelihara Sistem Politik
6. Huntington & Nelson
7. Liberal, Konservatif, Status Quo

Essay

1. Distrik,

Kelebihan :

- Adanya hubungan yang erat antara wakil distrik dengan rakyatnya
- Wakil distrik sangat memperhatikan dan memperjuangkan distriknya

Kelemahan :

- Meski partai besar berkuasa, jika suatu distrik kalah dalam pemilu, maka suaranya tidak terwakili distrik itu.
- Golongan minoritas kurang terwakili.

2. Proporsional,

Kelebihan :

- Lebih demokratis karena semua partai terwakili di parlemen.
- Tidak ada suara yang hilang karena semua digabung secara nasional.
- Badan Perwakilan Rakyat benar-benar menjadi wadah aspirasi rakyat.

Kelemahan :

- Wakil-wakil rakyat yang duduk di pusat kurang memahami dan memperhatikan kepentingan daerah.

3. Gabungan

Kelebihan :

- Presiden terpilih memiliki legitimasi yang sangat kuat karena di dukung oleh suara terbanyak.
- Mampu meminimalisir distorsi demokrasi.
- Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.
- Menggabungkan dua sistem sekaligus.

- Partisipasi rakyat sangat mendukung sistem gabungan.
- Menghindari terjadinya money politik.

Kekurangan :

- Sistem ini menguntungkan partai besar dengan dana besar.
- Kekuasaan presiden sangat besar.
-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

**KISI-KISI PENULISAN SOAL REMIDIAL
TAHUN AJARAN 2016/2017**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Alokasi Waktu : 90 menit
Bentuk Soal & Jumlah :
1. Uraian : 4 butir

Program : MIA
Kurikulum : Kurikulum 2013

Jenis Soal : Tertulis

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1.	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan kementerian negara Indonesia.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mensyukuri keberadaan nilai-nilai pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara. Mensyukuri keberadaan nilai-nilai pancasila dalam tugas dan fungsi kedudukan kementerian negara Indonesia Mampu menjelaskan pengertian kekuasaan negara. 	Pilihan ganda	
	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	Macam-macam sistem kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menyebutkan pasal-pasal yang mengatur sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan macam-macam sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. 	Pilihan ganda Uraian	1,2
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	Tugas dan fungsi lembaga kemeterian Indonesia dan lembaga non kemeterian. Dan klasifikasi kementerian negara Indonesia.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menyebutkan pasal-pasal yang mengatur sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan tugas dan fungsi kementerian negara. Mampu mendeskripsikan tugas dari kemeterian-kementerian negara. 	 Uraian	3

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
				<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui klasifikasi lembaga kementerian Negara Indonesia dan Non Kementerian Indonesia. 		
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	Bentuk praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengkritisi nilai-nilai pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Mampu memberikan keputusan bersama tentang praktik penyelenggaraan negara. Mampu memberikan contoh praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 	Pilihan Ganda Uraian	4

Mlati, 1 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

SOAL REMIDI !

Kelas : X MIA 2

1. Jelaskan pengertian kekuasaan negara!
2. a. Jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal!
b. Jelaskan pembagian kekuasaan secara vertical!
3. Sebutkan tugas Kementerian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara !
4. Sebutkan klasifikasi kementerian negara RI berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara!

JAWABAN

1. **Kekuasaan Negara** adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain.
2. a. Pembagian kekuasaan secara vertikal dapat diartikan bahwa kekuasaan dibagi secara teritorial atau wilayah kekuasaan. Sebagai contoh, adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk sebuah negara kesatuan.
b. Sedangkan, pembagian kekuasaan secara horizontal dapat diartikan bahwa kekuasaan dibagi menurut fungsi-fungsi tertentu. Sebagai contoh, adanya sebuah badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di negara kesatuan.
3. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi,

susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

1. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
3. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:
 - a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/non kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
 1. Kementerian Dalam Negeri
 2. Kementerian Luar Negeri
 3. Kementerian Pertahanan

b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kementerian Perindustrian
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Pertanian
7. Kementerian Kehutanan
8. Kementerian Perhubungan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Kementerian Pekerjaan Umum
12. Kementerian Kesehatan
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Agama
16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika

c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Riset dan Teknologi
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Kementerian Lingkungan Hidup
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
10. Kementerian Perumahan Rakyat
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

KISI-KISI PENULISAN SOAL REMIDIAL (SATU)

TAHUN AJARAN 2016/2017

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Alokasi Waktu : 90 menit

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Bentuk Soal & Jumlah : 1. Pilihan Ganda : 10 butir
2. Essay : 4 butir

Program : IPA-IPS

Kurikulum : KTSP

Jenis Soal : Tertulis

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1.	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Budaya Politik - Pengertian Budaya Politik - Komponen Budaya Politik - Peranan Individu 	X/I1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pengertian budaya politik. • Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik • Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli. 	Pilihan ganda	1,2,
					Essay	1

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
	1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe-tipe budaya politik - Pendapat mengenai Budaya Politik di Indonesia - Ciri-Ciri Umum - Faktor Penyebab Perkembangan 	XI/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan. • Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya. 	Pilihan ganda	3, 4, 5
					Essay	2
	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian sosialisasi pengembangan politik - pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik. 	X/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik • Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik. • Mengidentifikasi proses sosialisasi politik. • Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang 		6,7,
					Uraian	
					Essay	3

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
		<ul style="list-style-type: none"> - proses sosialisasi politik. - sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang - Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik - 		<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik 		
	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	<ul style="list-style-type: none"> - pengertian partisipasi politik. - konsep partisipasi politik - praktik partisipasi politik. 	X/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik • • Memetakan konsep partisipasi politik. • Mengaplikasikan praktik partisipasi politik. • Mengidentifikasi tingkat partisipasi politi 	Pilihan Ganda Essay	8,9,10 4


Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
		<ul style="list-style-type: none"> - tingkat partisipasi politik - debat politik 		<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan tentang debat politik 		

Mengetahui,

Mlati, 1 Agustus 2016

Guru Mata Pelajaran


Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL


Lisa Ristyaningsih
NIM 13401244017

SOAL REMIDIAL 1

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Budaya politik merupakan sistem kepercayaan empiric dan nilai-nilai yang menegaskan situasi dari tindakan politik yang dilakukan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
 - a. Almond dan Polwell
 - b. Alan R. Ball
 - c. Austin Ranney
 - d. Rusandi Sumintapura
 - e. Sidney Verba
2. Tokoh yang berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa, adalah
 - a. R. O'G Anderson
 - b. Almond dan Verba
 - c. Austin Ranney
 - d. Miriam budiarjo
 - e. G. Bingham Powell, Jr.
3. Budaya politik dimana orang-orang sama sekali tidak menyadari adanya pemerintahan dan politik dinamakan
 - a. Budaya politik subjek
 - b. Budaya politik partisipan
 - c. Budaya politik parochial
 - d. budaya politik demokratis
 - e. budaya politik otoriter
4. Berikut ini adalah unsur-unsur umum yang termasuk dalam kriteria budaya politik, kecuali
 - a. Pengetahuan
 - b. Mitos
 - c. Adat istiadat
 - d. takhayul
 - e. mata pencaharian
5. Komponen objek politik yang berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik peranan, dan segala kewajibannya disebut komponen yang berorientasi
 - a. Kognitif
 - b. Afektif
 - c. Kinestika
 - d. evaluatif
 - e. psikomotorik
6. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik menurut Almond adalah dalam rangka
 - a. Penyesuaian terhadap lingkungan
 - b. Mencapai kesatuan dalam masyarakat
 - c. Mencapai kemashuran masyarakat
 - d. Mencapai masyarakat adil makmur
 - e. Mencapai pemerintahan yang kuat
7. Aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk aktif dalam kehidupan politik dinamakan

- a. Sistem politik
 - b. Partisipasi politik
 - c. Dinamika politik
 - d. sosialisasi politik
 - e. komunikasi politik
8. Dibawah ini merupakan penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi dalam proses politik, kecuali
- a. Modernisasi dalam bidang kehidupan
 - b. Perubahan struktur kelas sosial
 - c. Pengaruh kaum intelektual dan modern
 - d. Konflik antarpemimpin politik
 - e. Dinamika masyarakat pluralism
9. Model kebudayaan politik yang di dalamnya aktivitas politik dapat berkompetensi adalah
- a. Sistem otoriter
 - b. Demokratis praindustrial
 - c. Demokratis pascaindustrial
 - d. sistem diktator
 - e. demokratik industrial
10. Di negara demokratik pada umumnya proses pengambilan keputusan didominasi oleh oprang-orang
- a. Oportunis
 - b. Pejabat public
 - c. *Establishment*
 - d. infrastruktur
 - e. suprastruktur

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Tulislah unsure-unsur budaya politik yang menonjol dalam sistem politik di Indonesia!
2. Jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi!
3. Jelaskan 4 (empat) tahapan dalam sosialisasi politik yang dilakukan seseorang anak menurut Easton dan Denis!
4. Jelaskan bagaimana pandangan Hyman tentang hubungan antara sosialisasi politik dengan komunikasi !

KUNCI JAWABAN !

PILIHAN GANDA

- 1. E
- 2. A
- 3. C
- 4. E
- 5. A
- 6. B
- 7. B
- 8. E
- 9. B
- 10. E

URAIAN

1. Menurut Afan Gaffar (Gaffar, 2004:106-118) budaya politik Indonesia yang dominan adalah yang berasal dari etnis Jawa, kecenderungan kepada patronage dan kecenderungan neo-patrimonialistik
2. Budaya politik partisipan (participant political culture) Yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.pada budaya politik partisipan, masyarakatnya berperan aktif dalam politik. Budaya partisipan merupakan lahan subur bagi demokrasi. Masyarakat merasa perlu untuk terlibat dalam proses politik negaranya, mereka menyelesaikan suatu masalah politik karena mereka setidaknya merasa memiliki kekuatan politik. Tipe budaya politik ini paling ideal bagi masyarakat demokrasi
Sedangkan, -Budaya politik toleransi Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Budaya politik ini berusaha mencari konsensus yang wajar, yaitu selalu membuka pintu untuk kerja sama. Yang dilakukan budayapolitik ini adalah sikap netral atau kritis terhadap ide orang, bukan curiga terhadap orang.
3. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu :
 - 1) *Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.*
 - 2) *Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.*
 - 3) *Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).*
 - 4) *Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.*
4. Pandangan Hyman tentang hubungan antara sosialisasi politik dengan komunikasi politik sangat erat hubungannya, karena sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar yang kontinu yang melibatkan belajar secara emosional maupun indoktrinasi politik yang nyata dan di mediai oleh sarana komunikasi dan segala partisipasi dari pengalaman si individu yang menjalaninya.maka dari itu aktivitas komunikasi politik berfungsi sebagai suatu proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi politik tersebut.

LEMBAR KERJA SISWA !

Setiap wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain tentunya pernah mengalami beberapa permasalahan.

Tugas :

Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan !

No	Permasalahan	Negara yang terlibat	Penyelesaian
1	Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.	Malaysia	Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian wilayah Malaysia.
2			
3			
4			
5			

LEMBAR KERJA SISWA !

Setelah mempelajari mengenai materi “ciri-ciri masyarakat madani (pengertian, ciri-ciri, karakteristik dll), lakukan diskusi kelompok. Langkah-langkah :

- a) Bentuk kelompok 1 baris setiap kelompok.
- b) Siswa berdiskusi untuk membuat wacana atau kliping sesuai dengan topik pembelajaran yaitu dengan bentuk portopolio.
- c) Setiap kelompok bekerja sama (berdiskusi untuk menemukan ide pokok serta member tanggapan terhadap wacana kemudian dibuat se kreatif mungkin, lalu ditempel di sebuah media yang sudah di sediakan.
- d) Mempresentasikan hasil portopolio (setiap kelompok).

DAFTAR NILAI UJIAN

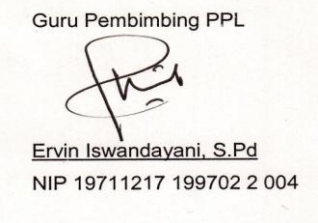
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
 Nama Tes : Ulangan Harian Satu
 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Kelas/Program : X MIA 2
 Tanggal Tes : 22 Agustus 2016
 SK/KD : -

KKM
78

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANG AN
			BENAR	SALAH	SKOR			
1	ADERIAN FADILA	L	7	13	7	68,0	75,0	Belum tuntas
2	ALDI PRABOWO	L	9	11	9	73,0	82,0	Tuntas
3	AMANUR ZAHIROH	P	8	12	8	73,0	81,0	Tuntas
4	ANITA DWI SETYOWATI	L	7	13	7	68,0	75,0	Belum tuntas
5	AURA NADIFA	L	8	12	8	73,0	81,0	Tuntas
6	BAGAS ZABRAN ZAAFARANI	P	9	11	9	68,0	77,0	Belum tuntas
7	DHYANA UBHAYA PRAMESI	P	14	6	14	70,0	84,0	Tuntas
8	ELISABETH SHERLLY AYU ANANTA	L	9	11	9	68,0	77,0	Belum tuntas
9	FAIZA ARDHINE LATIFA	P	10	10	10	68,0	78,0	Tuntas
10	FARAH SALSABILA	P	11	9	11	68,0	79,0	Tuntas
11	HANY AHYUN USADANI	P	10	10	10	68,0	78,0	Tuntas
12	HUZAIFATIN NASHIMIMA	P	12	8	12	68,0	80,0	Tuntas
13	ILHAM NUR FARIZKY	L	10	10	10	43,0	53,0	Belum tuntas
14	IRFAN ALDI FITRIAN	L	11	9	11	65,0	76,0	Belum tuntas
15	ISRA'IM ABDUL AZIZ PRAYOGO	L	9	11	9	73,0	82,0	Tuntas
16	JOWINKA MEDINA RAHMADHANI	P	13	7	13	70,0	83,0	Tuntas
17	LISANDRA CITRA E.P	P						
18	MAHERNI BERNA RAHMAWATI	P	10	10	10	73,0	83,0	Tuntas
19	MELLANIA INDAH PUSPADEWI	P	11	9	11	78,0	89,0	Tuntas
20	NAFISAH INKA NURLITA	P	11	9	11	68,0	79,0	Tuntas
21	NOURMA PRIMA SARI	P	13	7	13	78,0	91,0	Tuntas
22	RACHMA VITA UTAMI	P	18	2	18	73,0	91,0	Tuntas
23	REYNALDO EMANUEL SUGI	L	10	10	10	73,0	83,0	Tuntas
24	RIDHO RAHMANTO	L	11	9	11	73,0	84,0	Tuntas
25	RISMA FEBIANJASTI	L	8	12	8	68,0	76,0	Belum tuntas
26	ROSIANA DEWI A	P	10	10	10	73,0	83,0	Tuntas
27	SEKAR ARUM PRABANINGTYAS	P	16	4	16	58,0	74,0	Belum tuntas
28	SHIBGHOTULLOH UMAR ROSYADI	P	6	14	6	63,0	69,0	Belum tuntas
29	SHINTA CHOIRANI	L	15	5	15	73,0	88,0	Tuntas
30	TITIAN NUR HIDAYATI	P	14	6	14	68,0	82,0	Tuntas
31	TSABITA SILMINAJA	P						
32	VERA INTAN RAHMAWATI	L	10	10	10	73,0	83,0	Tuntas
33	VICA RIZKY CAHYANI		9	11	9	68,0	77,0	Belum tuntas
34	YASWAN		9	11	9	68,0	77,0	Belum tuntas
- Jumlah peserta test = - Jumlah yang tuntas = - Jumlah yang belum tuntas = - Persentase peserta tuntas = - Persentase peserta belum tuntas =		32	Jumlah Nilai = Nilai Terendah = Nilai Tertinggi = Rata-rata = Standar Deviasi =		338	2212	2550	
		21			6,00	43,00	53,00	
		11			18,00	78,00	91,00	
		65,6			10,56	69,13	79,69	
		34,4			2,70	6,23	6,93	

Mengetahui :

SMA Negeri 1 Mlati, 1 September 2016



ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Nama Tes : Ulangan Harian Satu
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X MIA 2
Tanggal Tes : 22 Agustus 2016
SK/KD : -

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
1	0,308	Baik	0,969	Mudah	CDE	Cukup Baik
2	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ACDE	Tidak Baik
3	0,494	Baik	0,500	Sedang	ADE	Revisi Pengecoh
4	0,340	Baik	0,750	Mudah	BE	Cukup Baik
5	0,480	Baik	0,625	Sedang	E	Revisi Pengecoh
6	0,293	Cukup Baik	0,344	Sedang	CE	Revisi Pengecoh
7	0,327	Baik	0,656	Sedang	C	Revisi Pengecoh
8	0,295	Cukup Baik	0,094	Sulit	-	Cukup Baik
9	0,293	Cukup Baik	0,344	Sedang	A	Revisi Pengecoh
10	0,656	Baik	0,219	Sulit	-	Cukup Baik
11	0,028	Tidak Baik	0,906	Mudah	BC	Tidak Baik
12	0,285	Cukup Baik	0,063	Sulit	-	Cukup Baik
13	0,380	Baik	0,188	Sulit	B	Cukup Baik
14	0,495	Baik	0,406	Sedang	-	Baik
15	0,395	Baik	0,375	Sedang	-	Baik
16	0,132	Tidak Baik	0,719	Mudah	ABC	Tidak Baik
17	0,276	Cukup Baik	0,125	Sulit	-	Cukup Baik
18	0,237	Cukup Baik	0,625	Sedang	-	Baik
19	0,340	Baik	0,781	Mudah	E	Cukup Baik
20	0,365	Baik	0,875	Mudah	E	Cukup Baik

ANALISIS BUTIR SOAL ESSAY

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
1	0,290	Cukup Baik	0,852	Mudah	Cukup Baik
2	0,776	Baik	0,925	Mudah	Cukup Baik
3	0,075	Tidak Baik	0,719	Mudah	Tidak Baik
4	0,757	Baik	0,961	Mudah	Cukup Baik

Mengetahui :

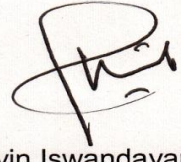
SMA Negeri 1 Mlati, 1 September 2016
Guru Mata Pelajaran

Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati



Drs. Aris Sutardi
NIP 19640128 199003 1 003

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Nama Tes : Ulangan Harian Satu
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : X MIA 2
Tanggal Tes : 22 Agustus 2016
SK/KD : -

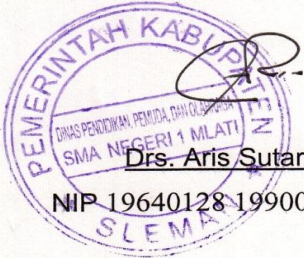
No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
1	96,9*	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2	0,0	100*	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3	0,0	50,0	50*	0,0	0,0	0,0	100,0
4	21,9	0,0	75*	3,1	0,0	0,0	100,0
5	9,4	3,1	25,0	62,5*	0,0	0,0	100,0
6	62,5	34,4*	0,0	3,1	0,0	0,0	100,0
7	21,9	3,1	0,0	9,4	65,6*	0,0	100,0
8	43,8	21,9	9,4	9,4*	15,6	0,0	100,0
9	0,0	40,6	34,4*	9,4	15,6	0,0	100,0
10	12,5	53,1	6,3	21,9*	6,3	0,0	100,0
11	3,1	0,0	0,0	6,3	90,6*	0,0	100,0
12	37,5	6,3	6,3*	6,3	43,8	0,0	100,0
13	37,5	0,0	25,0	18,8*	18,8	0,0	100,0
14	12,5	40,6*	18,8	12,5	15,6	0,0	100,0
15	37,5*	21,9	12,5	12,5	15,6	0,0	100,0
16	0,0	0,0	0,0	28,1	71,9*	0,0	100,0
17	9,4	25,0	12,5*	37,5	15,6	0,0	100,0
18	3,1	3,1	62,5*	12,5	18,8	0,0	100,0
19	3,1	3,1	15,6	78,1*	0,0	0,0	100,0
20	87,5*	3,1	3,1	6,3	0,0	0,0	100,0

Mengetahui :

SMA Negeri 1 Mlati, 1 September 2016

Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati

Guru Pembimbing PPL



Drs. Aris Sutardi

NIP 19640128 199003 1 003



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

DAFTAR NILAI UJIAN

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Nama Tes : Ulangan Harian Satu
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : XI IPS 1
Tanggal Tes : 11 Agustus 2016
SK/KD : -

KKM
78

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANGAN
			BENAR	SALAH	SKOR			
1	ABDULLAH MUHAMMAD YUSUF	L	6	9	6	35,0	41,0	Belum tuntas
2	AHMAD FAUZI	L	13	2	13	68,0	81,0	Tuntas
3	AINA SHAFIRA	P	13	2	13	74,0	87,0	Tuntas
4	BAGAS TEGAR SUMANTRI	L	8	7	8	57,0	65,0	Belum tuntas
5	BHAWINKA KINENNARA PRASETYA	L	6	9	6	8,0	14,0	Belum tuntas
6	CHRISANTIA SEKAR IKARINI	P	13	2	13	75,0	88,0	Tuntas
7	DEVINDA KARINA ALIFSAVA	P	9	6	9	47,0	56,0	Belum tuntas
8	DIMAS ROYAN FIRDAUSY	L	11	4	11	55,0	66,0	Belum tuntas
9	EKA PUTRI	P	11	4	11	65,0	76,0	Belum tuntas
10	FAIZAH NUR FAHMIDA	P	13	2	13	80,0	93,0	Tuntas
11	FEBRIAN YENA REMALIA	P	8	7	8	64,0	72,0	Belum tuntas
12	FERNANDO RANGGA SAPUTRA	L	7	8	7	31,0	38,0	Belum tuntas
13	KHOIRUNNISYA RESTU WIJAYA	P	13	2	13	59,0	72,0	Belum tuntas
14	KUNNI SARIFATU ZUHRİYAH	P	10	5	10	77,0	87,0	Tuntas
15	LINTANG NUR PRATIWI	P	9	6	9	24,0	33,0	Belum tuntas
16	LUSY ANTASARI	P						
17	MARISSA HELGA LILIANANDA	P	10	5	10	79,0	89,0	Tuntas
18	MUHAMMAD DAFFA HARZA ARIFIN	L	5	10	5	32,0	37,0	Belum tuntas
19	NEVA AGSHA WINAYANG	P	12	3	12	68,0	80,0	Tuntas
20	NITA ANIDA	P	11	4	11	49,0	60,0	Belum tuntas
21	OKTA PRATIWI	P	13	2	13	61,0	74,0	Belum tuntas
22	PUTRI ANGGRAHENI	P	13	2	13	78,0	91,0	Tuntas
23	RAHMADHAN ARYA YOGYANTARA	L	7	8	7	56,0	63,0	Belum tuntas
24	RAHMAT YUSUF NUR HUDA	L	9	6	9	66,0	75,0	Belum tuntas
25	RESHA ANJAR USYAN	L	9	6	9	42,0	51,0	Belum tuntas
26	RISA ANIN DITA	P	13	2	13	65,0	78,0	Tuntas
27	SAFIRA NADA ATHAYA	P	13	2	13	72,0	85,0	Tuntas
28	SIKKA MUTIARA SILMY	P	7	8	7	35,0	42,0	Belum tuntas
29	SONNE MOHAMMADANER	L	11	4	11	45,0	56,0	Belum tuntas
30	TASYA PUTRI KALYANA	P	9	6	9	59,0	68,0	Belum tuntas
31	VIA ENGGAR WIJAYANTI	P	12	3	12	85,0	97,0	Tuntas
32	ZULHANTON BAGASATYA	L	7	8	7	46,0	53,0	Belum tuntas
- Jumlah peserta test =		31	Jumlah Nilai =			311	1757	2068
- Jumlah yang tuntas =		11	Nilai Terendah =			5,00	8,00	14,00
- Jumlah yang belum tuntas =		20	Nilai Tertinggi =			13,00	85,00	97,00
- Persentase peserta tuntas =		35,5	Rata-rata =			10,03	56,68	66,71
- Persentase peserta belum tuntas =		64,5	Standar Deviasi =			2,58	18,63	20,58

Mengetahui :

Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati



Drs. Aris Sutardi
 NIP 19640128 199003 1 003

Guru Pembimbing PPL

Ervin Iswandayani, S.Pd
 NIP 19711217 199702 2 004

ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA

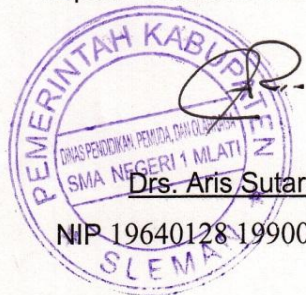
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Nama Tes : Ulangan Harian Satu
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : XI IPS 1
Tanggal Tes : 11 Agustus 2016
SK/KD : -

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
1	0,418	Baik	0,935	Mudah	BCD	Cukup Baik
2	0,653	Baik	0,710	Mudah	D	Cukup Baik
3	0,421	Baik	0,839	Mudah	B	Cukup Baik
4	0,000	Tidak Baik	0,000	Sulit	B	Tidak Baik
5	0,626	Baik	0,548	Sedang	-	Baik
6	0,490	Baik	0,839	Mudah	AC	Cukup Baik
7	0,523	Baik	0,548	Sedang	E	Revisi Pengecoh
8	0,361	Baik	0,806	Mudah	AC	Cukup Baik
9	0,213	Cukup Baik	0,839	Mudah	A	Cukup Baik
10	0,778	Baik	0,484	Sedang	-	Baik
11	-0,172	Tidak Baik	0,323	Sedang	-	Tidak Baik
12	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	BCDE	Tidak Baik
13	0,779	Baik	0,548	Sedang	-	Baik
14	0,701	Baik	0,645	Sedang	-	Baik
15	-0,142	Tidak Baik	0,968	Mudah	ABC	Tidak Baik

ANALISIS ESSAY

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
1	0,788	Baik	0,585	Sedang	Baik
2	0,976	Baik	0,701	Mudah	Cukup Baik

Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati



Drs. Aris Sutardi

NIP 19640128 199003 1 003

Guru Pembimbing PPL

Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

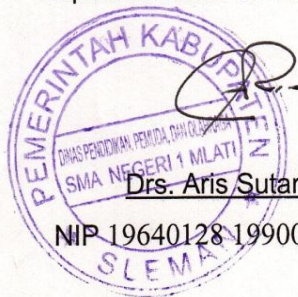
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Nama Tes : Ulangan Harian Satu
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : XI IPS 1
Tanggal Tes : 11 Agustus 2016
SK/KD : -

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
1	6,5	0,0	0,0	0,0	93,5*	0,0	100,0
2	3,2	12,9	71*	0,0	12,9	0,0	100,0
3	6,5	0,0	6,5	3,2	83,9*	0,0	100,0
4	74,2	0*	3,2	12,9	9,7	0,0	100,0
5	12,9	3,2	3,2	25,8	54,8*	0,0	100,0
6	0,0	83,9*	0,0	12,9	3,2	0,0	100,0
7	29,0	9,7	6,5	54,8*	0,0	0,0	100,0
8	0,0	6,5	0,0	80,6*	12,9	0,0	100,0
9	0,0	9,7	3,2	3,2	83,9*	0,0	100,0
10	16,1	16,1	12,9	48,4*	6,5	0,0	100,0
11	3,2	48,4	3,2	12,9	32,3*	0,0	100,0
12	100*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
13	16,1	6,5	54,8*	12,9	9,7	0,0	100,0
14	6,5	3,2	12,9	12,9	64,5*	0,0	100,0
15	0,0	0,0	0,0	3,2	96,8*	0,0	100,0

Mengetahui :

SMA Negeri 1 Mlati, 1 September 2016

Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati



Drs. Aris Sutardi

NIP 19640128 199003 1 003

Guru Pembimbing PPL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ervin".

Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

DAFTAR NILAI UJIAN

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
 Nama Tes : Ulangan Harian Satu
 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Kelas/Program : XI IPA 2
 Tanggal Tes : 11 Agustus 2016
 SK/KD : -

KKM
78

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			SKOR TES ESSAY	NILAI	KETERANG AN	
			BENAR	SALAH	SKOR				
1	AGATHA EKA SUSANTI	P	3	12	3	82,0	85,0	Tuntas	
2	AGNES DEVIANA HERAWATI	P	8	7	8	45,0	53,0	Belum tuntas	
3	AGUS SETIAWAN	L	12	3	12	85,0	97,0	Tuntas	
4	AJENG PUTRI RAMADANI	P	8	7	8	71,0	79,0	Tuntas	
5	ANISYA ANJARWATI	P	8	7	8	85,0	93,0	Tuntas	
6	ANNASYA ISNA KHANIFA	P	12	3	12	85,0	97,0	Tuntas	
7	ARI ISNAINI PUTRI	P	7	8	7	60,0	67,0	Belum tuntas	
8	ARINA RAHMI MORGANA	P	11	4	11	78,0	89,0	Tuntas	
9	ASTRI KHASNA RISMAWATI	P	12	3	12	85,0	97,0	Tuntas	
10	CRYSA LIANA DHIKA	P	4	11	4	80,0	84,0	Tuntas	
11	DAVID SANJAYA	L	11	4	11	80,0	91,0	Tuntas	
12	DENIS DANISWARA	L	10	5	10	75,0	85,0	Tuntas	
13	ELIS RACHMANINGRUM	P	4	11	4	85,0	89,0	Tuntas	
14	FAZA NUR HUDA ROSYADA	P	12	3	12	80,0	92,0	Tuntas	
15	FEBRIARISKA NURMAYANI	P	10	5	10	85,0	95,0	Tuntas	
16	FEBY ANANTA NUGRAHA	L	9	6	9	75,0	84,0	Tuntas	
17	INTAN WAHYU NUGRAHAENI	P	8	7	8	79,0	87,0	Tuntas	
18	LIDIA PRASTI AMBVAR SARI	P	10	5	10	85,0	95,0	Tuntas	
19	LUKLUK NUR AINI	P	9	6	9	69,0	78,0	Tuntas	
20	LUTVI ASYIFA RANI	P	7	8	7	65,0	72,0	Belum tuntas	
21	MURTI LINTANG SARI	P	3	12	3	85,0	88,0	Tuntas	
22	NADA AFIA QURANI	P	10	5	10	85,0	95,0	Tuntas	
23	NIKEN DIAH PUSPITASARI	P	9	6	9	85,0	94,0	Tuntas	
24	NINDA SASQIAN	P	8	7	8	74,0	82,0	Tuntas	
25	SINTIA CAHYA WULANDARI	P	11	4	11	85,0	96,0	Tuntas	
26	TACHSA AMANDA AFFANI	P	8	7	8	78,0	86,0	Tuntas	
27	TYA INAYAH NUR RAHMAWATI	P	10	5	10	85,0	95,0	Tuntas	
28	VIOLA DESSY ROMADONI	P	3	12	3	85,0	88,0	Tuntas	
29	WIEM GRATANDIA YOSKY	L	7	8	7	80,0	87,0	Tuntas	
30	YESAYA RAHUTAMA SATRIA J	L	9	6	9	57,0	66,0	Belum tuntas	
31	YUSTINUS YOGA HENRIYANTA	L	9	6	9	76,0	85,0	Tuntas	
32	ZHARFAN MIFTAHUL HUDA	L	8	7	8	72,0	80,0	Tuntas	
- Jumlah peserta test =			32	Jumlah Nilai =		270	2481	2751	
- Jumlah yang tuntas =			28	Nilai Terendah =		3,00	45,00	53,00	
- Jumlah yang belum tuntas =			4	Nilai Tertinggi =		12,00	85,00	97,00	
- Persentase peserta tuntas =			87,5	Rata-rata =		8,44	77,53	85,97	
- Persentase peserta belum tuntas =			12,5	Standar Deviasi =		2,66	9,66	10,18	

Mengetahui :

SMA Negeri 1 Mlati, 1 September 2016


Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati



Drs. Aris Sutardi

NIP 19640128 199003 1 003

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Nama Tes : Ulangan Harian Satu
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : XI IPA 2
Tanggal Tes : 11 Agustus 2016
SK/KD : -

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
1	0,678	Baik	0,688	Sedang	B	Revisi Pengecoh
2	0,813	Baik	0,813	Mudah	AD	Cukup Baik
3	0,000	Tidak Baik	0,000	Sulit	B	Tidak Baik
4	0,164	Tidak Baik	0,688	Sedang	C	Tidak Baik
5	0,827	Baik	0,844	Mudah	AD	Cukup Baik
6	0,107	Tidak Baik	0,031	Sulit	D	Tidak Baik
7	-0,009	Tidak Baik	0,875	Mudah	AE	Tidak Baik
8	-0,006	Tidak Baik	0,375	Sedang	E	Tidak Baik
9	0,592	Baik	0,250	Sulit	-	Cukup Baik
10	0,671	Baik	0,625	Sedang	A	Revisi Pengecoh
11	0,748	Baik	0,875	Mudah	CDE	Cukup Baik
12	0,584	Baik	0,469	Sedang	D	Revisi Pengecoh
13	0,648	Baik	0,594	Sedang	-	Baik
14	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ABCD	Tidak Baik
15	0,350	Baik	0,313	Sedang	-	Baik
ANALISIS SOAL ESSAY						
No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir	
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
1	0,804	Baik	0,910	Mudah	Cukup Baik	
2	0,957	Baik	0,913	Mudah	Cukup Baik	

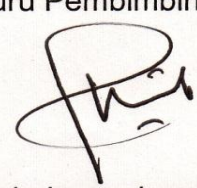
Mengetahui : SMA Negeri 1 Mlati, 1 September 2016

Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati



Drs. Aris Sutardi
NIP 19640128 199003 1 003

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

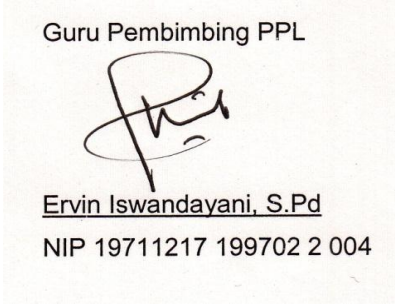
SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Nama Tes : Ulangan Harian Satu
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program : XI IPA 2
Tanggal Tes : 11 Agustus 2016
SK/KD : -

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
1	12,5	0,0	68,8*	12,5	6,3	0,0	100,0
2	0,0	15,6	3,1	0,0	81,3*	0,0	100,0
3	40,6	0*	21,9	31,3	6,3	0,0	100,0
4	21,9	6,3	0,0	3,1	68,8*	0,0	100,0
5	0,0	84,4*	12,5	0,0	3,1	0,0	100,0
6	3,1	40,6	53,1	0,0	3,1*	0,0	100,0
7	0,0	6,3	6,3	87,5*	0,0	0,0	100,0
8	31,3	28,1	3,1	37,5*	0,0	0,0	100,0
9	3,1	59,4	6,3	25*	6,3	0,0	100,0
10	0,0	3,1	18,8	15,6	62,5*	0,0	100,0
11	87,5*	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
12	9,4	18,8	46,9*	0,0	25,0	0,0	100,0
13	3,1	6,3	28,1	3,1	59,4*	0,0	100,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	100*	0,0	100,0
15	3,1	28,1	15,6	21,9	31,3*	0,0	100,0

Mengetahui :

SMA Negeri 1 Mlati, 1 September 2016



DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : X MIA 2

Semester : 1
Tahun Pelajaran : 2016/2017
KKM : 78

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama	KKM	Nilai Harian																							Nilai Rapor	Ketercapaian Kompetensi		
Urut	Induk			Ulangan Harian															Nilai Tugas											
																			Terstruktur				Mandiri							
				1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	2513	Aderian Fadila	75	78																			80	80	100					
2	2514	Aldi Prabowo	82																				70	80	100					
3	2515	Amanur Zahiroh	81																				80	100	70					
4	2516	Anita Dwi Setyowati	75	78																			80	100	70					
5	2517	Aura Nadifa	82																				70	100	100					
6	2518	Bagas Zabran Zaafarani	77	78																			70	80	100					
7	2519	Dhyana Ubhaya Pramesi	84																				80	100	80					
8	2520	Elisabeth Sherlly Ayu Ananta	78																				70	100	80					
9	2521	Faiza Ardhine Latifa	78																				80	100	80					
10	2522	Farah Salsabila	79																				80	100	80					
11	2523	Hany Ahyun Usadani	78																				80	100	80					
12	2524	Huzaifatin Nashimima	80																				80	100	100					
13	2525	Ilham Nur Farizky	53	78																			70	100	80					
14	2526	Irfan Aldi Fitriani	78																				70	80	100					
15	2527	Isra'im Abdul Aziz Prayogo	82																				70	100	80					
16	2528	Jowinka Medina Rahmadhani	83																				80	100	100					
17	2529	Lisandra Citra Eka Paramita	82																				80	100	80					
18	2530	Marheni Berna Rahmawati	83																				80	100	70					
19	2531	Mellania Indah Puspadewi	89																				80	100	80					
20	2532	Nafisah Inka Nurlita	80																				80	100	80					
21	2533	Nourma Prima Sari	91																				80	100	100					
22	2534	Rachma Vita Utami	91																				80	100	100					
23	2535	Reynaldo Emanuel Sugi	83																				80	100	80					
24	2536	Ridho Rahmanto	84																				70	80	100					
25	2537	Risma Febianjasti	76	78																			70	100	80					
26	2538	Rosiana Dewi Aprilia	84																				70	85	80					
27	2539	Sekar Arum Prabaningtyas	74	78																			80	100	80					
28	2540	Sibghotulloh Umar Rosyadi	59	78																			70	100	100					
29	2541	Shinta Choirani	88																				70	100	100					
30	2542	Titian Nur Hidayati	82																				80	100	100					
31	2543	Tsabita Silminaja	80																				80	100	80					
32	2544	Vera Intan Rahmawati	83																				80	100	70					
33	2545	Vica Rizky Cahyani	76	78																			80	100	80					
34	2546	Yaswan	77	78																			70	100	80					

DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : XI IPS 1

Semester : 1
Tahun Pelajaran : 2016/2017
KKM : 78

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																									Nilai Rapor	Ketercapaian Komptensi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Urut	Induk		Ulangan Harian															Nilai Tugas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																		Terstruktur					Mandiri																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : XI IPA 2

Semester : 1
Tahun Pelajaran : 2016/2017
KKM : 78

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama	KKM	Nilai Harian																									Nilai Rapor	Ketercapaian Kompetensi
Urut	Induk			Ulangan Harian															Nilai Tugas											
																			Terstruktur					Mandiri						
				1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	2414	Agatha Eka Susanti	85																			95	70	72						
2	2416	Agnes Deviana H	53	78																		95	80	85						
3	2447	Agus Setiawan	97																			85	80	75						
4	2418	Ajeng Putri R	79																			85	85	75						
5	2383	Anisya Anjarwati	93																			80	70	80						
6	2454	Annasya Isna K	97																			85	80	75						
7	2420	Ari Isnaini Putri	67	78																		90	80	80						
8	2353	Arina Rahmi M	87																			90	80	78						
9	2456	Astri Khasna R	97																			85	80	78						
10	2423	Crysa Liana Dhika	87																			95	80	78						
11	2387	David Sanjaya	91																			85	70	75						
12	2425	Denis Daniswara	85																			85	85	78						
13	2390	Elis Rachmaningrum	89																			70	80	77						
14	2459	Faza Nur Huda R	92																			85	85	77						
15	2393	Febriariska Nurmayani	96																			85	80	73						
16	2359	Feby Ananta Nugraha	89																			90	80	77						
17	2362	Intan Wahyu Nugrahaeni	87																			85	80	78						
18	2364	Lidia Prasti Ambar S	95																			95	75	78						
19	2365	Lukluk Nur Aini	78																			90	80	77						
20	2366	Lutvi Asyifa Rani	72	78																		90	80	77						
21	2400	Murti Lintang Sari	88																			70	70	75						
22	2402	Nada Afia Qurani	95																			85	80	80						
23	2371	Niken Diah Puspitasari	94																			95	75	80						
24	2372	Ninda Sasqia	82																			85	80	80						
25	2377	Sintia Cahya Wulandari	90																			90	80	78						
26	2442	Tachsa Amanda Affani	86																			85	80	72						
27	2410	Tya Inayah Nur R	95																			80	80	80						
28	2412	Viola Dessy Romadoni	88																			95	70	77						
29	2413	Wiem Gratandia Yosky	85																			90	70	75						
30	2379	Yesaya Rahutama Satria	74	78																		90	70	75						
31	2381	Yustinus Yoga H	80																			85	80	86						
32	2445	Zharfan Miftahul Huda	80																			85	75	80						

Perhitungan Minggu Efektif

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : X
Semester : Ganjil
Tahun Ajaran : 2016/2017

NO	Nama Bulan	Jumlah Minggu	Jml. Minggu Yang Tidak Efektif	Jml. Minggu Efektif	Ket.
1	Juli	4	2	2	
2	Agustus	5	-	5	
3	September	4	-	4	
4	Oktober	4	-	4	
5	November	4	-	4	
6	Desember	5	5	-	
	Jumlah	26	7	19	

Banyaknya Jam Pembelajaran Yang Efektif

19 Minggu x 2 jam pembelajaran = 38 jam pembelajaran

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas	: X (sepuluh)
Kompetensi Inti	:
KI 1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3	Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
1.1. mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam	Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka	a. Siswa mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau	- mampu menganalisis macam-	Tugas: Mengumpulkan data dari berbagai sumber	10 x 2 JP	

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.1 mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahanNegara</p> <p>3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p> <p>4.1 mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik</p>	<p>praktik penyelenggara an pemerintahan Negara</p> <p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p> <p>c. Nilai-nilai</p>	<p>membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p> <p>b. Siswa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>c. Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi)dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik</p>	<p>macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>- Mampu menganalisis konsep pembagian sistem kekuasaan negara.</p> <p>- mengkritisi hasil diskusi tentang macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>- mengkritisi</p>	<p>tentang pengertian, macam-macam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia serta tugas dan fungsi dari kementerian negara Indonesia dan pengklasifikasian lembaga kementerian Indonesia.</p> <p>Observasi Mengamati klasifikasi lembaga kementerian setelah reshuffle 2016 dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dengan susunan organisasi</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
penyelenggaraan pemerintahan negara	Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan	<p>penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>d. Siswa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>e. Siswa mendemonstrasikan pengambilan keputusan bersama dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>	<p>konsep pembagian sistem kekuasaan negara.</p> <p>- menganalisis Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian.</p> <p>- menganalisis klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non</p>	<p>kementerian terbaru.</p> <p>Diskusi : menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>Membuat laporan hasil pengumpulan data</p> <p>Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas</p> <p>Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang praktik penyelenggaraan pemerintrah sesuai</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			<p>Kementerian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengkritisi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia - mengkritisi tentang klasifikasi kementerian Negara RI dan non kementerian. - menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 	dengan nilai-nilai Pancasila.		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			pemerintahan - Menyimpulkan hasil temuan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila.			

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>1.2. menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p> <p>2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk,</p>	<p>Warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia</p> <p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Siswa mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau melakukan kajian konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Siswa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> - mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara Indonesia. - mampu mengkritisi tentang batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia. - mampu mengkritisi 	<p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan Membuat laporan hasil pengamatan Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas 	10 X 2JP	

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>2.3 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur</p>	<p>terhadap Tuhan YME di Indonesia</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan • Siswa menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan • Siswa mempresentasikan hasil analisis tentang ketentuan 	<p>Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang status warga Negara</p>	<p>Observasi</p> <p>Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>Portofolio,</p> <p>penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.		Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	<p>Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik mampu mengkritisi tentang asas-asas menjadi warga negara Indonesia. - Peserta didik mampu mengkritisi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. - Peserta didik mampu mengkritisi Penyebab Hilangnya Kewarganega 	<p>individu maupun kelompok tentang pasal-pasal dalam UUD NRI tahun1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamaman</p> <p>Tes</p> <p>Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			raan Indonesia.	negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan		

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas : XI (sebeleas)

Standar Kompetensi :

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>1.1. mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.1 mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahnNegara</p>	<p>Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara an pemerintahan Negara</p> <p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kementeria</p>	<p>a. Siswa mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p> <p>b. Siswa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik</p>	<p>- mampu menganalisis macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>- Mampu menganalisis konsep pembagian sistem kekuasaan negara.</p>	<p>Tugas: Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pengertian, macam-macam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia serta tugas dan fungsi dari kementerian negara Indonesia dan pengklasifikasian lembaga kementerian Indonesia.</p>	10 x 2 JP	

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara 4.1 mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	n Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementeria n c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelengg araan pemerintaha n	penyelenggaraan pemerintahan Negara c. Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi)dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. d. Siswa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. e. Siswa mendemonstrasikan pengambilan keputusan bersama dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam	- mengkritisi hasil diskusi tentang macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. - mengkritisi konsep pembagian sistem kekuasaan negara. - menganalisis Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia	Observasi Mengamati klasifikasi lembaga kementerian setelah reshuffle 2016 dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dengan susunan organisasi kementerian terbaru. Diskusi : menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Membuat laporan hasil pengumpulan data Mempresentasikan hasil laporan di		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
		kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	<p>dan lembaga non kementerian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - menganalisis klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non Kementerian. - mengkritisi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia - mengkritisi tentang klasifikasi 	<p>depan kelas</p> <p>Tes</p> <p>digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang praktik penyelenggaraan pemerintrah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			kementerian Negara RI dan non kementerian. - menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggar aan pemerintahan - Menyimpulka n hasil temuan kerangka praktik penyelenggar aan pemerintahan negara sesuai nilai- nilai			

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			Pancasila.			
<p>1.2. menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p> <p>2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang</p>	<p>Warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia</p> <p>c. Kemerdekaan beragama</p>	<ul style="list-style-type: none"> Siswa mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau melakukan kajian konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Siswa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan 	<ul style="list-style-type: none"> - mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara Indonesia. - mampu mengkritisi tentang batas-batas Wilayah Negara Republik 	<p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan Membuat laporan hasil pengamatan Mempresentasikan 	10 X 2JP	

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>2.3 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang</p>	<p>dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia</p>	<p>penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan • Siswa menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan 	<p>Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mampu mengkritisi Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 	<p>n hasil laporan di depan kelas</p> <p>Observasi</p> <p>Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>Portofolio, penilaian ini</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.		keamanan • Siswa mempresentasikan hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	tentang status warga Negara Indonesia. - Peserta didik mampu mengkritisi tentang asas-asas menjadi warga negara Indonesia. - Peserta didik mampu mengkritisi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. - Peserta didik mampu mengkritisi	digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pasal-pasal dalam UUD 1945		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.	yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan		

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas / Program : X

Tahun Pelajaran : 2016/2017

SEMESTER	KD	ALOKASI WAKTU	KET.
GASAL	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	2 jam	
	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	2 jam	
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	2 jam	
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	2 jam	
	1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil	2 jam	
	2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	2 jam	

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

	3.2 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	2 jam	
	4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	2 jam	
	1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.	2 jam	
	2.3 Menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2 jam	
	3.3 Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2 jam	
	4.3 Menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2 jam	
	1.4 Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil	2 jam	
	2.4 Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2 jam	
	3.4 Menganalisis hubungan struktural dan fungsional	2 jam	

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

	pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
	4.4 menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2 jam	
		32 jam	
GENAP	1.5 mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2 jam	
	2.5 menghargai nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2 jam	
	3.5 Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	2 jam	
	4.5 Menyaji faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	2 jam	
	1.6 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	2 jam	
	2.6 Mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2 jam	
	3.6 Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	2 jam	
	4.6 Menyaji hasil prediksi tentang ancaman terhadap negara dan	2 jam	


Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

	upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
	1.7 Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil	2 jam	
	2.7 Mengamalkan nilai-nilai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 jam	
	3.7 Menganalisis arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2 jam	
	4.7 Menyaji hasil keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 jam	
JUMLAH		24 jam	

Mlati, 21 Juli 2016

Mengetahui

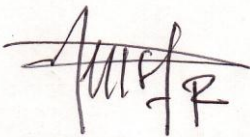
Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : XI/IPA & IPS
Tahun Pelajaran : 2016/2017

SEMESTER	KD	ALOKASI WAKTU	KET.
GASAL	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik	2 JP	
	1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia	2 JP	
	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	2 JP	
	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	2 JP	
	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi	4 JP	
	2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani	2 JP	
	2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi	2 JP	
	2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari	2JP	
	3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4 JP	
	3.2Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan	2 JP	
	3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2 JP	
JUMLAH		26 JP	
GENAP	4.1Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara	4 JP	
	4.2Menjelaskan tahap-tahap perjanjian Internasional	2 JP	


Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

	4.3 Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik	2 JP	
	4.4 Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional	2 JP	
	4.5 Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia	2 JP	
	5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional	2 JP	
	5.2Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional	2 JP	
	5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional	2 JP	
JUMLAH		18 JP	

Mlati, 24 Agustus 2016


Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih
NIM 13401244017

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM SEMESTER

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : X
Semester : 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU

1. Perhitungan Minggu Efektif Semester 1

NO	Nama Bulan	Jumlah Minggu	Jml. Minggu Yang Tidak Efektif	Jml. Minggu Efektif	Ket.
1	Juli	4	2	2	
2	Agustus	5	-	5	
3	September	4	-	4	
4	Oktober	4	-	4	
5	November	4	-	4	
6	Desember	5	5	-	
	Jumlah	26	7	19	

2. Banyaknya Jam Pembelajaran Yang Efektif

19 Minggu x 2 jam pembelajaran = 38 jam pembelajaran

B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU

No.	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu (Jam Pelajaran)
1.	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	8 JP
	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	

<p>royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p> <p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab</p>	<p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>	
	<p>4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>	
	<p>1.2 menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.</p>	8 JP
	<p>2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>	
	<p>3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>	
	<p>4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p>	

	fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.	
	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	2.3 Menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
		3.3 Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
		4.3 Menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	8 JP
2.	Ulangan harian		2 JP
3.	Perbaikan/Pengayaan		2 JP
4.	Ulangan Tengah Semester		2 JP
5.	Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas		2 JP
6.	Cadangan		2 JP
	Jumlah		26 Jam

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

C. PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
 Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kelas/Program : X MIA
 Semester : 1 (Satu)

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					Septemb er				Oktober				Novemb er				Desember				
				1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraa n pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 Mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintahan negara tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.	• Pengertian umum keberadaan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggar aan pemerintah negara.																												
	1.1.2 Mensyukuri keberadaan kementerian negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.					2	2																							
	1.1.3 Mensyukuri adanya penyelenggaraan																													

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM SEMESTER

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : XI
Semester : 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU

1. Perhitungan Minggu Efektif Semester 1

NO	Nama Bulan	Jumlah Minggu	Jml. Minggu Yang Tidak Efektif	Jml. Minggu Efektif	Ket.
1	Juli	4	2	2	
2	Agustus	4	-	4	
3	September	5	-	5	
4	Oktober	4	-	4	
5	November	4	-	4	
6	Desember	5	2	3	
	Jumlah	26	4	22	

2. Banyaknya Jam Pembelajaran Yang Efektif
22 Minggu x 2 jam pembelajaran = 44 jam pembelajaran

B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU

No.	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu (Jam Pelajaran)
1.	Menganalisis budaya politik di Indonesia	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.	4 JP
		1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.	
		1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.	4 JP
		1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.	2 JP
	Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.	4 JP
		2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.	2 JP
		2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi.	2 JP
		2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.	2 JP
	Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	4 JP
		3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.	2 JP
		3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa	2 JP

		dan bernegara.	
2.	Ulangan harian	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik. 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik. 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.	6 JP
3.	Perbaikan/Pengayaan	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik. 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik. 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.	6 JP
4.	Ulangan Tengah Semester		
5.	Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas		
6.	Cadangan		
	Jumlah		

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

C. PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
 Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kelas/Program : XI
Semester : 1 (Satu)

[illegible]

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Mlati, 24 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd

NIP 19711217 199702 2 004

Mahasiwa PPL



Lisa Ristyaningsih

NIM 13401244017

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



(Pelaksanaan pembelajaran dengan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok)



(Pelaksanaan pembelajaran dengan metode ceramah dilanjutkan dengan metode snowball throwing)



(pelaksanaan metode snowball throwing berjalan dengan lancar)



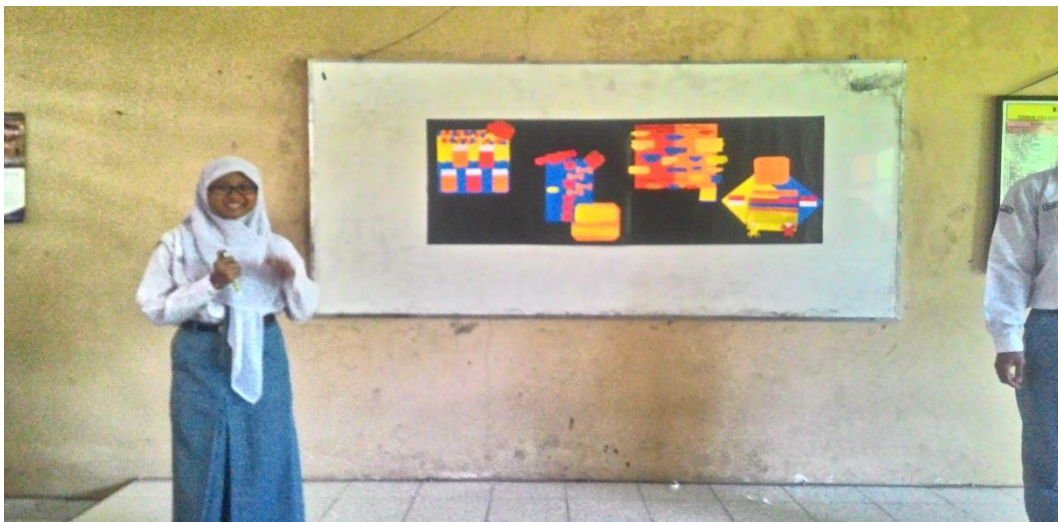
(Pelaksanaan ulangan harian berjalan dengan baik)



(Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw; anggota kelompok saling menjelaskan materi kepada kelompok lain)



(Proses pembuatan portopolio)



(Mempresentasikan hasil portopolio di depan kelas)



(Pelaksanaan piket rutin melayani kaitannya dengan perijinan untuk siswa)



(Pelaksanaan piket perpustakaan membantu merapihkan buku-buku)



(Foto bersama kelas X MIA pada saat hari Keistimewaan Jogja)